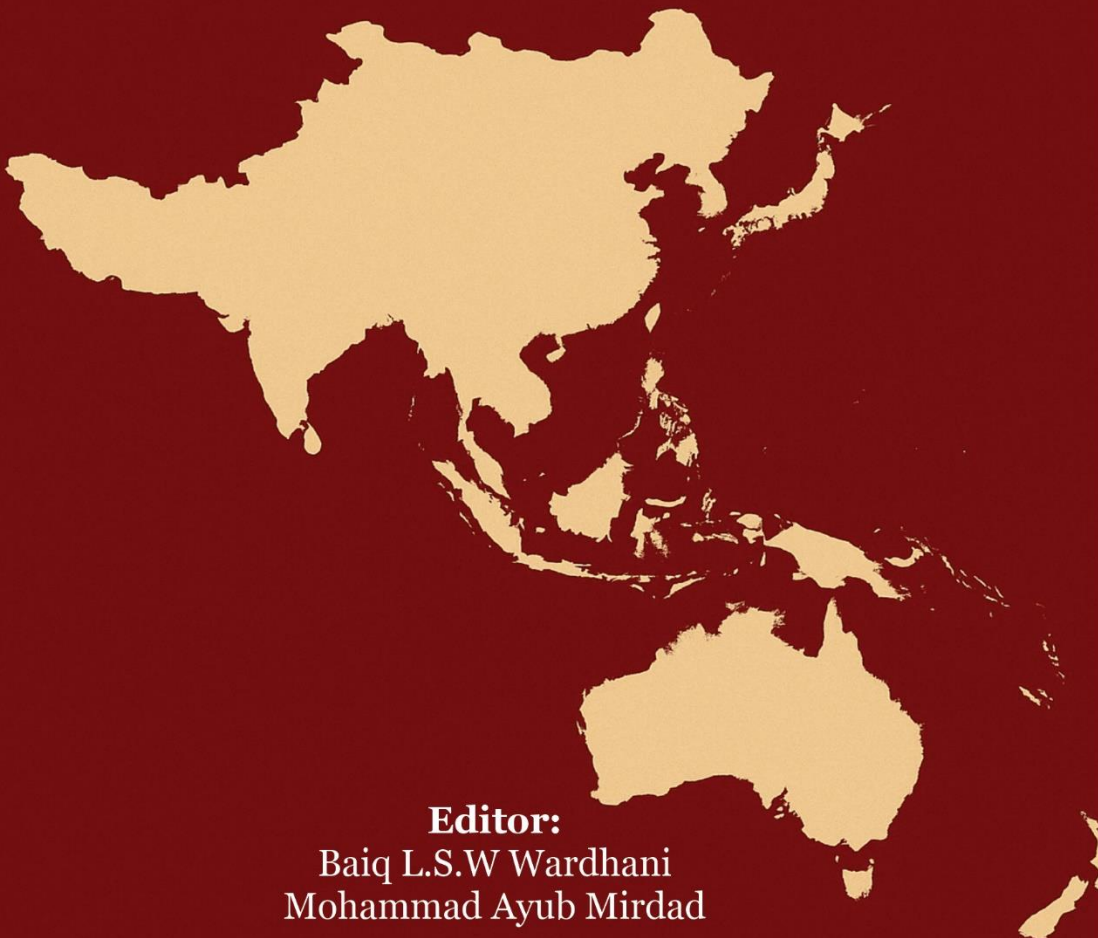


DINAMIKA INDO-PASIFIK DAN PENGARUHNYA PADA KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA



Editor:

Baiq L.S.W Wardhani
Mohammad Ayub Mirdad

DINAMIKA INDO-PASIFIK DAN PENGARUHNYA PADA KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA

Editor:

Baiq L.S.W Wardhani
& Mohammad Ayub Mirdad

DINAMIKA INDO-PASIFIK DAN PENGARUHNYA PADA KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA

Penulis:

Agastya Wardhana, A. Safril Mubah, Arvian Ijlal Adhipratama,
Baiq L.S.W Wardhani, Bilqis Ratu Widyoningrat, Citra Hennida,
Fadhila Inas Pratiwi, Ghulam Phasa Pambayung,
Hannah Fadhila Anindya Wibowo, Himmalia D. A. Rahmah,
Joko Susanto, Massari Inong Tanaurant, Mira Nanda Kurnianta,
M. Muttaqien, Moch. Yunus, Mohammad Ayub Mirdad,
Probo Darono Yakti, Radityo Dharmaputra, Sarah Anabarja,
Siti R. Susanto, Velicia Giovani Hartanto, Vinsensio Dugis

Editor:

Baiq L.S.W Wardhani & Mohammad Ayub Mirdad

Desain Cover & Layout :

Nimas Brantandari

ISBN: 978-634-7188-12-0

Copyright © April 2025

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa

Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya

Nomor Kontak: 085655396657

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku bunga rampai berjudul “Dinamika Indo-Pasifik dan Pengaruhnya pada Keamanan Manusia di Indonesia.” Buku ini hadir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap kompleksitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan implikasinya bagi Indonesia, baik sebagai negara kepulauan terbesar maupun sebagai bagian dari masyarakat global yang terus berubah. Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi episentrum persaingan kekuatan global abad ke-21. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan regional lainnya menciptakan dinamika yang tidak hanya memengaruhi stabilitas keamanan tradisional (seperti militer dan kedaulatan), tetapi juga keamanan manusia yang meliputi aspek ekonomi, pangan, energi, lingkungan, hingga hak-hak dasar masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, tidak dapat mengelak dari dampak dinamika ini. Konflik Laut China Selatan, ketegangan di Selat Taiwan, proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI), hingga persaingan teknologi dan penguasaan jalur laut internasional, semuanya memiliki konsekuensi langsung maupun tidak langsung bagi keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara umum buku ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana perubahan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik memengaruhi keamanan manusia di Indonesia? Dalam menjawabnya, penulis tidak hanya menganalisis kebijakan luar

negeri dan pertahanan, tetapi juga mengeksplorasi dampak tidak langsung seperti ancaman krisis pangan, migrasi paksa, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi yang diperburuk oleh persaingan kekuatan besar.

Buku ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang aktor-aktor, kepentingan strategis, dan titik potensi konflik di kawasan. Selain itu buku ini mencoba menjelaskan bagaimana persaingan geopolitik memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk melalui tekanan ekonomi, ancaman siber, dan kerentanan ekologis. Para penulis berharap tulisan-tulisan dalam buku ini dapat mendorong kebijakan yang responsive dengan memberikan rekomendasi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merespons tantangan ini dengan pendekatan berbasis hak dan keberlanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan banyak pihak. Terima kasih disampaikan kepada para mentor dan kolega di dunia akademik, informan dan praktisi keamanan yang berbagi pengetahuan lapangan, keluarga dan sahabat yang memberi dukungan moral selama proses penulisan, dan penerbit dan editor yang membantu menyempurnakan naskah ini.

Dinamika Indo-Pasifik adalah fenomena yang terus berkembang, dan buku ini hanyalah satu upaya untuk memahami kompleksitasnya. Penulis berharap karya ini dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang peduli pada masa depan Indonesia di tengah turbulensi geopolitik.

Kritik dan saran dari pembaca sangat dinantikan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran segar tentang keamanan manusia dalam konteks global yang semakin tidak pasti.

Surabaya, 21 April 2025

Penyunting buku,
Baiq L.S.W. Wardhani
Mohammad Ayub Mirdad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAGIAN I: HEGEMONI, PERSAINGAN KEKUATAN BESAR, DAN GEOPOLITIK DI KAWASAN INDO-PASIFIK	1
--	----------

USAID dan Tataanan Hegemoni Amerika Serikat di Indo-Pasifik	2
--	----------

Agastya Wardhana, Velicia Giovani Hartanto,
Hannah Fadhila Anindya Wibowo, Bilqis Ratu Widyoningrat

Perang Narasi Rusia di Indo-Pasifik: Eksplorasi Peran Rusia dalam Lanskap Indo-Pasifik dan Implikasinya terhadap Kebijakan Keamanan Indonesia	29
--	-----------

Radityo Dharmaputra, Ghulam Phasa Pambayung

Quo Vadis Poros Maritim Dunia dalam Menavigasi Ketegangan Geopolitik Indo-Pasifik: Dilema Keamanan Laut Cina Selatan.....	55
--	-----------

Probo Darono Yakti, Moch. Yunus, Joko Susanto

One China Policy di Kawasan Pasifik Selatan: Studi Kasus Fiji Pasca Kudeta Militer 2006.....	78
---	-----------

Mira Nanda Kurnianta, M. Muttaqien, Siti R. Susanto

**BAGIAN II: KEAMANAN MANUSIA DAN
KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL..... 107**

**Mengintegrasikan Keamanan Manusia
Dalam Kebijakan ASEAN..... 108**
Vinsensio Dugis

**Forum Multilateral atas Pengungsi Lingkungan
di Kawasan Indo-Pasifik: Respons dan Tantangan..... 135**
Citra Hennida, Fadhila Inas Pratiwi, Agastya Wardhana

**Menggagas Pendekatan Komprehensif Keamanan
Manusia: Aktivisme Kelompok Masyarakat Sipil
Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Xinjiang 160**
Sarah Anabarja, Arvian Ijlal Adhipratama, A. Safril Mubah

**Peran United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR)
Mengakomodasi “Indigenous knowledge” Masyarakat
Adat Terkait Isu Keamanan Manusia dalam Tata Kelola
Global Kebencanaan (*Global Disaster Governance*) 183**
Siti R. Susanto, Himmalia D. A. Rahmah

**BAGIAN III: TANTANGAN KEAMANAN
NON-TRADISIONAL DI INDO- 207**

**Relevansi Ekonomi Biru ASEAN bagi Keamanan
Pangan Indonesia 208**
Baiq Wardhani

**Keamanan Siber-Maritim Indo-Pasifik:
Respon Kebijakan Indonesia 229**
Fadhila Inas Pratiwi, Massari Inong Tanaurant

**Kejahatan Transnasional di Indo-Pasifik
dan Keamanan Manusia Indonesia 248**
Mohammad Ayub Mirdad

TENTANG PENULIS..... 268

BAGIAN I: HEGEMONI, PERSAINGAN KEKUATAN BESAR, DAN GEOPOLITIK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

USAID dan Tatahan Hegemoni Amerika Serikat di Indo-Pasifik

Agastya Wardhana

Velicia Giovani Hartanto

Hannah Fadhila Anindya Wibowo

Bilqis Ratu Widyoningrat

Pendahuluan

United States Agency for International Development (USAID) merupakan unit yang mengelola bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri AS. Pada tahun 2023 tercatat USAID memberikan sebanyak \$43,8 Miliar ke berbagai penerima di seluruh dunia (Desilver, 2025). Hal ini membuat USAID menjadi instrumen penting untuk menjaga pola interaksi dalam tatahan internasional yang dibangun oleh AS. Tulisan ini membahas mengenai USAID sebagai elemen penting dalam tatahan hegemoni AS yang sulit untuk digantikan setelah ia dihentikan oleh Trump. Menggunakan sudut pandang tatahan transformasional kami berargumen bahwa USAID adalah representasi nyata dari hegemoni AS yang mau dan mampu untuk menangani permasalahan sosial-ekonomi bagi kebaikan bersama. Kami menggunakan Indo-Pasifik sebagai *showcase* untuk menunjukkan absennya USAID justru menambah masalah dan menghentikan banyak inisiatif dan proyek yang berakibat fatal bagi banyak negara. Bagian pertama tulisan ini membahas mengenai kerangka pemikiran USAID sebagai tatahan hegemoni AS, bagian kedua berisi mengenai USAID dan upaya Trump untuk menghilangkan USAID, bagian ketiga

berisi diskusi dampak USAID dan konsekuensinya bagi kawasan Indo-Pasifik, bagian terakhir berisi simpulan.

USAID, Hegemonic Order dan International Transformation

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa USAID merupakan elemen dari Hegemoni AS. Dalam sejarah, hegemoni AS seringkali merujuk pada konotasi yang negatif karena asumsi ini didasarkan pada elemen materialistis dari kekuatan yang dimiliki AS (Krauthammer, 1990/1991). Premis bahwa dalam dunia yang anarki negara paling kuat memiliki insentif untuk mengatur sistem internasional dan membentuk pola interaksi sesuai dengan keinginan mereka mendasari asumsi hegemoni dalam Hubungan Internasional (HI) (Mazarr, 2018). Transformasi kekuatan dan pola interaksi dari satu *great power* ke *great power* lain memberikan legitimasi bagi negara paling kuat untuk lantas menjadi hegemoni yang mengatur pola interaksi tersebut.

Dalam konteks hegemoni AS, ia muncul paska Perang Dunia II ketika sistem internasional bertransformasi menuju unipolaritas. Hal ini tidak lepas dari kemauan dan kemampuan AS untuk membuat perubahan dalam tatanan internasional yang ada. Tatanan internasional yang dimaksud adalah berubahnya pola interaksi antar negara akibat adanya kombinasi antara kemunculan norma, rulemaking institutions dan organisasi politik atau rezim yang mendasari (Mazarr, 2018). Pola interaksi ini bersumbu dan bersumber pada kekuatan material AS (militer, ekonomi, diplomasi) untuk menciptakan kondisi interaksi internasional yang kita kenal setidaknya dalam 80 tahun terakhir sebagai Liberal International Order (LIO).

LIO sebagai sebuah tatanan memiliki berbagai dimensi yang mendasari, hal ini dikarenakan tatanan internasional tidak bersifat *singular* melainkan terdiri atas *overlapping suborders* yang mendasari. Kita mengenal AS sebagai hegemoni dikarenakan adanya supremasi militer dalam mewujudkan tatanan perdamaian internasional, atau dari kapabilitas ekonomi dan diplomasi AS dalam mengelola sistem ekonomi internasional. Tapi ada satu dimensi lain yang membuat Hegemoni AS menjadi unik yaitu dimensi bantuan internasional. Dimensi bantuan internasional ini merupakan bentuk *Transformational Order* yang dibuat oleh AS. Transformational Order adalah tatanan yang bukan hanya tentang politik kepentingan antar negara tapi berkaitan dengan sesuatu yang lebih universal seperti perwujudan kebaikan bersama (Mazarr, 2018). Tatanan ini berfokus pada upaya membangun *value* bersama sehingga institusi yang dibangun bisa memiliki legitimasi yang diterima. Tatanan ini bukan hanya refleksi dari kepentingan hegemoni tetapi berfokus pada upaya perwujudan kebaikan bersama. AS telah sedemikian rupa membuat tatanan bantuan global yang berdampak bagi kebaikan bersama yang dapat kita pahami sebagai upaya membangun Transformational Order sebagai salah satu dimensi tatanan hegemoninya. Tatanan ini salah satunya terwujud melalui USAID, organ donor pemerintah AS yang bertujuan untuk mendistribusikan bantuan luar negeri ke seluruh dunia.

Namun, *Transformational Order* menyediakan satu proposisi yang juga mampu menjelaskan perilaku menyimpang dari tatanan yang ada. Dalam *Transformational Order*, negara dapat menghancurkan tatanan tersebut ketika ia bertindak menyalahi aturan dan norma yang ada dalam tatanan tersebut.

Perilaku menyimpang ini dapat berdampak signifikan terhadap tatanan yang dibangun dikarenakan dalam *Transformational Order*, nilai dan norma dibuat berdasarkan pola interaksi dan keinginan negara hegemon yang seiring berjalannya waktu menjadi norma bersama sehingga untuk menggantikannya hampir mustahil. Hal ini yang terjadi dalam tatanan bantuan internasional, USAID telah menjadi elemen tatanan hegemoni AS yang seringkali luput dari sorotan. Hilangnya USAID dapat bermakna lebih signifikan bagi kebaikan bersama dibandingkan elemen hegemoni AS yang lain (yang secara material dapat digantikan oleh aktor lain). Oleh karena itu kami berargumen bahwa USAID adalah representasi nyata dari hegemoni AS yang mau dan mampu untuk menangani permasalahan sosial-ekonomi bagi kebaikan bersama. Bagian selanjutnya akan mengulas mengenai USAID, Upaya Trump menghilangkan USAID dan signifikansi USAID bagi kebaikan bersama dengan mengambil fokus pada kawasan Indo-Pasifik.

USAID dan Donald Trump

USAID merupakan lembaga pemerintahan AS yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan luar negeri guna mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan global. USAID digagas pada era kepemimpinan John F. Kennedy. USAID dibentuk pada 3 November 1961, mengikuti ketentuan Foreign Assistance Act tahun 1961. USAID menjadi lembaga pelaksana utama bantuan kemanusiaan dan politik strategis bagi pengembangan pemerintah AS. Dalam pernyataannya, USAID menyampaikan misinya untuk mengentas kemiskinan dan menyebarkan demokrasi sembari meningkatkan keamanan dan kemakmuran

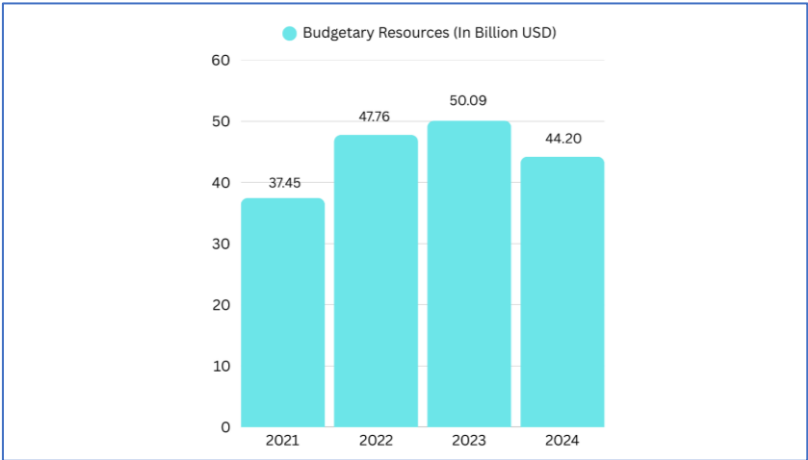
AS. Misi tersebut menyebutkan, “We partner to end extreme poverty and to promote resilient, democratic societies while advancing our security and prosperity.”

USAID memiliki banyak bidang cakupan, seperti kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, krisis kemanusiaan. Fokus ini kemudian tersebar ke berbagai negara yang membutuhkan bantuan luar negeri dalam menghadapi krisisnyanya. Contohnya adalah bantuan perang yang diberikan kepada Ukraina, bantuan untuk pengawasan penyakit di Kamboja, bantuan untuk pencegahan HIV di Uganda, bantuan untuk penerapan *peacebuilding* di Somalia, dan masih banyak lagi (Weiland & Nolan, 2025). Dalam pendanaannya, USAID membaginya ke dalam program-program yang berbeda, yang mana di setiap program memiliki aturan dan fleksibilitas yang berbeda (Tarnoff, 2015). Sebagian besar bantuan yang diberikan diutamakan kepada sektor kesehatan. USAID menjadi representasi geopolitik dan diplomasi luar negeri AS di berbagai kawasan.

Sejak hari pertama Donald Trump menjabat periode keduanya sebagai presiden AS pada 20 Januari 2025, pemerintah AS telah memulai berbagai upaya untuk menghentikan pendanaan USAID yang selama ini telah berkontribusi besar dalam berbagai proyek kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, keamanan pangan, dan proyek-proyek lainnya di berbagai belahan dunia. Lembaga ini memiliki kantor di lebih dari 60 negara dan mempekerjakan sekitar 10.000 orang (Seddon, 2025). Selain itu, menurut laporan tahun anggaran 2021-2024 pemerintah AS, lembaga ini menerima rata-rata 44 miliar USD setiap tahunnya. Penghentian pendanaan USAID merupakan bagian dari *executive order* yang

diterbitkan oleh Trump pada hari itu dalam rangka membekukan hampir seluruh program bantuan luar negeri—termasuk program-program USAID—selama 90 hari dan memulai periode peninjauan kembali.

Pendanaan USAID dalam Sumber Daya Anggaran Tahun Anggaran 2021-2024



Sumber: Data diolah dari www.usaspending.gov/

Langkah Trump dan para pendukungnya di pemerintahan untuk menghentikan pendanaan USAID bukan tanpa alasan. Trump memandang USAID dan proyek-proyeknya sebagai bentuk pemborosan dan penipuan yang harus dihentikan. Hal ini tercermin dalam upayanya menjadikan USAID sebagai salah satu target utama dalam kampanye pemangkasan anggaran, bersama dengan Elon Musk yang menjabat di Department of Government Efficiency (DOGE). Keduanya menyatakan bahwa program-program USAID boros dan tidak sesuai dengan agenda presiden (Knickmeyer &

Whitehurst, 2025). Pandangan Trump terhadap USAID juga tampak dalam pernyataannya pada konferensi pers 4 Februari 2025, yang menyebut bahwa masalah USAID ada pada “orang-orang gila kiri” yang menjalankannya. Selain itu, Trump menganggap USAID sebagai bentuk penyalahgunaan pajak warga AS (House, 2025). Menurutnya, “For decades, the United States Agency for International Development (USAID) has been unaccountable to taxpayers as it funnels massive sums of money to the ridiculous—and, in many cases, malicious—pet projects of entrenched bureaucrats, with next-to-no oversight.”

Penghentian pendanaan USAID berkembang dengan pesat sejak pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari pertama kali diumumkan. Seminggu setelahnya, lusinan pejabat senior USAID ditempatkan pada cuti administratif berbayar. Perintah ini datang dari surat elektronik yang dikirim pada hari Senin 27 Januari dan langsung efektif berlaku (Toosi, Lippman, & Gramer, 2025). Menyusul pada Selasa malam, 4 Februari, sebuah memo diunggah pada laman resmi USAID, yang memberitahukan bahwa semua pegawai USAID, kecuali yang bertugas dalam fungsi kritis, kepemimpinan inti, atau program tertentu, akan diberhentikan sementara secara global pada hari Jumat, 7 Februari. Adapun mereka yang ditugaskan di luar negeri diharapkan untuk kembali ke AS dalam waktu 30 hari (USAID, 2025). Selanjutnya menurut laporan per 6 Februari, pemerintah mengabarkan agensi bahwa jumlah tenaga kerja global USAID akan dipangkas besar-besaran, dari yang sebelumnya berjumlah sekitar 10.000 menjadi hanya 290 posisi (Demirjian & Kavi, 2025).



Notification of Administrative Leave

As of 11:59 p.m. EST on Sunday, February 23, 2025, all USAID direct hire personnel, with the exception of designated personnel responsible for mission-critical functions, core leadership and/or specially designated programs, will be placed on administrative leave globally.

Concurrently, USAID is beginning to implement a Reduction-in-Force that will affect approximately 1,600 USAID personnel with duty stations in the United States.

Individuals that are impacted will receive specific notifications on February 23, 2025, with further instructions and information about their benefits and rights.

Designated essential personnel who are expected to continue working will be informed by Agency leadership February 23, 2025, by 5 p.m. EST.

For overseas personnel, USAID intends a voluntary Agency-funded return travel program and other benefits. USAID is committed to keeping its overseas personnel safe. Until they return home, personnel will retain access to Agency systems and to diplomatic and other resources.

In the coming week, we will provide details on how to retrieve personal items from the former USAID workspaces and return government issued devices.

Additional guidance is forthcoming, and all future updates/notices will continue to be communicated through official USAID channels and posted on [USAID.gov](https://www.usaid.gov) for those without access to USAID systems.

[USAID Office of Inspector General](#)

Sumber: <https://www.usaid.gov/>

Pemberhentian pendanaan berbagai program secara sepihak oleh pemerintah AS memicu reaksi negatif dari para penerima bantuan dan lembaga nirlaba lainnya yang menentang keputusan tersebut. Gugatan datang silih berganti kepada pengadilan AS mengenai perkembangan USAID dan gejolak pun muncul di internal AS akibat hal ini. Pada 8 Februari, seorang hakim federal, Carl Nichols, mengeluarkan perintah bagi pemerintahan Trump untuk menghentikan sementara beberapa elemen—yang meliputi isu pemberhentian tenaga kerja agensi—dari upayanya untuk menutup USAID (Crowley & Cameron, 2025). Hakim federal lainnya, pada 13 Februari, mengeluarkan perintah sementara terkait isu pembayaran bantuan asing sesuai dengan kontrak yang telah berlaku, yakni berupa larangan terhadap pemerintahan Trump yang menghentikan pembayaran untuk kontrak yang berlaku sebelum 20 Januari. Meskipun begitu, terdapat laporan dari kelompok

penerima bantuan bahwa pemerintah AS tidak mematuhi perintah tersebut.

Selanjutnya pada 21 Februari, telah rilis keputusan bahwa pemerintahan Trump diizinkan melanjutkan rencana PHK-nya, yang segera berimbas pada pemecatan 2.000 pegawai agensi, dan pemberian cuti pada ribuan pegawai lainnya. Adapun pada 25 Februari, hakim federal dalam menangani gugatan untuk mengembalikan bantuan asing, mengeluarkan perintah bagi pemerintah Trump untuk segera membayar sekitar 2 miliar USD dalam pekerjaan bantuan yang telah diselesaikan, dengan batas waktu tengah malam hari berikutnya. Menanggapi perintah tersebut, pemerintahan Trump segera meminta campur tangan dari Mahkamah Agung (MA) AS, dan pada keesokan harinya, 26 Februari, Ketua MA John Roberts membatalkan batas waktu yang telah ditetapkan pengadilan federal (Montague, Crowley, & Liptak, 2025). Hal ini dianggap memberikan kemenangan bagi pemerintahan Trump untuk saat ini. Akhirnya, pada hari yang sama, pejabat Trump mengungkapkan dalam dokumen pengadilan bahwa mereka telah menyelesaikan peninjauan atas semua bantuan asing dan akan menghentikan 6.000 hibah USAID, yang berarti sekitar 90% dari pekerjaan lembaga tersebut (Walker & Lai, 2025).

USAID, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki peranan penting dalam berbagai program kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Adapun salah satu kawasan yang menerima jumlah dana yang signifikan dari USAID adalah Indo-Pasifik. Hal ini dilatarbelakangi oleh Indo-Pasifik sebagai arena strategis yang vital bagi AS dari segi dinamisme ekonomi, signifikansi maritim, serta rivalitas dengan China yang semakin meningkat. Meliputi lebih dari setengah populasi dunia,

menyumbang 60% dari PDB global, serta dua pertiga pertumbuhan ekonomi global, Indo-Pasifik merupakan pendorong penting bagi keamanan dan kemakmuran AS di masa depan (JAKARTA, 2024). Kawasan ini menjadi sangat penting bagi AS untuk mempertahankan “tatanan internasional yang bebas dan terbuka” di tengah ketegangan rivalitas AS-China (O'Rourke, 2024). Tak mengherankan apabila selama ini AS melalui USAID banyak menggelontorkan dana dan proyek pembangunan untuk kawasan ini.

Untuk menunjukkan signifikansi USAID bagi kebaikan bersama, kami mengambil Indo-Pasifik sebagai fokus kawasan. Dengan dihentikannya pendanaan USAID, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik mengalami kesulitan dalam pembangunan berkelanjutan di negaranya dan muncul dinamika di Indo-Pasifik. Tulisan ini akan menyoroti dampak dari pembubaran USAID bagi Indo-Pasifik yang dikelompokkan berdasarkan isu yang terdampak, seperti bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Bidang Kesehatan

Dana USAID yang diberikan di bidang kesehatan dapat dikatakan cukup banyak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sektor kesehatan atas penghentian pendanaan USAID. Sebagaimana disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, bahwasanya penghentian pendanaan USAID akan menjadikan dunia kurang sehat, kurang, sejahtera, dan kurang aman (Psaledakis & Zengerle, 2025). Dana dari USAID di bidang kesehatan, beberapa diantaranya digunakan untuk penelitian medis yang tujuannya untuk menemukan obat dari penyakit yang masih belum ditemukan penawarnya dan

perawatan kepada penderita. Proyek penelitian tersebut terpaksa berhenti seiring dihentikannya dana dari USAID. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah ketika obat eksperimental ataupun produk medis yang ada di tubuh manusia harus terputus pengawasannya dari peneliti (Nolen, 2025).

Dalam hal ini, HIV (Human Immunodeficiency Virus) menjadi perhatian utama bagi dunia kesehatan. Sunil Solomon, seorang epidemiologis dari John Hopkins University, memproyeksikan bahwa perubahan tatanan ini akan menuntun pada kebangkitan penyebaran HIV yang lebih banyak (Saul, 2025). HIV memerlukan perawatan yang intensif, yang tujuannya untuk menekan virus, mencegah perkembangbiakan virus, serta mengurangi jumlah virus dalam tubuh. Perawatan ini tidak hanya membantu penderita menjaga kesehatannya, namun juga untuk menurunkan risiko penyebaran virus HIV kepada orang lain. Dengan dihentikannya dana USAID, terdapat studi yang memproyeksikan bahwa akan ada 4,4 juta infeksi baru (WHO, 2025). Bahkan ketika skenario penghentian dana USAID dibatalkan setelah 2 tahun, hal ini tidak mengubah apapun dari angka penderita HIV karena kerusakan sudah terjadi dan infeksi baru tetap meningkat secara drastis. Dalam hal ini, negara yang paling dirugikan adalah negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Negara-negara tersebut telah mendapatkan dampak dari adanya perawatan HIV bagi penderitanya, ibu hamil dan anak-anak, dan turut mencegah penyebaran HIV pada populasi manusia (WHO, 2025).

Tidak hanya fokus pada virus HIV, tuberculosis (TB) menjadi perhatian di beberapa negara di Indo-Pasifik. Negara di Asia Tenggara menjalin kerjasama dengan AS terkait HIV dan TB, salah satunya adalah Indonesia yang terdampak akan hal ini.

Pada tahun 2023, kasus TB di Indonesia mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1 juta kasus (Widianto, 2025). Penghentian pendanaan USAID akan sangat terasa dampaknya bagi Indonesia. Menurut Olivia Herlinda, analis kesehatan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), USAID memberikan dampak besar bagi kesehatan di Indonesia, terlebih pada kesehatan ibu dan anak, HIV, TB, dan mitigasi pandemi (Widianto, 2025). Program ini berdampak besar pada perawatan HIV dan TB, namun apabila dana USAID dihentikan maka hal yang terjadi adalah perawatan untuk kedua penyakit penting tersebut runtuh dan semakin parah serta menysasar ibu dan anak. Bahkan organisasi kecil merasakan dampak dari penghentian pendanaan USAID, seperti Khana di Kamboja yang berfokus pada HIV dan TB (Rigby, Peyton, & Farge, 2025).

Penghentian dana dari USAID juga sangat terasa bagi Thailand. Sebuah klinik di perbatasan Thailand-Myanmar menjadi sangat terdampak dengan penghentian pendanaan USAID. Banyak pekerja bantuan terpaksa berhenti setelah adanya berita penghentian pendanaan USAID, tidak ada satupun dokter yang bertugas di klinik tersebut (Watson, 2025). Pasien-pasien di klinik terpaksa dipulangkan dan beberapa diantaranya hanya terdiam di klinik tanpa mendapatkan tindakan, seperti ibu hamil yang ada di fase persiapan kelahirannya. Selain itu, klinik ini menjadi rujukan bagi pengungsi Myanmar. Hal ini disebabkan oleh kondisi negaranya yang telah dikuasai junta militer dan seringkali menjadi korban dari perlawanan terhadap junta militer Myanmar. Organisasi kecil merasa bahwa penghentian pendanaan USAID merugikan bagi pengungsi karena mereka tidak mendapatkan bantuan dari pihak yang

semestinya (Watson, 2025). Semua organisasi yang bergantung pada bantuan kemanusiaan AS telah terdampak, bahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan dukungan bagi pengungsi akibat perang telah ditanggihkan (Ekvitthayavechnukul & Peck, 2025).

Bidang Pendidikan

Dampak dari penghentian pendanaan USAID tidak hanya terjadi pada bidang kesehatan saja, namun juga menyasar bidang pendidikan karena banyaknya dana yang dikeluarkan USAID di bidang pendidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh masifnya protes dari masyarakat AS, 6 dari 10 orang merasa bahwa pemerintah mengeluarkan dana terlalu banyak untuk bantuan asing dan kurang fokus pada domestiknya (Press, 2025). Dari dana tersebut, banyak negara di kawasan Indo-Pasifik yang masih bergantung pada dukungan eksternal dalam meningkatkan akses, kualitas, dan infrastruktur pendidikan. Dukungan ini sering menargetkan kelompok rentan di wilayah terpencil yaitu anak-anak, agar memiliki akses pendidikan sebagaimana mestinya. Selain itu, beberapa bantuan juga ditujukan bagi anak-anak di wilayah perbatasan.

Bangladesh menjadi rumah bagi 1 juta pengungsi Rohingya korban genosida di Myanmar. Pengungsi Rohingya di Bangladesh merasa takut dengan kondisi setelah pendanaan berhenti. Dengan berhentinya pendanaan ini, banyak hal yang mereka takutkan, salah satunya adalah sulitnya akses pada pendidikan dan kesempatan kerja (Paul, 2025). Dana yang diberikan oleh AS untuk pengungsi Rohingya sejak tahun 2017 telah terakumulasi sebanyak 2,4 miliar dolar. Ketakutan yang disampaikan oleh pengungsi Rohingya nyata di depan mata.

Seluruh kebutuhan pangan, kesehatan, dan sistem pendidikan telah hancur karena berhentinya dana kemanusiaan (Paul, 2025). Dana yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan pengungsi terpaksa harus berhenti, kini mereka memprioritaskan kebutuhan untuk kelompok yang lebih rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ketika kebutuhan pengungsi tidak dapat terpenuhi, hal yang dikhawatirkan adalah pengungsi menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan radikalisme (Paul, 2025). Apabila hal-hal tersebut terjadi, permasalahan ini bukan lagi menjadi permasalahan bagi Bangladesh atau pengungsi Rohingya saja, melainkan menjadi permasalahan global. Selain itu, dana untuk pendidikan juga diberikan untuk melakukan riset, seperti di Australia.

Pemerintahan AS mengeluarkan 600 juta dolar setiap tahunnya untuk mendanai universitas-universitas yang ada di Australia (DOGE, 2025). Bagi Australia, AS merupakan mitra yang mengeluarkan dana terbesar untuk riset tiap tahunnya. Dengan adanya penghentian pendanaan USAID, Australia memproyeksikan dampak yang cukup masif. Pasalnya, dana tersebut dipergunakan untuk mengembangkan produk medis yang menopang keamanan kesehatan di Australia. Program serupa juga diberikan kepada generasi muda di Myanmar. DISP (The Diversity and Inclusion Scholarship Program) merupakan program beasiswa yang diinisiasi pada tahun 2024 dan diberikan kepada 1000 pelajar di Myanmar untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi ke wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara (Burma, 2024). Pelajar Myanmar mendapatkan kesempatan untuk belajar di India, Kamboja, Indonesia, dan Filipina, atau secara daring di University of Arizona. Kekacauan dari penghentian pendanaan USAID berdampak bagi pelajar

Myanmar yang belajar di negara-negara tersebut. Mereka telah merencanakan masa depannya untuk belajar dan mendapatkan gelar, namun kini terhambat oleh kebijakan penghentian pendanaan USAID sehingga mereka kebingungan dengan langkah selanjutnya. Pilihan untuk kembali ke negaranya dianggap tidak efektif karena dengan belajar di luar negeri mereka tidak dibatasi oleh sistem pendidikan sebagaimana yang terjadi di negaranya, yang dibatasi oleh junta militer. Dampak di sektor pendidikan menciptakan efek domino pada stabilitas sosial di negara-negara Indo-Pasifik. Ketika pendidikan terganggu, peluang bagi generasi muda untuk bersaing di kancah global semakin terbatas. Hal ini tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial, namun juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pengembangan Ekonomi

USAID tentu juga memainkan peran krusial dalam konteks pengembangan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik. Secara historis, USAID telah berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Hadirnya pembongkaran program-program USAID membuat ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan hubungan perdagangan menjadi terancam dan berpotensi mengalami kemunduran signifikan. Menurut data pada grafik di bawah, kawasan Indo-Pasifik diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi 5,0% tahun 2024 dan masih mempertahankan stabilitas pada 4,9% di tahun 2025 (ADB, 2025).

PRAKIRAAN PERTUMBUHAN PDB

NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI
ASIA DAN PASIFIK

Sumber: <https://www.adb.org/id/news/adb-sees-growth-declining-asia-and-pacific>

Penarikan USAID dapat menyebabkan kontraksi dalam tingkat pertumbuhan ini, karena dalam beberapa situasi pemerintah lokal negara tidak memiliki sumber daya untuk mengisi kebutuhan pendanaan ini. Adapun salah satu proyek yang kemudian dicetuskan adalah USAID Indo-Pacific Opportunity (IPOP). Proyek ini diluncurkan pada tahun 2021 dengan tujuan meningkatkan ketahanan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Menurut data, tujuan utama USAID IPOP adalah mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko utang yang terkait dengan proyek infrastruktur negara-negara kawasan Indo-Pasifik (IDG, 2025). Dengan berfokus pada peningkatan kebijakan ekonomi makro, IPOP berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama regional, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan utama di bawah IPOP mencakup pengembangan kapasitas bagi lembaga lokal untuk memastikan

kemandirian, dukungan untuk kemitraan publik-swasta (KPS) untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan promosi reformasi perdagangan dan kebijakan investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan.

Namun, pembubaran USAID telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang keberlanjutan inisiatif IPOP. Pergeseran ini tentu meningkatkan potensi terganggunya proyek-proyek yang sedang berlangsung dan mengurangi pengaruh AS di kawasan tersebut. Hal ini memiliki implikasi besar bagi dinamika ekonomi di Indo-Pasifik. Ketika AS mundur, kemudian disusul hadirnya para pesaing baru, khususnya Tiongkok, dengan cepat menciptakan kekosongan peran. Lantas, meningkatkan kehadiran pesaing-pesaing lainnya di kawasan tersebut. Tiongkok kemudian turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut, berinvestasi besar-besaran dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang dapat membentuk kembali aliansi ekonomi regional. Bahkan Rusia juga berupaya memperluas pengaruh mereka, yang berpotensi mengarah pada lanskap ekonomi yang lebih terfragmentasi (Silva, 2025). Sebagai tanggapan terhadap perubahan ini, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) telah dibentuk untuk mendorong kolaborasi antara mitra-mitra regional (Commerce, n.d.). Kerangka kerja ini berfokus pada penguatan hubungan dagang, peningkatan ketahanan rantai pasokan, dan promosi investasi infrastruktur. Namun, komitmen AS terhadap investasi dalam infrastruktur regional dapat terancam oleh pembubaran USAID, yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depan keterlibatan AS di Indo-Pasifik. Ketiadaan USAID dapat menghambat kemajuan dalam mengatasi untuk stabilitas

ekonomi jangka panjang. Iklim investasi di kawasan tersebut menjadi sukar diprediksi tanpa dukungan AS, sehingga berpotensi menghambat investasi asing dan mempersulit upaya pemulihan ekonomi. Seiring dengan terus berkembangnya dinamika di Indo-Pasifik, kemitraan strategis dan upaya kolaboratif akan sangat dibutuhkan untuk menavigasi tantangan dan peluang yang ada di masa depan.

Ketahanan Pangan

Menurut data yang ditemukan, investasi USAID menyebabkan meningkatnya penjualan pertanian tahunan sebesar sekitar \$5,7 miliar, yang secara langsung meningkatkan akses terhadap pangan dan meningkatkan ketahanan pangan bagi populasi rentan di seluruh dunia (Chester, 2025). Lembaga tersebut bahkan menginvestasikan sekitar \$40 miliar dalam program pertanian di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan hasil panen, peningkatan gizi, serta peningkatan akses terhadap pangan (State, 2011). Program-program ini mencakup bantuan teknis, berupa penyediaan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan; pembangunan infrastruktur, yang berinvestasi dalam sistem irigasi dan jaringan transportasi untuk mengurangi kerugian pasca panen; dan program gizi yang bertujuan untuk meningkatkan keragaman makanan dan mengurangi kekurangan gizi. Maka, USAID yang dihapus menimbulkan beberapa risiko terhadap ketahanan pangan di Indo-Pasifik. Pertama, pengurangan dukungan pertanian dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Menurut data, diperkirakan bahwa tanpa dukungan yang memadai, pada tahun 2030 jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi akan mencapai 670 juta (Nations, 2022). Kedua, hilangnya program

gizi tentu dapat memperburuk tingkat kekurangan gizi. Meskipun lebih dari \$42.6 miliar telah dijanjikan untuk memerangi malnutrisi, namun dalam implementasi masih terdapat kekurangan dalam komitmen yang berfokus pada keamanan pangan dan gizi (Report, 2022). Ditemukan 1 dari 5 anak di Asia Selatan mengalami hambatan pertumbuhan akibat gizi yang tidak memadai, situasi yang dapat memburuk tanpa bantuan dari USAID. Ketiga, pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi jutaan orang di Indo-Pasifik. Inflasi tinggi dan penurunan budidaya makanan, diperburuk oleh bencana terkait cuaca, telah menyebabkan keluarga tidak mampu menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi anak-anak mereka, lantas lebih dari 15 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut (Monica, 2024). Pembubaran USAID dapat mengganggu stabilitas ekonomi ini, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan dan masalah akses pangan.

Upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah staf USAID telah membahayakan pendanaan penting untuk bantuan kemanusiaan— salah satunya berupa bantuan pangan, khususnya di wilayah seperti Gaza, yang dapat menjadi peringatan bagi Indo-Pasifik. Laporan menunjukkan bahwa pengurangan staf USAID telah berdampak buruk pada kemampuan lembaga tersebut untuk mengirimkan pasokan penting, termasuk makanan, perawatan medis, dan tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina (Kingsley & Rasgon, 2025). Dengan hanya sedikit pengurus yang tersisa untuk mengelola portofolio regional lembaga tersebut, pengiriman bantuan telah melambat secara signifikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi peningkatan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Seperti yang dicatat Dave

Harden, mantan direktur misi USAID, “bantuan yang menyelamatkan nyawa ke Gaza akan terganggu.” Situasi ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan USAID dalam menjaga stabilitas melalui bantuan kemanusiaan, salah satunya bantuan pangan, peran yang sama pentingnya di Indo-Pasifik. Sebagai kesimpulan, pembongkaran inisiatif USAID di kawasan Indo-Pasifik mengancam akan merusak kemajuan selama puluhan tahun dalam ketahanan pangan dan gizi. Saat kawasan Indo-Pasifik bergulat dengan dua tantangan utama, perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi, kebutuhan yang berkelanjutan dalam pengembangan pertanian dan bantuan pangan justru menjadi semakin krusial.

Simpulan

Berdasarkan tulisan diatas, maka USAID merupakan representasi nyata atas tatanan hegemoni AS yang memiliki kapabilitas dan kemauan untuk menangani berbagai isu untuk kesejahteraan bersama. Upaya penghancuran USAID yang diinisiasi oleh Trump memiliki dampak yang signifikan, salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Indo-Pasifik. Berdasarkan pembahasan di atas, sektor kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan ketahanan pangan, menjadi sektor yang paling dirugikan. Beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik, cukup tergantung pada pendanaan USAID untuk sektor-sektor tersebut. Di kawasan Indo-Pasifik bidang kesehatan yang paling terhambat salah satunya adalah penanganan virus HIV yang mengakibatkan meningkatnya angka penularan. Pada sektor pendidikan, penghentian dana bantuan pendidikan, menyebabkan terhambatnya riset bagi para peneliti dan beasiswa bagi ribuan pelajar. Adapun bagi pengembangan

ekonomi, penghentian pendanaan USAID meningkatkan potensi terhambatnya berbagai proyek pengembangan ekonomi, investasi asing, dan mempersulit upaya pemulihan bagi negara-negara Indo-Pasifik. Dengan tidak adanya dukungan pendanaan dari USAID, ketahanan pangan dan gizi masyarakat kawasan Indo-Pasifik juga terancam karena terhambatnya akses bantuan teknis serta berbagai program gizi. Oleh karena itu, upaya Trump untuk menghilangkan USAID bukan hanya terkait penghentian bantuan dan efisiensi, melainkan menciptakan kekosongan struktural yang berpotensi memperlemah stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menunjukkan tatanan transformasional yang dibangun oleh AS pada akhirnya harus berakhir dan membuat negara-negara harus berjuang sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang selama ini mendapatkan bantuan dari USAID.

Daftar Pustaka

- ADB. (2025, April 9). *ADB Proyeksikan Pertumbuhan Di Asia Dan Pasifik Akan Menurun*. Retrieved from Asian Development Bank: <https://www.adb.org/id/news/adb-sees-growth-declining-asia-and-pacific>
- Burma, U. E. (2024, October 13). *USAID Diversity and Inclusion Scholarship Program*. Retrieved from US Embassy In Burma: <https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/13/2024/10/Diversity-and-Inclusion-Scholarship-Program.pdf>
- Chester, R. (2025, January). *Why USAID?* Retrieved from The Foreign Service Journal: https://afsa.org/sites/default/files/flipping_book/010225/52/

- Commerce, U. D. (n.d.). *Indo-Pacific Economic Framework*. Retrieved from U.S. Department of Commerce: <https://www.commerce.gov/ipef/indo-pacific-economic-framework>
- Crowley, M., & Cameron, C. (2025, February 7). *Judge Freezes Elements of Trump's Plan to Shut Down U.S.A.I.D.* Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/07/us/politics/judge-will-freeze-elements-of-trump-plan-to-shut-down-usaid.html>
- Demirjian, K., & Kavi, a. A. (2025, February 6). *Trump Administration to Lay Off Nearly All of U.S. Aid Agency's Staff*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/06/us/politics/usaid-job-cuts.html>
- Desilver, D. (2025, February 6). *What the data says about U.S. foreign aid*. Retrieved from Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/02/06/what-the-data-says-about-us-foreign-aid/>
- DOGE. (2025, March 23). *The U.S. government was spending about \$600 million per year funding Australian universities*. Retrieved from X: <https://x.com/realdogeusa/status/1903559309037834400>
- Ekvitthayavechnukul, C., & Peck, G. (2025, January 29). *US aid freeze leads to suspension of health care to Myanmar refugees in Thailand*. Retrieved from AP News: <https://apnews.com/article/myanmar-refugees-camps->

foreign-aid-rubio-

b79eeef83a635d2b59208d8b91586b6b

House, T. W. (2025, February 3). *At USAID, Waste and Abuse Runs Deep*. Retrieved from The White House: <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/02/at-usaid-waste-and-abuse-runs-deep/>

IDG. (2025). *USAID Indo-Pacific Opportunity Project (IPOP)*. Retrieved from International Development Group: <https://www.internationaldevelopmentgroup.com/projects/usaid-indo-pacific-opportunity-project/>

JAKARTA, U. E. (2024, February 9). *THE UNITED STATES' ENDURING COMMITMENT TO THE INDO-PACIFIC: INDONESIA*. Retrieved from U.S. EMBASSY & CONSULATES IN INDONESIA: <https://id.usembassy.gov/the-united-states-enduring-commitment-to-the-indo-pacific-indonesia/>

Kingsley, P., & Rasgon, A. (2025, February 7). *U.S.A.I.D. Turmoil Threatens Key Aid Supplies to Gaza, Officials Say*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/07/world/middleeast/usaid-trump-gaza-aid.html?searchResultPosition=1>

Knickmeyer, E., & Whitehurst, L. (2025, February 22). *Judge clears way for Trump administration to pull thousands of USAID staffers off the job*. Retrieved from AP News: <https://apnews.com/article/trump-usaid-foreign-aid-staffing-cuts-lawsuits-d1ec029b4d14c37c25abc5dc07066471>

Krauthammer, C. (1990/1991). The Unipolar Moment. *Foreign Affairs*, 23-33.

- Mazarr, M. J. (2018). *Summary of the Building a Sustainable International Order Project*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Monica, S. K. (2024). PERAN PERTANIAN DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA BERKEMBANG KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK. *PARAHYANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT REVIEW*, 124-135.
- Montague, Z., Crowley, M., & Liptak, A. (2025, February 26). *Chief Justice Allows U.S. to Continue Freeze on Foreign Aid Payments*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/26/us/politics/trump-usaid-foreign-aid.html>
- Nations, U. (2022, July 6). *FAO / FOOD SECURITY 2022 REPORT*. Retrieved from United Nations: <https://media.un.org/unifeed/en/asset/d289/d2899992>
- Nolen, S. (2025, February 6). *Abandoned in the Middle of Clinical Trials, Because of a Trump Order*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/06/health/usaid-clinical-trials-funding-trump.html?searchResultPosition=2>
- O'Rourke, R. (2024, August 26). *U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress*. Retrieved from Congress.gov: <https://www.congress.gov/crs-product/R42784>
- Paul, R. (2025, March 27). *Rohingya refugees in Bangladesh fear aid cuts will deepen crisis*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/rohingya->

refugees-bangladesh-fear-aid-cuts-will-deepen-crisis-2025-03-27/

- Press, A. (2025, February 4). *What USAID does, and why Trump and Musk want to get rid of it*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2025/02/04/politics/what-is-usaid/index.html>
- Psaledakis, D., & Zengerle, P. (2025, February 28). *UN chief warns that US foreign aid cuts make world less safe*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/un-chief-warns-that-us-foreign-aid-cuts-make-world-less-safe-2025-02-28/>
- Report, G. N. (2022). *Global Nutrition Report Stronger 2022: Commitments for Greater Action*. Bristol: Global Nutrition Report. Retrieved from Global Nutrition Report: https://media.globalnutritionreport.org/documents/2022_Global_Nutrition_Report.pdf
- Rigby, J., Peyton, N., & Farge, E. (2025, February 28). *Services to millions of people collapse as USAID cuts contracts worldwide*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/services-collapsing-usaid-cuts-health-contracts-worldwide-2025-02-27/>
- Saul, S. (2025, March 13). *Johns Hopkins to Cut More Than 2,000 Workers Funded by Federal Aid*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/03/13/us/trump-cuts-johns-hopkins-university-layoffs.html>
- Seddon, S. (2025, February 7). *What is USAID and why is Trump poised to 'close it down'?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/articles/clyezjwnx5ko>

- Silva, C. D. (2025, February 4). *What cutting USAID could cost the U.S. — and how China, Russia may benefit*. Retrieved from NBC News: <https://www.nbcnews.com/news/world/donald-trump-elon-musk-usaid-soft-power-china-russia-rcna189756>
- State, U. D. (2011, November 24). *Fact Sheet: Food Security & the U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership*. Retrieved from Relief Web: <https://reliefweb.int/report/indonesia/fact-sheet-food-security-us-indonesia-comprehensive-partnership>
- Tarnoff, C. (2015). *U.S. Agency for International Development (USAID): Background, Operations, and Issues*. Congressional Research Service.
- Toosi, N., Lippman, D., & Gramer, R. (2025, January 27). *Top USAID career staff placed on immediate leave*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.com/news/2025/01/27/top-usaid-career-staff-ordered-leave-00200854>
- USAID. (2025, February 23). *USAID*. Retrieved from USAID: <https://www.usaid.gov>
- WHO. (2025, March 26). *New study highlights the potential impact of funding cuts on the HIV response*. Retrieved from WHO: <https://www.who.int/news/item/26-03-2025-new-study-highlights-the-potential-impact-of-funding-cuts-on-the-hiv-response>
- Walker, A. S., & Lai, K. R. (2025, March 5). *A Timeline of Cuts, Legal Orders and Chaos at U.S.A.I.D.* Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/05/us/politics/usaid-trump-timeline.html>

- Watson, I. (2025, February 4). *Aid workers in Thailand laid off after USAID cuts*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2025/02/12/world/video/usaids-cuts-thailand-myanmar-ldn-digvid>
- Weiland, N., & Nolan, S. (2025, February 3). *What Is U.S.A.I.D., and Why Do Trump and Musk Want to Close It?* Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/02/03/us/politics/usaids-foreign-aid-musk.html?searchResultPosition=22>
- Widianto, S. (2025, February 6). *Indonesia health programmes with USAID on hold, minister says*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-health-programmes-with-usaid-hold-minister-says-2025-02-06/>

Perang Narasi Rusia di Indo-Pasifik: Eksplorasi Peran Rusia dalam Lanskap Indo-Pasifik dan Implikasinya terhadap Kebijakan Keamanan Indonesia

*Radityo Dharmaputra
Ghulam Phasa Pambayung*

Pendahuluan

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, perhatian banyak pihak tertuju pada dinamika antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai dua aktor utama yang bersaing dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga militer. Apalagi, setelah kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS sejak Januari 2025. Arah geopolitik kawasan sepertinya menuju pada perang (dagang) antara keduanya. Namun, di balik sorotan tersebut, Rusia, secara perlahan tapi pasti, memosisikan dirinya sebagai aktor yang memainkan peran penting di ranah keamanan non-tradisional, khususnya melalui strategi perang narasi dan disinformasi. Tulisan ini berargumen bahwa meskipun peran Rusia dalam dinamika kekuatan militer di Indo-Pasifik relatif terbatas, peran aktifnya dalam menyebarkan disinformasi dan membentuk opini publik—khususnya di Indonesia—telah menghadirkan tantangan serius terhadap keamanan manusia. Dengan menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana narasi-narasi pro-Rusia

yang beredar di ruang digital Indonesia berdampak terhadap ketahanan informasi, kohesi sosial, dan kapasitas masyarakat untuk merespons isu-isu krusial seperti pandemi, perubahan iklim, dan demokrasi.

Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat kompetisi geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama antara AS dan Tiongkok. Perang tarif antara AS dan Tiongkok yang menyebabkan kejatuhan beberapa bursa utama di kawasan menjadi salah satu penanda penting konflik ekonomi (Wall Street Journal, 2025). Keputusan Trump untuk menunda sementara tarif ke seluruh negara tapi di saat yang sama meningkatkan tarif pada Tiongkok seakan memaksa negara-negara lain untuk memilih pihak (Giesecke & Waschik, 2025). Tidak hanya di ranah ekonomi, tensi yang meninggi juga terasa di ranah lain. Organisasi The Quad (yang beranggotakan AS, Jepang, Australia, dan India) misalnya, menjadi semakin menemukan artinya setelah kunjungan PM India Narendra Modi ke AS di bulan Februari 2025 (Bhatia, 2025; Roy, 2025). Di saat yang sama, negara-negara Asia Tenggara terjebak pada perang dagang antara AS-Tiongkok dan harus menentukan arah bersama, atau terpaksa berjalan sendiri-sendiri yang tentu akan melemahkan sentralitas ASEAN (Nguyen, 2025).

Di tengah intensitas yang meningkat ini, Rusia—meskipun bukan aktor utama dalam hal proyeksi kekuatan militer di kawasan—secara aktif memainkan peran penting melalui strategi informasi dan perang narasi yang ditujukan untuk membentuk persepsi publik di negara-negara seperti Indonesia. Rusia menempatkan dirinya sebagai “penantang tatanan global Barat” dan menggunakan strategi komunikasi strategis (*strategic messaging*) untuk menyebarkan narasi anti-

Barat, mendiskreditkan lembaga-lembaga demokratis, serta menormalisasi bentuk-bentuk otoritarianisme. Di Indonesia, strategi ini diwujudkan melalui diseminasi disinformasi di media sosial, media daring, dan kanal-kanal informasi alternatif yang menyasar isu-isu seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan luar negeri Barat (terutama terkait Palestina), serta nilai-nilai liberal. Meskipun terlihat sebagai bagian dari dinamika komunikasi global, fenomena ini memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan manusia di Indonesia.

Konsep keamanan manusia (*human security*) menawarkan lensa yang lebih luas dalam memahami ancaman terhadap masyarakat—tidak hanya terbatas pada invasi militer atau serangan teroris, tetapi juga mencakup aspek informasi, politik, lingkungan, kesehatan, dan sosial (UNDP, 1994). Yang menarik dari perluasan makna keamanan ini adalah, ancaman terhadap keamanan sosial dan personal bisa jadi datang dari situasi politik domestik, bukan saja dari faktor eksternal. Ketika masyarakat dibanjiri oleh narasi yang menyesatkan, kepercayaan terhadap institusi demokratis melemah, polarisasi sosial meningkat, dan kesadaran terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, dan hak digital menjadi kabur. Dalam konteks ini, disinformasi bukan sekadar persoalan komunikasi belaka, melainkan persoalan keamanan yang nyata dampaknya bagi manusia. Situasi saat pandemi Covid-19 sudah menunjukkan bahwa narasi menyesatkan bisa berdampak langsung pada aspek keamanan manusia (Gruzd & Mai, 2020; Clemente-Suárez et al., 2022).

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan aktor penting dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), berada dalam posisi yang kompleks

terutama dalam kaitannya dengan Rusia. Di satu sisi, Indonesia berupaya mempertahankan netralitas strategis dan memperkuat otonomi luar negeri (ANTARA News, 2022). Namun di sisi lain, ketidaktegasan posisi terhadap invasi Rusia ke Ukraina, serta maraknya narasi pro-Rusia di ruang publik Indonesia, menunjukkan adanya celah yang potensial dimanfaatkan oleh aktor eksternal (Dharmaputra 2023; Wardhani & Dharmaputra, 2024). Hal ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan informasi dan keamanan manusia di Indonesia.

Tulisan ini berargumen bahwa Rusia, melalui strategi perang narasi dan disinformasi di ruang digital Indonesia, menghadirkan ancaman non-tradisional terhadap keamanan manusia di era Indo-Pasifik. Ancaman ini tidak langsung, bersifat asimetris, dan sulit dideteksi, namun dampaknya dapat melemahkan fondasi sosial-politik Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana narasi-narasi tersebut bekerja, siapa yang menyebarkannya, serta bagaimana dampaknya terhadap struktur keamanan dalam negeri.

Untuk itu, tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian utama. Bagian pertama menguraikan posisi strategis Rusia di kawasan Indo-Pasifik, termasuk hubungannya dengan Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN, serta bagaimana Rusia memosisikan diri sebagai aktor normatif dalam tatanan dunia saat ini. Bagian kedua merupakan studi kasus yang menelaah pola dan konten kampanye disinformasi Rusia di Indonesia, khususnya dalam konteks perang Ukraina dan diskursus global anti-Barat. Bagian ketiga membedah dampak disinformasi terhadap dimensi-dimensi keamanan manusia, mulai dari keamanan informasi hingga keamanan politik dan lingkungan.

Bagian keempat membahas implikasi kebijakan dan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat ketahanan digital serta membangun pendekatan keamanan yang lebih holistik. Akhirnya, bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk menghadapi tantangan disinformasi di masa depan.

Dengan mengangkat kasus Indonesia sebagai studi kasus dalam dinamika Indo-Pasifik, tulisan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemahaman tentang strategi politik luar negeri Rusia di Asia, tetapi juga mendorong perlunya redefinisi keamanan dalam lanskap geopolitik kontemporer. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, menjaga keamanan manusia berarti juga menjaga integritas informasi, ketahanan sosial, dan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang benar.

Postur Strategis Rusia di Indo-Pasifik

Meskipun Indo-Pasifik sering dipahami sebagai arena persaingan antara AS dan Tiongkok, Rusia juga memainkan peran penting dalam membentuk tatanan kawasan, meski dengan pendekatan dan kapasitas yang berbeda. Berbeda dengan dua kekuatan utama tersebut, Rusia tidak memiliki kehadiran militer maupun ekonomi yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik, serta tidak mampu memberikan tawaran investasi pada negara-negara di kawasan (Grossman, 2024). Namun demikian, Rusia tetap berusaha mempertahankan relevansi geopolitiknya melalui strategi kemitraan strategis, kerja sama militer terbatas, dan—yang semakin menonjol—perang informasi dan diplomasi naratif.

Perlu dicatat juga bahwa dalam Foreign Policy Concept 2023, pemerintah Rusia menghindari penggunaan kata-kata Indo-Pasifik, karena merasa bahwa istilah Indo-Pasifik merupakan istilah dari AS untuk melawan Tiongkok dan menggunakan India sebagai alat menyeimbangkan pengaruh Tiongkok (Likachev, 2024). Mereka lebih memilih menggunakan istilah lama Asia-Pasifik karena dianggap lebih netral. Hal ini sebetulnya sudah menunjukkan bahwa informasi dan narasi (serta penggunaan istilah tertentu dalam kondisi tertentu) menjadi salah satu fokus utama Rusia di kawasan.

Kemitraan strategis Rusia dengan Tiongkok merupakan pilar utama pendekatan Rusia terhadap kawasan Indo-Pasifik. Sejak krisis Ukraina pada tahun 2014 yang kemudian berlanjut menjadi invasi skala-penuh Rusia ke wilayah kedaulatan Ukraina di tahun 2022 dan meningkatnya isolasi Rusia dari Barat, hubungan Rusia–Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, baik di bidang ekonomi, energi, maupun keamanan (Dharmaputra, 2021). Latihan militer bersama di kawasan Pasifik, koordinasi dalam kerangka Shanghai Cooperation Organization (SCO), serta posisi bersama dalam menentang dominasi Barat maupun tatanan dunia liberal (*liberal world order*) menunjukkan bahwa keduanya berbagi kepentingan strategis dalam menantang dominasi Barat di kawasan. Belum lagi, keduanya adalah negara utama dalam kelompok BRICS sejak 2009. Bahkan relasi Rusia-Tiongkok sudah berubah dari yang awalnya hanya “*axis of convenience*” (Lo, 2008) dan “*marriage of convenience*” (Lubina, 2017) menjadi “*no limit partnership*” yang disampaikan Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping di Beijing, bulan Februari 2022, hanya tiga minggu sebelum serangan Rusia ke Ukraina.

Di saat yang sama, untuk menyeimbangkan dominasi Tiongkok di level bilateral, Rusia juga menjaga hubungan dengan negara-negara Asia lainnya, terutama India, Vietnam, dan Myanmar. Di India, Rusia tetap menjadi pemasok utama persenjataan dan teknologi militer, meskipun India juga memperluas kerja samanya dengan AS dan negara-negara The Quad (Kumar, 2024). Di Asia Tenggara, kecenderungan pendekatan Rusia bersifat pragmatis dan oportunistik, dengan fokus pada membangun citra baik di kawasan serta menunjukkan bahwa Rusia memiliki opsi selain Tiongkok (Tsvetov, 2016). Rusia berusaha memperkuat kerja sama militer, energi, dan pendidikan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, melalui forum-forum seperti East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Bahkan, sejak 2005, Rusia dan ASEAN beberapa kali menyelenggarakan ASEAN-Russia Summit (2005 di Kuala Lumpur, 2010 di Hanoi, 2018 di Singapore, 2021 melalui video conference). Di tahun 2018, relasi ASEAN-Rusia meningkat menjadi kemitraan strategis, yang kemudian diperingati dengan cukup meriah di tahun 2023 (Zagaynov, 2023). Sesudah invasi Rusia ke Ukraina dan semakin terisolasinya Rusia dari Barat, Rusia semakin mendekat ke negara-negara ASEAN, baik secara militer maupun ekonomi (Avdalian, 2025).

Walaupun begitu, Rusia tetap bukanlah pemain utama di kawasan Indo-Pasifik (Rumer, Sokolsky, & Vladicic, 2020). Kesamaan posisi dan kondisi saling membutuhkan belum terlalu tinggi di antara Rusia dan negara-negara Asia Tenggara, misalnya (Korolev, 2024). Dalam konteks kontestasi AS-Tiongkok, Rusia saat ini justru seakan tampil sebagai mitra junior dari Tiongkok, bahkan di kawasan Asia Tengah

(Piechowski, 2024). Invasi Rusia ke Ukraina makin menyulitkan posisi Rusia untuk menjadi alternatif kekuatan besar di Asia. Selain karena sumber daya serta fokus mereka yang tertuju ke Eropa, tekanan dari AS dan Eropa juga membuat negara-negara di kawasan bermain aman dengan pola *hedging*.

Dalam konteks ini, Rusia cukup cerdas dengan memosisikan dirinya bukan sebagai kekuatan hegemonik, tetapi sebagai alternatif terhadap “hegemoni” Barat, dengan mengusung narasi multipolaritas, kedaulatan nasional, dan penolakan terhadap nilai-nilai liberal universal. Narasi ini sering kali dikemas dalam bingkai retorik yang menarik bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sensitif terhadap campur tangan asing dan berupaya mempertahankan prinsip non-intervensi. Belum lagi, negara-negara ini memiliki nostalgia masa lalu dengan Uni Soviet, terutama karena Soviet adalah rekan mereka dalam menentang dominasi Barat waktu itu. Di sisi ini, Rusia juga berperan sebagai “*spoiler*” kekuatan Barat (terutama AS) di kawasan, melalui peningkatan hubungan baik dengan Tiongkok dan Korea Utara (Muraviev, 2018; Grossman, 2024). Bahkan, warga Tiongkok dan Korea Utara juga terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina (Sokolin, 2025).

Yang menjadi menarik adalah bagaimana Rusia, dengan keterbatasan sumber daya dan akses ekonomi di Indo-Pasifik, menggunakan diplomasi naratif dan operasi informasi sebagai alat kebijakan luar negeri. Di kawasan lain seperti Amerika Latin, Eropa Timur, maupun beberapa negara bekas jajahan Soviet, Rusia memakai badan *Rossotrudnichestvo* untuk menanamkan pengaruhnya, memanfaatkan diaspora dan program-program pertukaran budaya (Mäkinen, 2016; Andriyenko, 2019). Di Indo Pasifik, media yang dikelola negara

seperti RT, Sputnik, serta berbagai saluran digital berbahasa lokal (seperti Russia Beyond di Indonesia) justru menjadi instrumen utama dalam menyebarkan wacana alternatif terhadap narasi Barat. Melalui pendekatan ini, Rusia berusaha menanamkan keraguan terhadap legitimasi demokrasi liberal, menyebarkan teori konspirasi, serta mendistorsi fakta geopolitik.

Dengan kata lain, kehadiran Rusia di Indo-Pasifik bukan ditentukan oleh jumlah kapal perang, persenjataan, aliansi militer, maupun diaspora, melainkan oleh keahliannya dalam memainkan arena informasi. Bagi negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki ekosistem digital yang besar namun rentan terhadap disinformasi, pendekatan Rusia ini dapat menghasilkan dampak yang signifikan—terutama ketika narasi yang disebarkan mulai membentuk opini publik dan mempengaruhi arah kebijakan domestik.

Studi Kasus: Kampanye Disinformasi Rusia di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan penetrasi internet yang tinggi dan ekosistem digital yang sangat dinamis (Wafa, 2025). Namun, kondisi ini juga menjadikannya lahan subur bagi penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik, terutama melalui media sosial dan kanal-kanal daring alternatif (Sinaga, 2023). Dalam konteks ini, Rusia melihat Indonesia sebagai medan potensial untuk memperluas pengaruh naratifnya, terutama dalam membentuk persepsi publik mengenai isu-isu global seperti invasi Rusia ke Ukraina serta posisi Barat dalam politik global.

Strategi disinformasi Rusia bukanlah pendekatan yang baru, melainkan bagian dari kebijakan luar negeri berbasis “konfrontasi informasi” (Grisé et al., 2022). Konsep ini telah menjadi bagian dari doktrin militer Rusia sejak awal 2000-an dan digunakan secara aktif dalam invasi ke Georgia (2008), aneksasi Krimea (2014), serta pemilu di berbagai negara Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengganggu konsensus demokratis, menciptakan kebingungan informasi, serta membentuk realitas alternatif melalui narasi yang dikontrol secara sistematis.

Di Indonesia, disinformasi pro-Rusia muncul dalam berbagai bentuk. Konten-konten semacam “NATO memprovokasi Rusia,” “Ukraina penuh dengan Nazi,” atau “Zelenskyy adalah boneka Barat” tersebar luas melalui Telegram, Facebook, YouTube, dan bahkan TikTok (Mazrieva, 2022; Heychael, 2023; Fajri & Farmita, 2023). Banyak dari narasi ini diterjemahkan atau disebarluaskan oleh akun-akun lokal, baik oleh simpatisan ideologis maupun oleh aktor bayaran yang menjadi bagian dari jaringan penyebaran konten (Idris, 2023; Zein, 2024). Beberapa situs alternatif berbahasa Indonesia juga mempublikasikan ulang artikel-artikel dari media Rusia seperti Sputnik dan RT, tanpa verifikasi atau konteks yang memadai. Belum lagi, ada indikasi peran dari pasukan *troll* Kremlin yang ikut memanfaatkan ekosistem media di Indonesia dengan turut berkomentar dalam upaya mengubah serta menguatkan pandangan pro-Rusia dari orang-orang Indonesia (Hanifan, 2023).

Selain narasi pro-Rusia, strategi ini juga berfungsi untuk melemahkan posisi moral Barat di mata publik Indonesia. Misalnya, dengan menekankan standar ganda kebijakan luar

negeri Amerika Serikat, mengangkat sejarah intervensi militer di Timur Tengah, atau menyebarkan teori konspirasi mengenai elite global. Tujuannya bukan untuk membuat publik menjadi pro-Rusia dalam arti ideologis, tetapi untuk menciptakan sikap skeptis terhadap nilai-nilai demokrasi liberal dan melemahkan daya tarik “*rules-based order*” (Zabolotsky, 2024).

Yang lebih mengkhawatirkan, disinformasi ini sering kali menyatu dengan dinamika lokal. Di Indonesia, narasi anti-Barat dapat dengan mudah terhubung dengan retorika anti-kolonial, sentimen nasionalisme digital, atau bahkan narasi keagamaan. Sebagai contoh, klaim bahwa Rusia “melindungi nilai-nilai tradisional dan agama” dapat beresonansi dengan audiens yang memiliki pandangan konservatif (Zein, 2023). Dengan demikian, disinformasi menjadi efektif karena mampu beradaptasi dengan konteks lokal, bukan sekadar karena isi pesannya.

Data dari lembaga pemantau media dan inisiatif cek fakta menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah konten pro-Rusia yang tersebar sejak Februari 2022. Misalnya, dalam beberapa bulan pertama invasi Rusia ke Ukraina, akun-akun tertentu di Telegram dan Facebook memperlihatkan pola penyebaran yang terkoordinasi, dengan tagar seragam dan penggunaan gambar atau video yang dipilih secara strategis untuk memancing emosi. Aktivitas semacam ini tidak selalu dapat dikaitkan langsung dengan pemerintah Rusia, namun banyak di antaranya menunjukkan karakteristik operasi pengaruh digital yang sudah dikenal dalam konteks “*grey zone warfare*” (Atlantic Council, 2022).

Dalam beberapa kasus, narasi yang dibawa Rusia juga diterima oleh sebagian aktor domestik Indonesia—baik dari

kelompok ultra-nasionalis, konservatif, maupun elemen yang memiliki sentimen anti-Barat (Dharmaputra, 2022). Aliansi ideologis ini memperkuat jangkauan disinformasi dan menciptakan ekosistem yang memperkuat narasi tandingan terhadap media arus utama dan lembaga internasional. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya literasi media dan kebijakan luar negeri Indonesia yang berbasis prinsip bebas dan aktif.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa disinformasi bukan hanya soal konten palsu atau hoaks, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mempengaruhi persepsi dan sikap politik masyarakat. Dalam konteks Indo-Pasifik, di mana perebutan pengaruh global semakin intens, strategi informasi semacam ini memiliki daya rusak yang besar terhadap ketahanan sosial-politik dan keamanan manusia, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Dampak pada Keamanan Manusia di Indonesia

Konsep keamanan manusia (*human security*) menempatkan individu, bukan negara, sebagai objek utama perlindungan, dan mencakup berbagai dimensi: keamanan informasi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan (UNDP, 1994). Dalam konteks ini, disinformasi pro-Rusia yang berkembang di Indonesia bukan hanya tantangan komunikasi, melainkan ancaman sistemik terhadap kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan rasional, membangun kepercayaan sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Keamanan Informasi dan Literasi Publik

Disinformasi yang sistematis mengikis kemampuan publik dalam membedakan informasi sah dari yang manipulatif. Di Indonesia, fenomena ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi media dan dominasi algoritma media sosial yang lebih mengedepankan konten viral daripada substansi yang akurat (Duan & Qutayan, 2024; Kompas, 2024). Ketika narasi-narasi pro-Rusia—yang penuh dengan manipulasi, teori konspirasi, dan simbolisme ideologis—menjadi bagian dari konsumsi harian masyarakat, maka yang terancam bukan hanya pemahaman atas konflik Ukraina, tetapi juga kapasitas masyarakat untuk memahami realitas secara umum. Ketika masyarakat terbelah dalam persepsi tentang kebenaran, kemampuan kolektif untuk menghadapi krisis bersama—seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial—menjadi rapuh. Disinformasi menciptakan “kebisingan epistemik” yang melunturkan kepercayaan publik terhadap “institusi produsen pengetahuan”, seperti pakar dan akademisi (Abiri & Buchheim, 2022).

Keamanan Politik dan Polarisasi Sosial

Disinformasi Rusia dapat menjadi pupuk bagi polarisasi politik oleh elite maupun masyarakat yang beresonansi dengan nilai-nilai yang dibawa narasi-narasi tersebut. Contohnya, sebagian pihak yang menyebarkan narasi pro-Rusia juga cenderung memiliki narasi anti-liberalisme dan anti-AS (Dharmaputra, 2023). Penelitian dari Zein (2023) juga menunjukkan kecenderungan kelompok ini untuk percaya teori konspirasi serta anti-demokrasi dalam konteks lokal.

Persoalan lanjutannya, narasi disinformasi sering kali bersifat provokatif dan emosional—memanfaatkan identitas, agama, atau nasionalisme sebagai alat mobilisasi emosi (Martel et al., 2020; Jasper & Zhelnina, 2022). Di Indonesia, narasi-narasi ini mampu diserap oleh kelompok keagamaan atau identitas tertentu yang sudah memiliki sikap skeptis terhadap Barat, media arus utama, atau pluralisme sosial. Hasilnya adalah polarisasi sosial yang meningkat. Diskusi tentang isu internasional menjadi ladang konflik domestik, di mana sikap pro-Ukraina bisa dianggap sebagai “antek Barat”, sementara sikap pro-Rusia dijustifikasi sebagai bentuk anti-kolonialisme atau nasionalisme.

Ketahanan Siber dan Keamanan Ekonomi

Selain dampak kontennya, strategi disinformasi Rusia juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan digital dan ketahanan siber Indonesia. Banyak konten disinformasi disebarkan melalui akun-akun palsu, bot, atau jaringan yang terkoordinasi secara tersembunyi. Aktivitas ini menandai keberadaan operasi pengaruh (*influence operations*) yang bukan sekadar masalah domestik, tetapi juga berkaitan dengan aktor eksternal, atau lebih dikenal dengan istilah FIMI (*foreign information manipulation and interference*) (EEAS, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan populasi digital yang besar namun perlindungan data dan sistem siber yang masih lemah, menjadi target yang rentan (CNBC Indonesia, 2023). Tidak ada jaminan bahwa serangan informasi ini akan berhenti di isu Ukraina—potensi manipulasi informasi di pemilu mendatang, isu Papua, atau konflik identitas sangat terbuka. Belum lagi, kedekatan rezim pemerintahan Indonesia saat ini

dengan Tiongkok dan Rusia bisa jadi justru membuka jalan bagi model represi digital yang sama dengan cara Tiongkok serta Rusia memproteksi keberlanjutan rezim.

Narasi-narasi disinformasi juga dapat mengganggu kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi dan arah global Indonesia. Misalnya, jika masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi Barat, multilateralisme, atau kerja sama global, maka dukungan terhadap kebijakan perdagangan bebas, kerja sama iklim, atau investasi internasional juga bisa terganggu (CNBC Indonesia, 2023). Dengan begitu, pemerintah tidak punya insentif untuk memperbaiki relasi ekonomi ataupun perdagangan dengan negara-negara Barat, yang merupakan adalah importir produk-produk Indonesia. Dengan demikian, ancaman disinformasi Rusia tidak dapat dipandang sebagai fenomena pinggiran dalam kebijakan luar negeri atau keamanan nasional. Ia menembus berbagai dimensi kehidupan masyarakat, merusak kepercayaan sosial, dan menimbulkan tantangan sistemik terhadap keamanan manusia secara keseluruhan. Respons terhadap fenomena ini harus melampaui pendekatan penegakan hukum atau pemblokiran teknis, dan masuk ke ranah kebijakan literasi, ketahanan sosial, serta diplomasi informasi.

Implikasi Normatif dan Opsi Kebijakan bagi Indonesia

Ancaman disinformasi dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik, khususnya yang berasal dari aktor negara seperti Rusia, menuntut respons kebijakan yang lebih strategis dari Indonesia. Dalam situasi saat ini, di mana arsitektur keamanan kawasan semakin kompleks dan kompetisi informasi menjadi instrumen pencarian kekuasaan, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif, berbasis nilai-nilai

demokrasi dan kepentingan manusia Indonesia untuk jangka panjang.

1. Perkuat Ketahanan Informasi sebagai Pilar Keamanan Manusia di Level Nasional

Indonesia perlu mengakui bahwa keamanan informasi merupakan bagian integral dari keamanan nasional dan manusia. Kebijakan keamanan saat ini cenderung memisahkan ancaman militer dari ancaman digital, padahal keduanya sering kali saling terkait dalam strategi hibrida seperti yang diterapkan Rusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memasukkan aspek ketahanan informasi dan integritas informasi dalam rencana pertahanan kita, terutama setelah revisi Undang-Undang TNI mengamanatkan perlindungan serta keamanan siber pada tentara.

Langkah yang bisa diambil mencakup penguatan sistem deteksi dini terhadap operasi pengaruh asing, pembangunan pusat analisis konten digital lintas kementerian dan lembaga, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membendung penyebaran disinformasi. Yang juga perlu digarisbawahi adalah perlu adanya doktrin pertahanan siber yang jelas dari tentara dan target yang jelas yaitu perlindungan hak asasi manusia serta pengutamaan keamanan manusia. Jangan sampai pertahanan siber justru digunakan sebagaimana Rusia dan Tiongkok menggunakan sistem sibernya untuk merepresi warganya sendiri dengan dalih keamanan nasional.

2. Bangun Literasi Digital Berbasis Nalar Kritis dan Kontekstual

Program literasi digital yang ada saat ini umumnya bersifat teknis dan normatif (misalnya soal “etika bermedia sosial”), namun belum menyentuh aspek penting seperti analisis wacana, identifikasi narasi, dan pemahaman geopolitik kontemporer. Mengingat sifat disinformasi Rusia yang sangat naratif dan ideologis, maka diperlukan literasi digital yang menggabungkan kemampuan berpikir kritis, analisis media, dan kesadaran politik global.

Republik Ceko dan Estonia dapat menjadi contoh praktik baik dalam melakukan hal ini dengan menginstitusionalisasikan usaha-usaha kampanye literasi digital melawan disinformasi (Robbins, 2020). Pemerintah bersama universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia dapat mengembangkan kurikulum mengenai “navigasi informasi dalam era geopolitik digital”, terutama untuk kalangan muda dan mahasiswa. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas kreator konten independen bisa dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

3. Perkuat Diplomasi Informasi Indonesia di Kawasan

Selain bertahan dari disinformasi, Indonesia juga perlu aktif dalam menyebarkan narasi alternatif berbasis prinsip-prinsip multilateralisme dan keadilan di ranah global. Diplomasi informasi ini bisa diwujudkan melalui peningkatan kapasitas diplomasi publik, khususnya di Kementerian Luar Negeri dan lembaga kebudayaan seperti Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri. Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi disinformasi, misalnya melalui

ASEAN Digital Ministers' Meeting, serta mendorong pembentukan "ASEAN Task Force on Foreign Disinformation" yang dapat menjadi wadah pertukaran data, analisis, dan strategi bersama. Indonesia juga bisa bekerjasama dengan negara-negara demokratis lain di kawasan, seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, untuk bersama-sama menjaga kebebasan informasi.

Simpulan

Dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya memunculkan tantangan tradisional dalam bentuk persaingan kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga ancaman non-tradisional yang berdampak langsung pada keamanan manusia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, keterlibatan Rusia, baik melalui kemitraan strategis dengan Tiongkok maupun melalui penyebaran disinformasi, memperlihatkan bahwa kompetisi global kini juga berlangsung di ranah informasi dan persepsi publik.

Tulisan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak memposisikan Indonesia sebagai sekadar mitra bilateral, tetapi juga sebagai target strategis dalam operasi pengaruh globalnya. Melalui narasi disinformasi yang terstruktur, adaptif, dan sering kali beresonansi dengan dinamika lokal, Rusia berupaya membentuk persepsi publik Indonesia mengenai konflik global, nilai-nilai demokrasi, dan posisi Barat. Strategi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama, menciptakan polarisasi sosial, serta membatasi ruang deliberasi publik yang sehat—semua ini merupakan komponen penting dari keamanan manusia.

Dampaknya terhadap Indonesia sangat nyata. Disinformasi bukan hanya mengancam kualitas demokrasi, tetapi juga menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi krisis global, memperlemah kohesi sosial, dan membingkai kebijakan luar negeri Indonesia dalam cara yang dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, respon terhadap tantangan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis melalui *fact-checking* atau regulasi platform digital. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup literasi digital, diplomasi informasi, dan ketahanan sosial berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

- Abiri, G., & Buchheim, J. (2022). Beyond true and false: Fake news and the digital epistemic divide. *Michigan Technology Law Review*, 29, 59. <https://doi.org/10.36645/mtlr.29.1.beyond>.
- Andriyenko, O. (2019). Rossotrudnichestvo as an instrument of soft power of the Russian Federation. *Innovative Solutions in Modern Science*, 5 (32), 56-64. [https://doi.org/10.26886/2414-634X.5\(32\)2019.4](https://doi.org/10.26886/2414-634X.5(32)2019.4).
- ANTARA News. (2022, April 22). Indonesia bersikap netral dalam konflik Rusia-Ukraina: KSP. *Kantor Staf Presiden*. <https://en.antaranews.com/news/226421/indonesia-stance-neutral-on-russia-ukraine-conflict-ksp>
- Atlantic Council. (2022, February 23). Today's wars are fought in the 'gray zone.' Here's everything you need to know about it. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/todays-wars-are-fought-in-the-gray-zone-heres-everything-you-need-to-know-about-it/>.

- Avdalian, E. (2025, February 28). Russia's ASEAN embrace. *The Interpreter*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/russia-s-asean-embrace>.
- Bhatia, R. (2025b, February 3). The Quad is here to stay. *WION*. <https://www.wionews.com/opinions-blogs/the-quad-is-here-to-stay-761674>
- Clemente-Suárez, V. J., Navarro-Jiménez, E., Simón-Sanjurjo, J. A., Beltran-Velasco, A. I., Laborde-Cárdenas, C. C., Benitez-Agudelo, J. C., Bustamante-Sánchez, Á., & Tornero-Aguilera, J. F. (2022). Mis-Dis Information in COVID-19 Health Crisis: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5321. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095321>
- CNBC Indonesia (2023, May 30). Keamanan siber RI lemah, bos Lemhannas ungkap faktanya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230530111131-8-441711/keamanan-siber-ri-lemah-bos-lemhanas-ungkap-faktanya>.
- Dharmaputra, R. (2021). Limited at best? Changing discourses on China in Russia's identity structure before and after the 2014 crisis. *Eurasian Geography and Economics*, 62(5-6), 607-633. <https://doi.org/10.1080/15387216.2021.1944248>.
- Dharmaputra, R. (2022). Understanding Indonesia's response to Russia's war in Ukraine: A preliminary analysis of the discursive landscape. *Journal of Global Strategic Studies*, 2(1), 115-128. <https://doi.org/10.36859/jgss.v2i1.1057>

- Dharmaputra, R. (2023). Non-Western responses to Russia's war in Ukraine: Learning from Indonesia. *Journal of Regional Security*, 18(1), 59-68. <https://doi.org/10.5937/jrs18-41779>
- Duan, Z., & Qutayan, S. M. S. B. (2024). The dynamics of viral spread and its cultural implications in the digital age. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 24(1), 147-164. <https://doi.org/10.12738/jestp.2024.1.012>.
- European External Action Service. (2025, March 19). 3rd EEAS report on foreign information manipulation and interference threats. https://www.eeas.europa.eu/eeas/3rd-eeas-report-foreign-information-manipulation-and-interference-threats-0_en.
- Fajri, D. A. & Farmita, A. R. (2023, March 17). Peran media dalam pemberitaan perang Rusia-Ukraina: Ada 7 kategori hoaks. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/peran-media-dalam-pemberitaan-perang-rusia-ukraina-ada-7-kategori-hoaks-208105>.
- Giesecke, J. & Waschik, R. (2025, April 10). This chart explains why Trump backflipped on tariffs. The economic damage would have been huge. *The Conversation*. <https://theconversation.com/this-chart-explains-why-trump-backflipped-on-tariffs-the-economic-damage-would-have-been-huge-253632>.
- Grisé, M. et al. (2022). Rivalry in the Information Sphere: Russian Conceptions of Information Confrontation. RAND Research Report. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA198-8.html.
- Grossman, D. (2024, July 9). Russia Is a Strategic Spoiler in the Indo-Pacific. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com>

- /2024/07/09/russia-india-putin-modi-indo-pacific-china-north-korea-geopolitics/.
- Gruzd, A. & Mai, P. (2020, April 22). Conspiracy theorists are falsely claiming that the coronavirus pandemic is an elaborate hoax. *The Conversation*. <https://theconversation.com/conspiracy-theorists-are-falsely-claiming-that-the-coronavirus-pandemic-is-an-elaborate-hoax-135985>.
- Hanifan, A. F. (2025, April 10). Dari lokal ke global: Simfoni media dalam orkestra narasi Rusia. *Narasi TV*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/dari-lokal-ke-global-simfoni-media-dalam-orkestra-narasi-rusia>
- Heychael, M. (2023, December 6). Esai: Media dan disinformasi. *Remotivi*. <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/852>
- Idris, I. (2023, March 30). Bagaimana content creator dan media massa turut menyebarkan disinformasi tentang Rusia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bagaimana-content-creator-dan-media-massa-turut-menyebarkan-disinformasi-tentang-rusia-202169>.
- Jasper, J., & Zhelnina, A. (2022). Identity, Emotions, and Political Participation. In *The Oxford Handbook of Political Participation* (pp. 652-668). Oxford University Press.
- Kompas. (2024, September 10). Skor indeks masyarakat digital Indonesia tahun 2024 mencapai 43,34. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/10/skor-indeks-masyarakat-digital-indonesia-tahun-2024-mencapai-4334>

- Korolev, A. (2024). Russia-ASEAN relations: A strategic partnership in the making. *Russia in Global Affairs*. <https://eng.globalaffairs.ru/articles/russia-asean-relations-korolev/>
- Kumar, S. (2024, August 31). Modi strikes a tight balance between Russia and the United States. *East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2024/08/31/modi-strikes-a-tight-balance-between-russia-and-the-united-states/>.
- Likachev, K. (2024, September 19). Russia's Indo-Pacific conundrum. *Raisina Debates*. <https://www.orfonline.org/expert-speak/russia-s-indo-pacific-conundrum>.
- Lo, B. (2008). *Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Lubina, M. (2017). *Russia and China: A Political Marriage of Convenience – Stable and Successful*. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers.
- Mäkinen, S. M. (2016). Russia as an alternative model. Geopolitical representations and Russia's public diplomacy – the case of Rossotrudnichestvo. In M. Suslov, & M. Bassin (Eds.), *Eurasia 2.0 : Russian Geopolitics in the Age of New Media* (pp. 101-121). Rowman and Littlefield Publisher.
- Martel, C., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2020). Reliance on emotion promotes belief in fake news. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 5 (47), 1-20. <https://doi.org/10.1186/s41235-020-00252-3>.
- Mazrieva, E. (2022, April 12). Laporan: Pro-Rusia diminati di Indonesia, pertimbangan bisnis atau keberhasilan

- propaganda Rusia? VOA Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/laporan-pro-rusia-diminati-di-indonesia-pertimbangan-bisnis-atau-keberhasilan-propaganda-rusia-/6524966.html>.
- Muraviev, A. (2018, February 19). Russia: Not so much a re-rising superpower as a skilled strategic spoiler. *The Conversation*. <https://theconversation.com/russia-not-so-much-a-re-rising-superpower-as-a-skilled-strategic-spoiler-90916>.
- Nguyen, H. H. (2025, April 8). Parsing ASEAN's Response to President Trump's 'Reciprocal' Tariffs. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2025/04/parsing-aseans-response-to-president-trumps-reciprocal-tariffs/>.
- Piechowski, A. (2024, July 10). Widening inequality between Russia and China on display at SCO summit. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/07/widening-inequality-between-russia-and-china-on-display-at-sco-summit/>.
- Rumer, E., Sokolsky, R., & Vladicic, A. (2020). *Russia in the Asia-Pacific: Less Than Meets the Eye*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Robbins, J. (2020, September 23). Countering Russian Disinformation. *CSIS*. <https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/countering-russian-disinformation>.
- Roy, S. (2025, February 14). Modi-Trump meeting: India, US announce plans for fresh Quad initiatives, launch bilateral strategic venture. *The Indian Express*. <https://indianexpress.com/article/india/modi-trump-quad-initiatives-indian-ocean-strategic-venture-9835744/>.

- Sinaga, T. M. (2023, November 7). Media Sosial Mempercepat Penyebaran Informasi Palsu. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/07/media-sosial-mempercepat-penyebaran-informasi-palsu>.
- Sokolin, A. (2025, April 9). Chinese soldiers join North Korean, Russian troops in war against Ukraine: Kyiv. *NK News*. <https://www.nknews.org/2025/04/chinese-soldiers-join-north-korean-russian-troops-in-war-against-ukraine-kyiv/>
- Tsvetov, A. (2016). After Crimea: Southeast Asia in Russia's Foreign Policy Narrative. *Contemporary Southeast Asia*, 38(1), 55–80. <http://www.jstor.org/stable/24916595>
- UNDP. 1994. *Human Development Report*. UN.
- Wafa, I. (2025, January 22). Tingkat penetrasi internet di Indonesia konsisten meningkat. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-penetrasi-internet-di-indonesia-konsisten-meningkat-HCq1y>
- Wall Street Journal. (2025, April 8). Markets Swing Wildly as Trump Holds His Ground on Tariff Plan. <https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-trump-tariffs-trade-war-04-07-25>.
- Wardhani, B. and Dharmaputra, R. (2024). Understanding Indonesia's Ambivalent Stance in the Russia-Ukraine War: Tension between Sovereignty Norms and Familial Approach. *Contemporary Security Policy*, 45(4), 627-642. <https://doi.org/10.1080/13523260.2024.2397926>.
- Zabolotsky, B. P. (2024, August 15). Dynamics of Dissent: The Western 'Rules-Based Order' and the Quest of the Global South. *Valdai Club Opinion*.

<https://valdaiclub.com/a/highlights/dynamics-of-dissent-the-western-rules-based-order/>.

Zagaynov, E. (2023, November 14). ASEAN-Russia: Strengthening ties and exploring new horizons. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/11/14/asean-russia-strengthening-ties-and-exploring-new-horizons.html>.

Zein, R. A. (2024, February 24). 2 tahun perang di Ukraina, disinformasi agama dan retorika antisemit menyelubungi narasi pro-Rusia di Indonesia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/2-tahun-perang-di-ukraina-disinformasi-agama-dan-retorika-antisemit-menyelubungi-narasi-pro-rusia-di-indonesia-224256>.

Quo Vadis Poros Maritim Dunia dalam Menavigasi Ketegangan Geopolitik Indo-Pasifik: Dilema Keamanan Laut Cina Selatan

Probo Darono Yakti

Moch. Yunus

Joko Susanto

Pendahuluan

Pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto menjadi satu batu pijakan penting dalam orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang menyangkut pada urusan-urusan kemaritiman. Masih tidak lepas dari ingatan bahwa Presiden Jokowi pada tahun 2014 mendeklarasikan Poros Maritim Dunia yang kemudian diteruskan pada 2017 menjadi dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Perpres 16/2017. Agenda ini kemudian pada tahun 2019 tidak memiliki keberlanjutan yang signifikan mengingat wacana kemaritiman tidak begitu muncul pada Pemilihan Presiden 2017. Ada beberapa indikasi sebagaimana disinggung oleh Yakti & Wicaksana (2021) bahwasanya sejak Visi Indonesia Maju mengemuka, agenda untuk memperkuat sektor kemaritiman tidak begitu naik pun juga dengan hanya fokus pada sektor-sektor yang bersifat inward leaning semata yang juga ditegaskan dalam Yakti & Tsauro (2021).

Indonesia berkepentingan untuk menaikkan leverage strategis di kawasan Indo-Pasifik, di tengah-tengah kontestasi

besar antara dua kekuatan besar dunia yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Terutama sejak meningkatnya intensitas persaingan antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diinisiasi oleh pemerintah di Beijing dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diinisiasi oleh pemerintah di Washington DC (Sandrina & Prastyono, 2024). Kawasan Indo-Pasifik sendiri mencakup sekitar 60% populasi dunia dan menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) global, menjadikannya salah satu kawasan paling dinamis secara ekonomi dan strategis (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2022). Salah satu titik yang paling strategis dalam posisi limbo Indonesia adalah keberadaan Laut Cina Selatan (LCS) yang menempati suatu posisi sentral sebagai pusat gravitasi konflik geopolitik dan geoekonomi.

Perairan internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS tersebut tidak hanya dipahami sebagai jalur pelayaran internasional biasa, namun menjadi kawasan strategis yang memiliki potensi sumber daya energi dan perikanan yang signifikan, yang terus menjadi bahan sengketa di antara negara-negara kawasan (Tra net al., 2024). Sayangnya persoalan LCS harus dihadapkan dengan masalah serius melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Tiongkok tentang pengakuan terhadap keberadaan “wilayah beririsan” di perairan di sekitar Laut Natuna Utara. MoU antara Indonesia-Tiongkok terkait LCS dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap klaim kedaulatan nasional demi keuntungan ekonomi jangka pendek (Zamzami & Dikarma, 2024). MoU Indonesia-Tiongkok bukan sekadar kesepakatan teknis, melainkan cerminan dari dilema strategis yang dihadapi

Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara Tiongkok dan AS.

Indonesia pada era Jokowi mencitrakan diri sebagai kekuatan menengah yang diberikan ekspektasi oleh negara-negara tetangga dapat menjadi penyeimbang di tengah ketegangan regional yang timbul akibat kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok (Ermaya, 2023; Utama, 2023; Conelly, 2014). Bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk melakukan agenda strategis tersebut, mengingat Tiongkok memiliki skema kerja sama berupa Belt and Road Initiative (BRI) yang erat kaitannya dengan isu kedaulatan berkenaan dengan LCS. Memang kerja sama strategis naik dengan AS dan Tiongkok pada berbagai aspek memberikan keuntungan bagi Indonesia di satu sisi, meski di sisi lain juga menciptakan dilema ketergantungan militer yang sulit diabaikan (Hamilton-Hart & McRae, 2015; Ibrahim et al., 2023).

Terakhir, pertanyaan tentang posisi sentral ASEAN yang seharusnya menaungi lingkup diplomasi kawasan bagi Indonesia mengemuka ketika ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang digagas Indonesia belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengatasi konflik LCS. Pertanyaan berikutnya muncul, ketika sentralitas ASEAN hanya akan menjadi simbol tanpa daya dorong, atau dapat diubah menjadi alat geopolitik yang efektif (Weatherbee, 2020). Ganesan & Rames (201) sendiri ikut bertanya terkait kondisi bilateralisme jika dibandingkan dengan multilateralisme di dalam konteks Indonesia menghadapi kekuatan besar seperti Tiongkok. Esai ini bertujuan untuk mengupas strategi Indonesia dalam menavigasi tekanan dari dua kekuatan besar di Indo-Pasifik, yaitu Tiongkok dan AS, khususnya dalam konteks LCS. Selain itu, esai ini juga

akan menyoroti peluang dan tantangan memperkuat sentralitas ASEAN untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia. Melalui analisis ini, esai akan menawarkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat sekaligus aktor regional yang berpengaruh.

Klaim *Nine-Dash Line vis-a-vis* Kedaulatan Negara-negara ASEAN

Sejak Indonesia mengklaim Laut Natuna Utara pada tahun 2017 melalui International Maritime Organization (IMO) di London, persoalan LCS telah sebelumnya menjadi arena utama bagi perhatian pemerintah di Jakarta (Allard & Munthe, 2017; The Maritime Executive, 2017). Eskalasi militerisasi oleh Tiongkok melalui pengerahan kapal penjaga pantai, milisi maritim, dan pembangunan pulau buatan di Kepulauan Paracel dan Sparty yang dilengkapi infrastruktur militer, seperti landasan pacu sepanjang sekitar 3.000 meter yang dapat digunakan untuk pesawat militer dan sipil di pulau Fiery Cross, Subi, dan Mischief. Serta sistem radar militer, pertahanan udara, sistem intelijen dan komunikasi canggih memantik suatu perdebatan terkait dengan pemosisian Indonesia untuk mempertahankan wilayah hak berdaulatnya dalam kerangka Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS (Raka & Nugraha, 2023). Strategi ini menegaskan klaim *Nine-Dash Line* yang diajukan Tiongkok, meskipun telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh putusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 (Permanent Court of Arbitration, 2016).

Eskalasi baik militer maupun non-militer yang ditunjukkan oleh Tiongkok semakin mempertegas tantangan bagi stabilitas kawasan. Indonesia meskipun tidak termasuk negara yang mengklaim wilayah satu titik pun di LCS, kerap menghadapi ancaman langsung terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Telah terjadi setidaknya 12 sampai 15 insiden yang melibatkan kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok di kawasan LCS antara Indonesia dengan Tiongkok (Maulana et al., 2023; Detik.com, 2023). Fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini mengindikasikan betapa seriusnya dampak eskalasi terhadap kedaulatan Indonesia. Kehadiran militer matra laut Tiongkok yakni People Liberation Army Navy (PLAN) di LCS disertai dengan patroli China Coast Guard (CCG) dan aksi-aksi sepihak yang dilakukan China Maritime Militia (CMM) juga menimbulkan risiko terhadap kebebasan navigasi dan aliran perdagangan global, di mana sekitar 60% lalu lintas perdagangan dunia melewati kawasan ini (Adeltasakina, 2024).

Pendekatan agresif yang ditunjukkan pemerintah di Beijing memecah solidaritas dari negara-negara anggota ASEAN, yang membagi dalam setidaknya dua faksi. Faksi pertama, negara-negara yang secara ekonomi bergantung pada Tiongkok seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung pada sikap pemerintah di Beijing. Adapun faksi kedua, terdiri atas negara-negara seperti Filipina dan Vietnam yang mengambil sikap lebih tegas dalam mempertahankan kedaulatan atas perairan yang menjadi wilayah integral dengan yurisdiksi kedua negara tersebut (Darmawan, 2021; Raka & Nugraha, 2023). Indonesia sebagai pemimpin *de facto* ASEAN menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara

melindungi kepentingan nasional dan menjaga solidaritas ASEAN. Selain posisinya yang rentan akibat pengambilan posisi sebagai *non-claimant state* yang berada pada zona abu-abu, pengakuan “wilayah beririsan” melalui MoU yang baru-baru ini disepakati dengan Tiongkok menciptakan preseden yang membahayakan klaim kedaulatan Indonesia sendiri (Sulistiyani et al., 2021). Langkah ini tidak hanya mereduksi posisi Indonesia dalam sengketa kawasan, tetapi juga melemahkan peran strategis organisasi ASEAN sebagai penggerak stabilitas regional. Terutama dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, ASEAN tidak lagi dilirik sebagai suatu kemitraan yang dianggap menguntungkan posisi Indonesia ditambah absennya Menteri Luar Negeri Sugiono di bawah Presiden Prabowo Subianto yang melewatkan pertemuan ASEAN pada akhir Desember 2024 (Prayoga, 2025; Kompas, 2025).

Penyelesaian Code of Conduct (CoC) yang diusulkan oleh ASEAN sejak awal tahun 2000an belum mencapai titik kesepakatan yang mengikat. Sebagian besar karena tarik-menarik kepentingan antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN (Buszynski, 2003; Tiezzi, 2014). Ketidakmampuan ini memperlihatkan kelemahan ASEAN dalam menghadapi klaim *Nine-Dash Line* secara kolektif. Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa menjadi penting untuk mendukung diplomasi multilateral yang lebih kuat dan sebaliknya komitmen pemerintah di Jakarta yang setengah hati mendukung atau setidaknya bersimpati pada negara anggota yang lain menjadi cukup minus (Ma & Wills, 2016; Rusmuliadi, 2023).

Bagi Indonesia, keberadaan klaim Tiongkok atas Nine-Dash Line memiliki dampak geopolitik yang signifikan bagi posisi pemerintah di Jakarta terhadap proyeksi citra Indonesia di depan dunia internasional (Alfachridzi, 2024). Indonesia mencoba menunjukkan distingsinya yang telah diakui UNCLOS yakni sebagai negara arsipelago sekaligus memaknai posisi strategis di jalur perdagangan internasional sehingga dengan alasan apa pun Laut Natuna Utara menjadi salah satu aset utama yang harus dijaga. Namun, dalam praktiknya, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap klaim ini masih terlihat ambigu dan belum dapat menunjukkan indikasi yang lepas dari kompromi dengan pemerintahan Tiongkok (Butar Butar, 2023).

Pendekatan Indonesia terus dijaga agar tetap dalam koridor *low-profile* pada diplomasi dengan menghindari pertikaian. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan citra *low-profile* antara lain menghindari penggunaan istilah “Laut Natuna Utara” dalam forum internasional hingga memberikan pengakuan atas MoU dengan Tiongkok, sehingga memberikan kesan bahwa Indonesia lebih memilih stabilitas hubungan bilateral daripada mempertahankan kedaulatan secara tegas (Adikara & Munandar, 2021). Pendekatan ini memunculkan dilema: di satu sisi, menghindari eskalasi konflik dengan Tiongkok; di sisi lain, mengorbankan kepercayaan negara-negara ASEAN lainnya terhadap kepemimpinan Indonesia di kawasan (Darmawan & Mahendra, 2018; Walesasi et al., 2022; Ayuningtyas & Muhaimin, 2022). Tentu realitas ini berbanding terbalik dari status Indonesia sebagai negara *middle power* yang seyogianya pemerintah di Jakarta dapat lebih proaktif dan menunjukkan peran sebagai penyeimbang (*balancer*) antara Tiongkok dengan AS di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini alih-

alih hanya penting untuk melindungi kepentingan nasional, melainkan juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan yang kredibel.

Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai Titik Balik Peran Indonesia di ASEAN

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Tiongkok yang mengafirmasi adanya “wilayah beririsan” di Laut Natuna Utara memunculkan pertanyaan serius terkait posisi geopolitik Indonesia. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa MoU ini bersifat teknis dan bertujuan untuk menghindari eskalasi konflik di kawasan dan pada akhirnya berlanjut pembentukan Perjanjian Kerja Sama antara institusi-institusi yang ada pada Indonesia dan Tiongkok seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan CCG pada 11 Januari 2025 (Antara, 2025).

Salah satu implikasi utama dari MoU Indonesia-Tiongkok adalah potensi melemahnya solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim Nine-Dash Line. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa LCS, Indonesia sebelumnya dianggap sebagai mediator yang netral dan mampu memperkuat posisi ASEAN secara kolektif. Namun, pengakuan adanya “wilayah beririsan” dapat dianggap sebagai langkah yang mendukung narasi Tiongkok dan mengurangi kemampuan ASEAN untuk bertindak secara bersama dalam menghadapi tekanan geopolitik kekuatan besar. Antara lain AS, Australia, dan Inggris yang tergabung dalam aliansi AUKUS untuk menjaga stabilitas dan membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan sekaligus menjalin kemitraan dengan sebanyak mungkin negara (Maisi, 2023). Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam, yang memiliki sengketa langsung dengan

Tiongkok, dapat merasa dikhianati oleh langkah ini. Sebaliknya, negara-negara pro-Tiongkok seperti Kamboja dan Laos mungkin melihat MoU ini sebagai bukti bahwa pendekatan bilateral dengan Tiongkok lebih efektif daripada pendekatan multilateral. Dengan demikian, MoU ini tidak hanya mengancam sentralitas ASEAN, tetapi juga memperdalam fragmentasi di dalam organisasi tersebut termasuk membawa kecurigaan dari aliansi keamanan lain seperti AUKUS sehingga Indonesia semakin linglung dalam memosisikan diri karena dikhawatirkan ada anggapan bahwa pemerintah di Jakarta semudah itu berpihak pada salah satu kekuatan (Kennedy et al., 2022).

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang diperkenalkan pada 2019, bertujuan untuk memberikan kerangka kerja strategis bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik (ASEAN, 2019; ASEAN, 2024; Gill, 2023). Namun, hingga saat ini, implementasi AOIP masih terbatas pada retorika tanpa taring dan semakin memperkuat persepsi bahwa AOIP tidak memiliki mekanisme nyata untuk mengelola konflik dan sengketa di kawasan (Oktaviano et al., 2020). Jika Indonesia, sebagai salah satu pendukung utama AOIP, tidak mampu mempertahankan posisinya terhadap Tiongkok, maka prospek AOIP untuk menjadi alat diplomasi regional yang efektif akan semakin meredup (Anwar, 2020; Agastia, 2020).

Meskipun demikian, Tiongkok-Indonesia mengarah pada saling berkompromi yang berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Posisi bimbang Indonesia ini dapat dikonfirmasi secara ragu oleh pemerintahan Indonesia dengan

menegaskan tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok di LCS. Penandatanganan kesepakatan pembangunan maritim dengan pemerintah di Beijing menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa Indonesia dapat mengarah pada mengakui klaim teritorial Tiongkok, yang dapat mengompromikan hak-hak kedaulatan Indonesia atas sumber dayanya (Reuters, 2024).

Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional 2016 yang membatalkan klaim *Nine-Dash Line* memberikan pijakan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan atas Laut Natuna Utara (Permanent Court of Arbitration, 2016). Melalui keberadaan MoU ini, Indonesia mengakui keberadaan sengketa yang tidak relevan secara hukum internasional sehingga dapat menciptakan preseden berbahaya yang dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. Dampak dari kesalahan persepsi para pembuat kebijakan di Jakarta tersebut dapat berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dalam diskusi multilateral (Fitrianggraeni et al., 2025; Basundoro, 2025).

Memang Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari USD 120 miliar pada 2023. Menurut data Kementerian Perdagangan Indonesia (2023), total perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok pada Januari-Agustus 2023 tercatat sebesar USD 83,10 miliar. Sementara itu, pada tahun 2022, total perdagangan kedua negara mencapai USD 133,56 miliar (Kemendag RI, 2023). Selain itu, proyek-proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan bendungan dan infrastruktur serta energi yang didukung oleh BRI menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi ekonomi Tiongkok di multi-sektoral dalam pembangunan (AidData, 2025).

Fenomena ketergantungan Indonesia justru dalam batasan tertentu mengakibatkan leverage politik yang signifikan bagi Tiongkok, terutama dalam sengketa Laut Natuna Utara termasuk menciptakan dilema strategis bagi Indonesia: di satu sisi, membutuhkan investasi asing untuk mendorong pembangunan nasional; di sisi lain, harus menjaga kedaulatan dan independensi dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Keuntungan ekonomi yang diterima oleh Indonesia tidak sepadan dengan konsekuensi geoekonomi dan geopolitik bagi pemerintah di Jakarta secara jangka panjang. Ancaman yang paling mengemuka adalah erosi kedaulatan maritim Indonesia di LCS dan khususnya di perairan Laut Natuna Utara (Muhaimin, 2018). Penandatanganan MoU dapat memberikan sinyallemen Indonesia jauh lebih memprioritaskan hubungan ekonomi yang bersifat pragmatis daripada cita-cita ideal untuk mempertahankan integritas teritorial Indonesia di perairan. Proyek-proyek besar seperti pembangunan pelabuhan dan kawasan industri yang dibiayai oleh Tiongkok sering kali disertai dengan syarat-syarat tertentu yang membatasi kemampuan Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap klaim maritim Tiongkok. Kredibilitas Indonesia tidak hanya terancam di ranah publik domestik namun juga secara lebih luas menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN yang mengandalkan Indonesia sebagai pemimpin kawasan (Andika & Aisyah, 2017).

Opsi-opsi Langkah Strategis Indonesia

Melihat Tiongkok dengan klaim kerasnya atas Nine-Dash Line, Indonesia perlu untuk mengambil langkah-langkah strategis yang memberikan ketegasan atas kedaulatannya dan

memperkuat peran pentingnya di Indo-Pasifik. Indonesia setidaknya dapat menempuh salah satu, dua di antaranya, atau bahkan semuanya dari langkah-langkah berikut. Pertama, meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan maritim. Termasuk memperkuat identitas dan jati diri TNI Angkatan Laut yang dapat diproyeksikan sebagai blue water navy (BWN) di kawasan Laut Natuna Utara untuk mengimbangi kehadiran PLAN yang sedang bertransformasi menjadi BWN di 2050 mendatang (Booth, 2014; Moran & Russell, 2016; Sharma, 2020). Indonesia melalui TNI AL perlu untuk meningkatkan kehadirannya sekaligus memperkuat *naval diplomacy* dengan negara-negara mitra seperti Jepang dan Australia agar dapat bersama-sama melakukan patroli pengawasan maritim. Kedua, mendorong penyelesaian CoC yang bersifat lebih mengikat. Sebagai motor penggerak ASEAN terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai macan Asia, maka urgen untuk menyiapkan upaya-upaya penyelesaian CoC yang mengikat secara hukum (Kemlu RI, 2023; CNN Indonesia, 2023; Media Indonesia, 2023; Kumparan, 2023). Meskipun demikian upaya yang telah dilakukan pemerintah di Jakarta dengan mendorong negosiasi CoC dilakukan agar dipercepat belum menemukan titik temu mengingat sudah hampir 2 tahun, belum ada progres yang signifikan dalam memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk mengelola sengketa di LCS.

Ketiga, memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk diversifikasi. Strategi paralel perlu dipikirkan oleh pembuat kebijakan di Jakarta agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada Tiongkok melalui diversifikasi mitra ekonomi. Indonesia perlu untuk memperluas kerja sama dengan

Uni Eropa, India, dan AS agar dapat mengurangi *leverage* Tiongkok terhadap Indonesia sekaligus mereduksi tingkat interdependensi antara kedua negara dan memberikan alternatif-alternatif pasar (Utama, 2024). Keempat, memperkuat narasi kedaulatan nasional melalui integritas teritorial maritim. Indonesia perlu memperkuat narasi kedaulatan nasional di tingkat domestik dan internasional, termasuk menegaskan kembali komitmen untuk melindungi wilayah ZEE di Laut Natuna Utara sesuai dengan UNCLOS. UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengklaim ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pantai, termasuk di perairan Natuna Utara (Darmawijaya et al., 2022).

Nine-Dash Line menjadi ujian strategis bagi kedaulatan dan kredibilitas Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang luas. Sebagai middle power dan pemimpin de facto ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat stabilitas kawasan. Ambiguitas dalam kebijakan terkait Laut Natuna Utara hanya akan melemahkan posisi strategis Indonesia, baik di ASEAN maupun di mata dunia internasional. Langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah di Jakarta di bawah Presiden Prabowo Subianto urgen untuk diimplementasikan demi menjaga national dignity sebagai ciri khas era kepemimpinannya yang kental dengan corak militer yang kental.

Simpulan

Indonesia menghadapi dilema geopolitik yang kompleks di tengah eskalasi ketegangan antara AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara dengan kekuatan maritim

strategis, Indonesia berada di persimpangan kepentingan global, dengan keputusan-keputusan politik luar negeri yang mempengaruhi stabilitas kawasan. Namun, penandatanganan MoU justru mengafirmasi “wilayah beririsan” dengan Tiongkok menunjukkan adanya potensi kemunduran geopolitik yang dapat merugikan kedaulatan Indonesia, dan sekaligus melemahkan kredibilitas sentralitas ASEAN sebagai mekanisme kolektif untuk menghadapi tekanan eksternal.

Oleh karena itu, dilema mengharuskan Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai aktor independen yang mampu menavigasi tekanan dari kedua kekuatan besar tanpa menjadi subordinat salah satunya. Indonesia harus menegaskan kembali kebijakan luar negeri bebas aktif dengan langkah-langkah strategis seperti diversifikasi mitra ekonomi dan penguatan kapasitas pertahanan maritim. Indonesia juga perlu memperkuat sentralitas ASEAN sebagai pilar utama dalam menjaga kepentingan nasional dan merespons tantangan geopolitik, khususnya terkait klaim *Nine-Dash Line* dan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia harus memprioritaskan implementasi nyata dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dengan mendorong solidaritas dan kerja sama maritim yang lebih nyata di antara negara-negara ASEAN. Kerja sama ini, seperti patroli maritim bersama dan berbagi data intelijen, menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Secara bersamaan, Indonesia harus melanjutkan upayanya untuk memperkuat Poros Maritim Dunia dengan meningkatkan kapasitas pertahanan dan diplomasi maritim yang aktif, serta mendorong tata kelola maritim berbasis aturan melalui forum internasional seperti IORA dan ARF.

Ke depan, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran sentral sebagai kekuatan maritim yang tangguh dan pemimpin regional yang dihormati, dengan diplomasi yang cerdas dan berimbang. Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks, kepemimpinan Indonesia harus dapat menjaga stabilitas kawasan dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga. Tentu tanpa mengorbankan integritas teritorial dan kedaulatan maritim Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adeltasakina. (2024, 5 Desember). *Konflik Laut Cina Selatan: Dinamika Geopolitik dan Dampak Kawasan*. Kumparan. <https://kumparan.com/adeltasakina/konflik-laut-cina-selatan-dinamika-geopolitik-dan-dampak-kawasan-242xwy0pZag>
- Adikara, A. P. B. & Munandar, A. I. (2021). Tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13(1), 83-101.
- Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293-305.
- AidData. (2025). *High-Speed Rail - Project*. Retrieved from <https://china.aiddata.org/projects/61320/>
- Alfachridzi, E. (2024). INDONESIA IN THE FACE OF GREAT POWER COMPETITION. *Security Science Journal*, 5(3), 49-61.

- Allard, T., & Munthe, B. C. (2017, July 14). Asserting sovereignty, Indonesia renames part of South China Sea. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map-idUSKBN19Z0YQ/>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111-129.
- ASEAN. (2019, June 22). ASEAN outlook on the Indo-Pacific. https://www.asean.org/wp-content/uploads/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf
- ASEAN. (2024, October 9). ASEAN Leaders' declaration on the ASEAN outlook on the Indo-Pacific for the future-ready ASEAN and ASEAN-centred regional architecture. https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/3-Final_ALD-on-the-AOIP-for-the-Future-Ready-ASEAN-and-ASEAN-Centered-Regional-Architecture.pdf
- Ayuningtyas, D., & Muhaimin, R. (2022). Strategi Indonesia dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman bagi kawasan Indo-Pasifik. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 364-387. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.388>
- Basundoro, A. F. (2025, January 10). *Indonesia-China agreement and Jakarta's inconsistency on the South China Sea issue*. RSIS Commentary. <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/indonesia-china-agreement-and-jakartas-inconsistency-on-the-south-china-sea-issue/>
- Booth, K. (2014). *Navies and foreign policy*. Routledge.

- Buszynski, L. (2003). ASEAN, the declaration on conduct, and the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 25(3), 343-362.
- Butar Butar, D. A. (2023). Pergeseran strategi Indonesia dalam sengketa dengan Tiongkok antara tahun 2009 dan 2022 serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah di perairan Natuna Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 37-52. <https://doi.org/10.22146/jkn.83036>
- CNN Indonesia. (2023, September 6). *ASEAN-China sepakat ngebut selesaikan kode etik Laut China Selatan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230906172951-106-995675/asean-china-sepakat-ngebut-selesaikan-kode-etik-laut-china-selatan>
- Connelly, A. L. (2014). *Indonesian foreign policy under President Jokowi*. Lowy Institute Analysis.
- Darmawan, A. B. (2021). Dinamika isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis sumber-sumber kebijakan luar negeri Tiongkok dalam sengketa. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1), 13-35. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786>
- Darmawan, A. B., & Mahendra, L. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN terbelah menghadapi Tiongkok. *Global & Strategis*, 12(1), 79-100.
- Darmawijaya, A.S., Abdul Rivai Ras & Broto Wardoyo (2022) *Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1).
- Detik.com. (2023, 28 Desember). *Kenapa Laut China Selatan terus bergejolak sepanjang tahun 2023?*

https://news.detik.com/dw/d-7112431/kenapa-laut-china-selatan-terus-bergejolak-sepanjang-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com

Ermaya. (2023, November 23). Indonesia sebagai kekuatan tengah dalam geopolitik global. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/10473171/indonesia-sebagai-kekuatan-tengah-dalam-geopolitik-global?page=all>

Fitrianggraeni, S., Davey, O. M., Imanuel, C., & Anugerah, A. D. (2025, January 7). *Indonesia-China maritime cooperation: Highlighting Indonesia's interest on the agreement*. Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fd87e022-e866-4bb0-974b-fd470cf03873>

Gill, D. M. (2023). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Motivations, Opportunities, and Challenges. *China and the Indo-Pacific: Maneuvers and Manifestations*, 75-91.

Hamilton-Hart, N., & McRae, D. (2015). *INDONESIA: BALANCING THE UNITED STATES AND CHINA, AIMING FOR INDEPENDENCE*. The University of Sydney, United States Studies Centre.

Ibrahim, M. R., Sukandar, R., & Nusantara, L. A. (2023). *Indonesia's economic advancement through leveraging the geopolitical rivalry and geostrategic between the USA and China in the Indo-Pacific region*. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity*, 9(2), 379–387. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal>

- Kementerian Luar Negeri RI. (2023, September 1). *Kemlu: ASEAN dan China sepakat percepat proses COC di Laut China Selatan*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-asean-dan-china-sepakat-percepat-proses-coc-di-laut-china-selatan-216Qhta60hQ>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023, Oktober). *Mendag: Kunjungan kerja ke China tingkatan perdagangan bilateral*. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kunjungan-kerja-ke-china-tingkatan-perdagangan-bilateral>
- Kennedy, P. S. J., Sutrasna, Y., & Haetami. (2022). Geoekonomi: Dampak terbentuknya pakta trilateral AUKUS terhadap ASEAN. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 108–116. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1689>
- Kompas. (2023, Juli 13). *ASEAN-China percepat perundingan COC Laut China Selatan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/07/13/asean-china-percepat-perundingan-coc-laut-china-selatan>
- Kompas. (2025). Thailand gelar pertemuan ASEAN bahas Myanmar, Menlu Sugiono tidak hadir. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/thailand-gelar-pertemuan-asean-bahas-myanmar-menlu-sugiono-tidak-hadir?form=MG0AV3>
- Ma, T., & Wills, M. (2016). Raising the stakes: the interests of non-claimant states in the South China Sea disputes. *asia policy*, (21), 2-5.

- Maisi, O. R. (2023). Kehadiran kerjasama keamanan trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai perbedaan sikap negara anggota dan relevansi ASEAN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1528–1542. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3525>
- Maulana, Y. S., Ibrahim, B., & Bunari. (2023). *Perubahan nama zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara (1982–2017)* [History of changing the name of Indonesia's exclusive economic zone in the South China Sea to the North Natuna Sea (1982–2017)]. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 117–131. <https://doi.org/10.1234/nhj.v3i2.918>
- Media Indonesia. (2023). *Indonesia percepat negosiasi kode etik di Laut China Selatan*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/internasional/609785/indonesia-percepat-negosiasi-kode-etik-di-laut-china-selatan#google_vignette
- Moran, D., & Russell, J. A. (Eds.). (2016). *Maritime strategy and global order: Markets, resources, security*. Georgetown University Press.
- Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia defense strategy towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, 80(2020), 21-29.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *Press release: The South China Sea arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*. The Hague. <https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf>

- Prayoga, P. (2025, Januari 2). *Jangan memunggungi ASEAN*. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/jangan-memunggungi-asean?form=MG0AV3>
- Raka, O. N., & Nugraha, A. C. (2023). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik wilayah ASEAN. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4), 25-42.
- Reuters. (2024, 11 November). *Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal*. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china-despite-2024-11-11/>
- Rusmuliadi, R. (2023). Non-Claimant States' Perspectives on the South China Sea Dispute. *Lampung Journal of International Law*, 5(1), 1-14.
- Sandrina, F., & Prastyono, A. (2024). *Indonesia's position in navigating the stability of the Indo-Pacific region through multilateral cooperation between RCEP and IPEF*. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 1-18.
- Sharma, Y. (2023, August 18). *An assessment of China's blue water ambitions*. Centre for Joint Warfare Studies. <https://cenjows.in/an-assessment-of-chinas-blue-water-ambitions/>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia terhadap sengketa Laut Cina Selatan semasa pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's responses toward the South China Sea dispute during Joko Widodo's administration]. *Politica*, 12(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>

- Thao, N. H. (2023). South China Sea: Battle of the Diplomatic Notes among China and Non-Claimant States. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 8(1), 128-154.
- The Maritime Executive. (2017, July 16). Indonesia renames its portion of the S. China Sea. *The Maritime Executive*. <https://www.maritime-executive.com/article/indonesia-renames-its-portion-of-the-s-china-sea>
- Tiezzi, S. (2014). Why China Is Not Interested in a South China Sea Code of Conduct. *Diplomat*.
- Trần, B. H., Nguyễn Anh, C., & Đinh Trần, Y. N. (2024). Challenges for Vietnam in protecting South China Sea sovereignty and interests. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2401629>
- U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. (2022). *Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat*. https://id.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/162/2024/05/U.S.-Indo-Pacific-Strategy_id.pdf
- Utama, V. R. (2023, Juni 5). Peran Indonesia di tengah persaingan AS-China di Asia-Pasifik. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/global/read/2023/06/05/161137670/peran-indonesia-di-tengah-persaingan-as-china-di-asia-pasifik?page=all>
- Utama, V. R. (2024, 3 Oktober). *75 tahun Tiongkok dan ambisi globalnya: Langkah strategis Indonesia*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/opini/705812/-75-tahun-tiongkok-dan-ambisi-globalnya--langkah-strategis-indonesia#google_vignette
- Walesasi, Y., Suharman, Y., & Mappiare, A. (2022). Tantangan strategis Indonesia di tengah rivalitas Tiongkok versus

- AUKUS: Sebuah analisis dilema tahanan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), 240-252. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i2.35898>
- Yakti, P. D. & Wicaksana, I. G. W. (2021). *Poros Maritim Dunia: Konsep, Strategi, dan Realitas*. Malang: InTrans Publishing.
- Yakti, P. D., & Tsauro, M. A. (2021). Questioning Joko Widodo's Global Maritime Fulcrum: Change and Overlap Policy. *Global Focus*, 1(2), 164–179. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2021.001.02.5>
- Zamzami, F., & Dikarma, K. (2024, November 12). Ini alasan kesepakatan Prabowo-Xi soal Laut Cina Selatan tuai pro-kontra. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/smt54393/ini-alasan-kesepakatan-prabowoxi-soal-laut-cina-selatan-tuai-prokontra>
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara [The Policy of Securitization And Threat Perception In North Natuna Sea]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 9(1), 17-38.

***One China Policy* di Kawasan Pasifik Selatan: Studi Kasus Fiji Pasca Kudeta Militer 2006**

Mira Nanda Kurnianta

M. Muttaqien

Siti R. Susanto

Pendahuluan

Peristiwa kudeta militer di Fiji pada tahun 2006 yang disertai dengan berbagai sanksi dari Australia terhadap Fiji membuat Tiongkok bergerak cepat dan agresif dengan memberikan dukungan diplomatik, perdagangan, dan bantuan keuangan yang cukup besar bagi Fiji. Terlebih kebijakan “*Look North*” juga diberlakukan oleh Fiji yang menjadi sinyal bahwa negara ini dapat bekerja sama dengan negara lainnya dan tidak bergantung pada Australia. Meskipun demikian, Frank Bainamarama selaku pemimpin Fiji menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti Fiji berpaling atau mencari pengganti dari Australia sebagai donor tradisional melainkan merupakan upaya kompensasi kerugian yang dialami Fiji akibat sanksi dari Australia tersebut. Terlebih, kebijakan ini mendapat sambutan yang positif dari Tiongkok melalui perannya sebagai donor yang memberikan dana bantuan yang signifikan bagi Fiji (Wang 2014).

Apa yang dilakukan Cina secara politis menggunakan instrumen bantuan luar negeri dapat diibaratkan sebagai “*gap spotting*” atau mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara-negara donor sebelumnya. Peningkatan bantuan luar negeri

sebagai instrumen politik yang digunakan Cina menjadikan Fiji sebagai negara yang paling besar menerima bantuan dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Kenaikan pemberian bantuan sebelum dan setelah kudeta 2006 itu terlihat dari data berikut. Wesley-Smith dan Porter (2010) mencatat bahwa Cina memberikan bantuan sebesar 12 juta dolar Amerika ke Fiji untuk pembangunan fasilitas olahraga, yang akan digunakan dalam kegiatan South Pacific Games di tahun 2003. Pemerintah Fiji pada 2005 kembali menerima dana bantuan dari Cina sebesar 3,4 juta dolar Amerika sebagai tanda hubungan baik antara kedua negara. Setelah kudeta 2006 terjadi peningkatan pemberian bantuan Cina ke Fiji pada tahun 2007 yaitu sebesar 167 juta dolar Amerika. Laporan Levick (2018) menyebutkan dana yang diterima Fiji dari Cina bahkan mencapai 291.94 juta dolar Amerika. Tulisan ini membahas manuver Cina di kawasan Pasifik Selatan dengan studi kasus relasi antara Cina dan Fiji dengan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi perhatian Cina atas kawasan ini umumnya dan negara Fiji khususnya. Tulisan ini secara khusus membedah manuver Cina di kawasan Pasifik Selatan melalui bantuan luar negeri ke Fiji setelah terjadinya kudeta militer tahun 2006.

Argumentasi tulisan ini adalah Cina menggunakan instrumen bantuan luar negeri untuk membangun citra diri sebagai negara mitra hubungan bilateral yang tidak memfokuskan dinamika politik domestik Fiji. Sehingga pola hubungan bilateral yang dibentuk adalah secara organik. Padahal, momentum masuknya Cina ke Fiji dengan peningkatan bantuan luar negeri adalah terjadi ketika negara-negara donor utama yang selama ini membantu negara ini yaitu Australia dan Selandia Baru mengurangi bantuan luar negerinya setelah rejim

militer mengambil alih pemerintahan di Fiji. Dalam kacamata Cina, Fiji memiliki arti penting di kawasan Pasifik Selatan mengingat pentingnya pengaruh Fiji di kawasan tersebut; selain Fiji merupakan tempat dimana institusi-institusi internasional bermarkas. Kepentingan politik yang mendorong Cina memberikan bantuan luar negeri ke Fiji adalah untuk memperluas dukungan atas Kebijakan Satu Cina (*One China Policy*) sekaligus mereduksi pengaruh Taiwan di kawasan. Dukungan dari negara kecil seperti Fiji dan beberapa negara kecil lainnya di kawasan Pasifik Selatan sangat penting bagi Cina terutama dalam diplomasi-diplomasi multilateral ketika suara negara besar dan negara kecil dinilai sama (*one country, one vote*).

Kebijakan Satu Cina

Motif pertama yang menjadi dasar Cina merangkul erat Fiji pasca terjadi kudeta militer tahun 2006 adalah urusan politik yang secara spesifik berkaitan dengan kelancaran agenda besar Cina secara internasional, yakni Kebijakan Satu Cina atau *One China Policy* (OCP). Dibalik upaya Cina membangun supremasinya sebagai negara yang mampu menyaingi Amerika Serikat dalam berbagai urusan baik ekonomi maupun politik, terdapat satu hambatan serius dalam kacamata hukum internasional yaitu berkaitan dengan kedaulatan. Hambatan yang dimaksud adalah dualisme entitas politik Cina yaitu People's Republic of China (Cina) dan Republic of China (Taiwan). Dari sini terlihat agenda Cina dalam OCP menjadi semacam pertarungan politik bagi Cina atas citra dan legitimasinya di kancah perpolitikan internasional.

Secara substansial dualisme Cina ini dilandasi oleh perbedaan ideologi politik yang mendasar yaitu Taiwan lebih menginginkan pemerintahan dijalankan dengan model demokrasi, sementara Cina bersikeras menjalankan pemerintahan dengan model komunisme (Chang 2014). Sementara itu, Cina yang dalam perjalanannya semakin maju dan menguasai berbagai aspek kehidupan di dunia sangat berambisi untuk menyatukan kembali semua wilayah ke dalam satu pemerintahannya dan tidak akan membiarkan Taiwan benar-benar memisahkan diri dari Cina dengan menggunakan cara apa pun termasuk kekerasan (Jacques 2011).

OCP menjadi suatu agenda politik internasional bagi Cina, sehingga internasionalisasi kemudian dilakukan dengan mengajak seluruh negara di dunia untuk mendukung kebijakan satu Cina. Hal ini dilakukan dengan landasan yang oleh Cina dianggap kuat secara hukum yaitu Taiwan harus mematuhi konsensus 1992 di Hong Kong, yang pada saat itu baik delegasi Taiwan maupun Cina telah menandatangani kesepakatan untuk bersatu kembali dalam satu payung yakni Cina (Kan 2014). Dalam upaya internasionalisasi OCP ini, Cina mengumumkan bahwa bagi setiap negara yang ingin hubungan diplomatiknya tetap terjaga dan tentu saja mendapatkan manfaat darinya, maka harus dengan tegas menyatakan untuk menolak atau tidak mengakui eksistensi Taiwan sebagai suatu negara yang berdaulat melainkan tidak lebih dari suatu wilayah bagian dari Cina (Roberge & Youkyung 2009). Namun, dalam praktiknya beberapa negara tidak lantas taat terhadap apa yang dikehendaki oleh Cina tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang dalam Roberge & Youkyung (2009) disebutkan bermain dua kaki yakni di satu sisi mengakui dan mendukung OCP melalui *Joint*

Communique tahun 1979, namun tidak lama kemudian juga mendukung *Taiwan Relations Act* di tahun yang sama yang artinya mengakui eksistensi Taiwan. Walaupun demikian, secara hukum internasional, pengakuan suatu negara atas negara lain bukan merupakan syarat sah terbentuknya negara (Mauna 2003), sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang mengikuti walaupun konsekuensi politiknya tetap ada (Thontowi dan Iskandar 2006).

Ambiguitas negara-negara dunia seperti Amerika Serikat terhadap dualisme Cina ini yang kemudian menjadi landasan bagi Cina untuk semakin agresif dalam mencari dukungan internasional demi kelancaran OCP. Ekspansi pengaruh politik Cina kemudian meluas ke berbagai negara-negara dunia termasuk ke kawasan Pasifik Selatan. Zhang (2018) menuliskan bahwa Cina terus meningkatkan eksistensinya di kawasan Pasifik Selatan, kawasan yang oleh Cina dianggap sebagai “*a great periphery*” maupun “*extended neighborhood*” yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kawasan mitra strategis. Dalam hal ini, mendekatkan diri dengan Fiji pasca terjadinya kudeta militer 2006 merupakan salah satu langkah strategis bagi Cina di kawasan Pasifik Selatan. Langkah ini dilandasi kepentingan Cina dalam mewujudkan OCP dan mendapatkan dukungan dunia internasional. Fiji sendiri walaupun negara kecil namun memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi negara-negara lain di kawasan Pasifik Selatan, sehingga seakan menjadi magnet bagi Cina untuk membangun mitra dengannya.

Manuver Cina terhadap Fiji Pasca Kudeta 2006

Sebagai rumah bagi beberapa organisasi internasional di dunia, Fiji menjadi salah satu negara mitra terpenting bagi Cina di kawasan Pasifik Selatan. Pasca kudeta militer tahun 2006 yang menimpa Fiji, kepercayaan berbagai negara demokrasi di dunia terhadap Fiji seperti hilang begitu saja. Salah satu yang paling terasa dampaknya adalah sikap Australia terhadap Fiji sebagai negara pemberi bantuan luar negeri paling besar selama ini menurunkan jumlah bantuannya. Di tengah kondisi yang demikian, Fiji melakukan perubahan haluan politiknya dengan mulai melirik Cina sebagai mitra potensial. Cina menyambut positif dan mulai merapatkan diri ke Fiji yang tengah dijauhi beberapa negara karena insiden kudeta militer tersebut.

Cina mendekatkan diri ke Fiji adalah demi menghimpun dukungan untuk agenda OCP dalam forum multilateral utamanya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun Fiji terbilang negara kecil dari segi populasi dan luas wilayah, namun mekanisme voting dalam forum multilateral tetap menghitung suara Fiji setara dengan suara dari negara besar seperti Amerika Serikat sekalipun, yakni satu suara dengan daya tawar yang sama (Zhang 2018). Selain itu, Cina merapatkan diri ke Fiji pasca kudeta militer 2006 dalam kerangka agenda OCP untuk menghadapi Taiwan, karena di kawasan Pasifik Selatan yang terdiri dari 14 negara, enam negara memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Artinya, Taiwan telah mendapatkan sekitar 42,85% dukungan dari kawasan ini. Adapun enam negara yang dimaksud adalah Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Palau, Kiribati, dan Kepulauan Marshall (Stringer 2006). Dengan demikian, secara kalkulasi politik, mendekatkan diri dengan Fiji adalah langkah penting dan strategis bagi Cina

dalam melancarkan agenda OCP. Terlebih lagi, Taiwan terus aktif dan merawat eksistensinya di kawasan Pasifik Selatan melalui *Chequebook Diplomacy* (Nowak 2015).

Hal menarik lainnya yang dilakukan Cina dalam upaya mendekatkan diri dengan Fiji adalah perlakuan berbeda yang diberikan Cina terhadap Fiji dibanding negara-negara lain pasca kudeta militer 2006. Jika negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, India, hingga Jepang dan negara Pasifik lainnya yang mendorong upaya restorasi demokrasi di Fiji (Zhao 2013), Cina justru terkesan seperti paling memahami kondisi Fiji saat itu dengan tidak menyinggung soal demokrasi sama sekali melainkan menyatakan bahwa Cina menghormati segala keputusan yang telah diambil oleh masyarakat Fiji dan akan tetap siap memberikan dukungan apapun kepada Fiji sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Cina. Lebih detail dapat dilihat pada pernyataan resmi pemerintah Cina yang diwakili oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang dalam merespon kudeta militer yang terjadi di Fiji pada 2006 (China MFA 2006):

“We are concerned about the situation in Fiji. We hope that all parties in Fiji can work together and find a way to solve the issue. As a friend of Fiji, we sincerely hope that Fiji can maintain social stability, economic development and Fijian people can live in peace. This will be in the interest of Fiji and other countries in the region.”

Berdasarkan kutipan di atas, Cina terkesan mampu membaca situasi dan mengambil hati Fiji dengan tidak menyinggung akar persoalan dari kudeta yang cukup sering terjadi dan berdampak buruk bagi stabilitas dalam negeri

masyarakat Fiji sendiri. Respons dari Cina untuk Fiji tersebut kemudian membuka babak baru hubungan keduanya yang dimulai dengan peningkatan bantuan luar negeri Cina terhadap rezim militer Fiji yang meningkat drastis hingga bermuara pada status keduanya dalam kerangka kemitraan strategis (Zhang 2017).

Signifikansi Fiji dalam Perwujudan *One China Policy*

Kedekatan Cina dan Fiji pasca kudeta militer 2006 terus mengalami tren menuju ke arah yang lebih positif. OCP sebagai fondasi Cina dalam merajut kemitraan dengan Fiji terus diperluas cakupannya. Salah satu yang ditawarkan Cina ke Fiji pasca kudeta militer 2006 adalah kemitraan di bidang militer. Cina melihat kerja sama di bidang militer ini sebagai celah yang strategis untuk dimanfaatkan karena militer masih memegang kendali dan pengaruh yang kuat dan Fiji merupakan satu dari tiga negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan bersama dengan Tonga dan Papua Nugini (Meick et. al. 2018).

Manifestasi dari kemitraan militer antara Cina dan Fiji pasca kudeta militer 2006 adalah pada saat People's Liberation Army (PLA) atau pasukan militer resmi Cina memberikan pelatihan kepada sejumlah pasukan militer Fiji di Beijing pada tahun 2007 yang kemudian diikuti oleh tindakan menempatkan atase pertahanan Fiji di Beijing secara resmi (Liang 2008). Lebih lanjut, kemitraan militer yang dibangun Cina dengan Fiji juga dimanfaatkan secara maksimal oleh Cina dengan menyalurkan beberapa misi bantuan militer seperti kapal rumah sakit *Peace Ark* yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga

Fiji selama empat minggu berturut-turut (China Military Online 2016).

Cina juga menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap Fiji pasca kudeta 2006, yang oleh Zhang (2007) dikatakan sebagai ‘*two way socialization process*’ atau proses sosialisasi dua arah yaitu Cina mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang Fiji, sosok kemitraan seperti apa yang dibutuhkan Fiji dari Cina, kontribusi seperti apa yang perlu Cina berikan kepada Fiji dengan seminimal mungkin tekanan dalam memberikan dukungan terhadap agenda OCP. Dalam kerangka perwujudan OCP, Cina menganggap Fiji sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan, karena Fiji dapat menjadi batu loncatan bagi Cina dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Fiji dinilai oleh Cina tidak pernah menyerang atau menyinggung urusan dalam negeri Cina walaupun secara internasional banyak dilakukan oleh negara lain terutama menyangkut persoalan Tibet dan Xinjiang (Tarte 2010).

Puncaknya, pada tahun 2014 Fiji secara resmi menyatakan dukungan terhadap agenda OCP di hadapan publik internasional sebagai bagian dari ‘*Strategic Partnership of Mutual Respect and Common Development*’ dengan Cina (Strüver 2017). Bentuk dukungan terhadap OCP, Fiji menutup berbagai perwakilannya di Taiwan, dan diakhiri dengan penutupan perwakilan Fiji di Taiwan terkait urusan perdagangan dan pariwisata (Linder 2018). Setelah resmi mendapatkan dukungan Fiji atas OCP, Cina semakin mempererat hubungannya dengan mendukung Fiji di berbagai forum internasional, salah satunya adalah ketika Cina merestui presidensi Fiji pada Pertemuan Puncak PBB soal perubahan

iklim di Jerman tahun 2017 (Zhang 2017). Lebih jauh, agar menjaga dukungan terhadap OCP terus didapatkan dari Fiji, perluasan kemitraan dilakukan oleh Cina dengan menginisiasi pembukaan kerja sama *sister city*, yakni antara kota Jiangmen di Cina dan Lautoka di Fiji (Zhang 2018).

Kemitraan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam upaya mewujudkan OCP, pemerintah Cina terus berbenah tidak hanya secara eksternal tetapi juga dari sisi internal pemerintahannya. Sisi internal yang dimaksud di sini adalah perihal tata kelola pemerintahan. Masalah spesifik yang kerap dihadapi Cina di dalam negeri adalah persoalan korupsi di tubuh pemerintahannya. Korupsi sendiri memang dinilai sebagai suatu tindakan yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Poirson 1998). Pada saat Cina sedang giat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, musuh korupsi harus diatasi. Selain itu, pertumbuhan juga memerlukan dukungan eksternal dan dalam hal ini merangkul Fiji sebagai mitra tidak dapat diabaikan.

Terkait dengan pemberantasan korupsi dan signifikansi Fiji, data dari Salem (2020) menemukan bahwa kawasan Pasifik Selatan (termasuk Fiji) merupakan tempat pelarian atau persembunyian bagi para pejabat pemerintah Cina yang korup. Dengan demikian, melalui penciptaan kerja sama dalam urusan tata kelola pemerintahan dengan Fiji, Cina dapat lebih efisien dan efektif dalam memproses pelaku korupsi yang melarikan diri ke Fiji dengan menerapkan perjanjian ekstradisi. Terbukti, pada tahun 2015 telah disepakati perjanjian ekstradisi antara Fiji dan Cina pasca kunjungan Wakil Menteri Keamanan Publik Cina, Deng Weiping ke Fiji (Bolatiki 2015). Salah satu dampak

nyata dari perjanjian ekstradisi ini dapat dilihat pada peristiwa deportasi 77 tersangka kasus penggelapan dari Fiji untuk diadili di Cina (Hill 2017).

Fiji sebagai negara tempat beberapa organisasi internasional penting bermarkas

Pengakuan atas identitas Cina yang tunggal, yakni Republik Rakyat Cina dan bukan Taiwan merupakan hal yang paling dikejar oleh Cina dalam agenda OCP. Sementara bagi Fiji, negara ini memiliki *bargaining position* yang cukup kuat dan dibutuhkan oleh Cina, yaitu Fiji merupakan *hub* atau penghubung dari berbagai macam organisasi internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral yang memilih bermarkas di negara tersebut. Hal ini tentu menjadikan Fiji sebagai mitra diplomatik yang penting bagi Cina untuk menarik perhatian dunia internasional perihal pengakuan terhadap OCP. Sebagai bukti keseriusan Cina dalam memanfaatkan posisi tawar yang dimiliki Fiji tersebut, Cina yang sedari awal (sebelum kudeta militer 2006) sudah memiliki hubungan kerja dengan berbagai organisasi regional yang bermarkas di Fiji seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Pacific Island Development Forum (PIDF) menjadi semakin aktif dan agresif pasca kudeta militer 2006. Hal ini ditandai dengan pengiriman delegasi resmi pemerintah Cina untuk tiap-tiap organisasi internasional yang ada di Fiji. Sejauh ini, jumlah total diplomat perwakilan Cina yang ada di kawasan Pasifik Selatan secara umum menjadi yang terbanyak dibanding negara besar lainnya seperti AS dan Australia, dimana ini dianggap sebagai peringatan serius bagi AS dan Australia (Wallis 2012).

Secara umum, dengan menjalin hubungan yang baik dan menguntungkan bagi organisasi internasional dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, termasuk Fiji sebagai yang cukup berpengaruh, Cina setidaknya dapat meningkatkan jumlah dukungan terhadapnya di forum PBB secara internasional mengingat jika dikalkulasi secara matematis kekuatan suara voting para negara-negara Pasifik Selatan ini berada pada kisaran angka tujuh persen (Fossen 2012) dan ini sudah cukup untuk mendongkrak posisi Cina dalam upaya mewujudkan agenda OCP.

Citra dan Legitimasi Cina

Kedekatan Cina dan Fiji pasca kudeta militer 2006 menggambarkan betapa Cina ingin mencitrakan diri sebagai negara yang tidak suka mencampuri urusan dalam negeri negara lain bahkan dengan negara mitra sekalipun. Ini tergambar dalam pernyataan resmi pemerintah Cina ketika menyikapi kudeta sebagaimana disampaikan sebelumnya. Kudeta yang terjadi di Fiji disebabkan ketidakpuasan terhadap rezim demokrasi yang kemudian ditumbangkan kekuatan militer. Posisi yang diambil Cina ketika melakukan pendekatan ke Fiji adalah tidak membicarakan proses demokrasi yang terjadi di Fiji pasca kudeta. Posisi ini berbeda dengan negara-negara lain yang cenderung dengan segera mendesak Fiji kembali ke jalur demokrasi. Citra untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain (Fiji) yang dibangun Cina, dijadikan sebagai preferensi kebijakan Cina yang didasarkan pada pengumpulan data dan informasi terkait dinamika internal dan eksternal yang melingkupi negara Fiji pasca kudeta militer 2006.

Delapan bulan sebelum terjadi kudeta militer 2006 atau persisnya pada April 2006 Perdana Menteri Cina Wen Jiabao melakukan kunjungan perdana bersejarah ke Fiji dalam rangka meresmikan *China-Pacific Economic Development and Cooperation Forum* (Zhang 2017). Dengan kata lain, sebelum terjadi kudeta militer 2006 di Fiji, Cina sudah mengambil ancang-ancang untuk menciptakan citra tertentu atas dirinya di hadapan Fiji dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Hal ini sejalan dengan pemaknaan citra yang dapat menjadi variabel untuk menjelaskan dan memahami perilaku negara. Dari momentum tersebut dapat dipahami bahwa pernyataan resmi Cina pasca kudeta militer Fiji 2006 adalah bagian dari upaya melanggengkan citra yang telah dibangun. Cina dapat dikatakan telah memiliki *ally image* yakni kecenderungan untuk bekerja sama dengan mitra yang dianggap dapat saling menguntungkan (Bilali 2010). Fiji dapat menjadi sumber keuntungan bagi Cina dengan mendukung OCP dan memberikan pengaruh yang kuat di kawasan bagi Cina, sementara Fiji mendapatkan keuntungan dari Cina dengan pemberian bantuan luar negeri. Bagi Cina, bantuan luar negeri yang diberikan ini akan berdampak balik kepada dirinya, karena sejatinya bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan citra internasional suatu negara (Intelligent Economist 2019) dan menguatkan legitimasi suatu negara.

Legitimasi melalui Bantuan Luar Negeri

Sebagai landasan dalam membangun legitimasi yang kuat di Fiji yang kemudian dapat menjadi pemicu secara umum terhadap kawasan Pasifik Selatan, Cina dengan kekuatan ekonomi besar dan terus bertumbuh memilih menggunakan

instrumen bantuan luar negeri. Dengan kata lain, bantuan luar negeri digunakan untuk mempromosikan kepentingan negara donor. Dalam hal ini Cina menggunakan bantuan luar negeri untuk mempromosikan agenda OCP di Fiji secara khusus dan Pasifik Selatan secara umum. Di sisi lain, legitimasi Cina atas Fiji melalui bantuan luar negeri ini dapat meningkatkan citra Cina secara internasional.

Secara historis, bantuan luar negeri yang disalurkan oleh Cina sedari awal kepada berbagai negara yang dianggap membutuhkan memang diperuntukkan bagi kepentingan membangun legitimasi (Nowak 2015). Sebagai contoh, pada tahun 1950-an ketika pertama kali Cina menyalurkan dana bantuan luar negeri, sasarannya adalah ke Korea Utara dan Vietnam, dengan tujuan untuk membangun legitimasi sebagai negara komunis yang kuat, setelah Uni Soviet, kepada dua negara komunis yang lebih kecil tersebut. Kemudian, Cina juga menyalurkan bantuan luar negeri ke Kamboja, Nepal, dan Mesir yang bukan negara komunis, namun orientasi politik luar negeri negara-negara tersebut pada dekade 1960-an ke blok Timur. Sampai dengan sekarang, utamanya Kamboja dan Mesir, masih tetap menjalin kerjasama ekonomi dan Cina masih memberikan bantuan luar negerinya. Legitimasi yang ingin dibangun adalah bahwa Cina merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan mampu berkontribusi mendorong kemajuan negara lain yang tak berpaham komunis sekalipun (Zhang & Lawson 2017). Pada akhirnya, bantuan luar negeri Cina mulai masuk ke kawasan Pasifik Selatan dan diterima oleh beberapa negara di kawasan tersebut termasuk Fiji. Secara politik, proses masuknya bantuan luar negeri Cina ke kawasan Pasifik Selatan relatif mudah, karena mulai berkurangnya ketertarikan negara-negara

Barat seperti AS dan Perancis pasca Perang Dingin di kawasan tersebut hingga Australia dan Selandia Baru mengurangi bantuan ekonomi ke Fiji setelah kudeta militer 2006.

Dari kacamata geoekonomi yang oleh Lu et. al. (2017) dimaknai sebagai suatu instrumen bagi negara untuk membangun citra dalam tataran internasional, apa yang dilakukan Cina ini sudah sesuai dengan agenda utama yaitu membangun citra dan legitimasi yang kuat. Fiji sebagai negara utama di kawasan menjadi sasaran utama Cina dan diharapkan menimbulkan efek domino ke negara-negara sekitarnya. Ketika citra dan legitimasi suatu negara sudah terbangun, maka berbagai kepentingan lain akan lebih mudah untuk dicapai. Dalam perspektif Cina kepentingan itu adalah agenda OCP.

Mitra Penyelamat bagi Pasifik Selatan

Kedekatan yang dibangun oleh Cina terhadap Fiji pasca kudeta militer 2006 dapat dimaknai sebagai suatu pesan yang secara tersirat disampaikan Cina bahwa tidak hanya bagi Fiji, tetapi bagi negara lain di kawasan Pasifik Selatan. Jika mereka mendapatkan perlakuan seperti yang dialami Fiji yang dalam hal ini ditinggalkan negara donor tradisional karena peristiwa kudeta dan mereka memerlukan bantuan, maka Cina siap membantu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemerintah Cina bahwa semua negara di kawasan Pasifik Selatan berhak untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Cina dan akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan syarat siap untuk mendukung agenda OCP (Meick et. al. 2018).

Agenda OCP sebagai jangkar utama kepentingan politik di Fiji secara khusus dan Pasifik Selatan secara umum menjadikan Cina terus berupaya memperluas jangkauan

kemitraannya di kawasan. Salah satu yang dilakukan misalnya dengan meningkatkan intensitas kehadirannya dalam berbagai momentum multilateral di kawasan seperti partisipasi aktif dalam menyediakan pendanaan dan bentuk dukungan lainnya bagi PIF, MSG, dan bahkan organisasi sejenis lainnya yang di dalamnya Cina tidak termasuk sebagai anggota atau bahkan pengamat sekalipun (Meick et. al. 2018). Sebagai gambaran aktivitas dan kontribusi Cina dalam berinteraksi dengan organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Keterlibatan Cina dalam Forum Regional

Organisasi Regional	Level Organisasi	Partisipan	Keterlibatan Cina
PIF Post Forum Dialogue (sejak 1989)	Menteri	All PIF members, Canada, Cuba, EU, France, India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Philippines, South Korea, Spain, Thailand, Turkey, UK, US	Mendonasikan dana secara rutin kepada sekretariat PIF dan sejak 2016 melampaui satu juta dolar Amerika
Pacific Islands Development Forum (sejak 2013)	Senior dan Menteri	Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu, Tuvalu, Tokelau, dan Timor Leste	Cina sebagai pengamat non resmi dan menyediakan dukungan finansial untuk pertemuan inagurasi 2013

		Pengamat: Kaledonia Baru, Papua Nugini, Wallis and Futuna, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Pakistan, UK, US	
MSG (sejak 1988)	Senior	Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Fiji dan Kaledonia Baru	Cina mendanai pembangunan gedung sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu
		Pengamat: Indonesia, Timor Leste	Cina mendanai berbagai pertemuan dan menggaji pekerja organisasi
China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum (sejak 2006)	Senior	China, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, and Vanuatu	Cina berfokus pada pengembangan ekonomi delapan negara mitra diplomasi di kawasan

Sumber: Meick, Ethan et al. "China's Engagement in the Pacific Islands: Implications for the United States." *U.S.-China Economic and Security Review Commission*, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana Cina berupaya terlibat aktif dalam berbagai forum di kawasan. Hal ini tentu mengindikasikan Cina yang ingin menjaga kedekatan dengan berbagai negara di kawasan Pasifik Selatan. Jika diperhatikan dengan saksama, Cina lebih menggunakan kemampuan ekonominya sebagai modal utama dibanding kemampuan lain semisal militer atau keamanan.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan makna geoekonomi yang oleh Wigell dan Scholvin (2018) dimaknai sebagai cara negara untuk melakukan politik kekuasaan yang tidak hanya mengacu pada cara militer. Di sisi lain, penggunaan kekuatan ekonomi untuk mencapai agenda politik juga merupakan salah satu tujuan dari geoekonomi sebagaimana disampaikan oleh Vihma (2018) bahwa negara membentuk dan mengelola lingkungan strategis, serta beroperasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan menggunakan aspek ekonomi.

Legitimasi Aspek Sosiokultural-Edukasi

Selain membangun citra dan legitimasi melalui kedigdayaan aliran dana bantuan luar negeri dan penyelamat bagi Fiji dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Cina juga mengisi celah sosiokultural dan edukasi dalam membangun citra dan legitimasinya. Hal ini dikarenakan Cina percaya bahwa instrumen *soft power* seperti sosiokultural dan edukasi dapat menjadi faktor penentu keberhasilan citra negara yang dibentuk untuk kawasan Pasifik Selatan (Peterson 2017). Sebagaimana premis yang disampaikan Hermann (2013) bahwa citra berfungsi untuk membenarkan perlakuan yang diinginkan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Artinya citra yang terbangun akan melegitimasi Cina sebagai bangsa yang memperlakukan Fiji dengan baik karena memperhatikan aspek sosiokultural dan edukasi.

Di sisi lain, aspek sosiokultural dan edukasi ini juga sekaligus menjadi agenda utama dari diplomasi publik yang digencarkan Cina di Fiji dan Pasifik Selatan secara umum. Adapun beberapa hal teknis yang dilakukan Cina di bidang sosiokultural dan edukasi sebagai bentuk penguatan legitimasi

adalah sebagai berikut: (1) mempromosikan budaya Cina, melalui kegiatan kunjungan delegasi budaya Cina ke Fiji dan juga memperluas jangkauan siaran TV publik yang dikelola pemerintah Cina agar dapat diakses masyarakat Fiji dan negara Pasifik Selatan lainnya; (2) meningkatkan jumlah guru pengajar Bahasa Mandarin sekaligus mendirikan *Confucius Institute* dan beberapa institusi serupa di Fiji; (3) memperbanyak jumlah penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan dan melakukan penelitian yang berbasis di Cina bagi penduduk Fiji (Zhang 2007).

Implikasi Peningkatan Bantuan Luar Negeri Cina ke Pasifik Selatan bagi Indonesia

Meningkatnya bantuan luar negeri Cina ke Pasifik Selatan memiliki beberapa implikasi yang signifikan, tidak hanya bagi kawasan tersebut, namun juga peta politik yang ada di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, aspek geopolitik yaitu kondisi ketika bantuan Cina di Pasifik Selatan otomatis meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi Cina di kawasan tersebut. Hal ini dimungkinkan akan berdampak pada Indonesia, yang juga memiliki kepentingan strategis tidak hanya di Indo-Pasifik, namun juga di wilayah Pasifik Selatan terutama terkait dengan aspek pertahanan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama menyangkut isu kemerdekaan Papua. Dengan semakin mendekatnya Cina ke dalam politik kawasan di Pasifik Selatan, tentu yang diinginkan Indonesia adalah tidak semakin memberikan peluang kepada negara-negara kawasan tersebut untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Papua yang

menuntut kemerdekaan dari Indonesia, sebagaimana yang selama ini cenderung terjadi.

Kedua, aspek keamanan regional Indo-Pasifik, pada saat salah satu isu yang paling signifikan adalah terkait dinamika politik di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS (*South China Sea*). Dalam beberapa dekade terakhir Cina memfokuskan politik luar negerinya demi memperoleh rekognisi internasional di LCS, meskipun akhirnya mendorong beberapa negeri memberikan respon balik seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dengan adanya peningkatan bantuan Cina di Pasifik Selatan, tidak semata dilihat dari aspek mengalihkan dukungan negara-negara Pasifik Selatan dari Taiwan ke Cina, namun juga upaya Cina untuk mendapatkan dukungan dalam politik luar negerinya termasuk klaim Cina di kawasan LCS. Klaim Cina ini menciptakan ketegangan di kawasan tersebut, apalagi LCS dan perairan di Pasifik Selatan terhubung melalui laut terbuka sehingga rawan dari sisi keamanan laut dan klaim teritorial. Terlebih klaim Cina di LCS juga tumpang tindih dengan teritori Indonesia di Laut Natuna Utara, meskipun Indonesia bukan merupakan negara klaiman di LCS (Center for International Law NUS, n.d). Oleh karena itu, Indonesia perlu berperan aktif dalam dialog keamanan bersama Cina dan aktor penting lain kawasan sehingga dapat menjamin stabilitas di sekitar LCS

Ketiga, aspek ekonomi dan investasi, yaitu ditandai dengan peningkatan investasi Cina secara masif ke kawasan Pasifik Selatan. Hal ini harus menjadi pertimbangan Indonesia, karena lingkaran konsentris politik luar negeri RI juga menempatkan Pasifik Selatan sebagai salah satu prioritas utama setelah ASEAN. Dengan semakin menguatnya iklim investasi

Cina di kawasan tersebut, maka Indonesia harus merumuskan kembali politik luar negeri dan ekonominya secara moderat karena Indonesia pun akhirnya harus “*head to head*” dengan Cina terkait Pasifik Selatan sebagai pasar dan investasi global potensial. Sejauh ini Indonesia sudah berusaha mengimbangi secara sistematis, sejak mendirikan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) pada tahun 2019 yang salah satunya adalah untuk mengimbangi wacana kemerdekaan Papua di Pasifik Selatan.

Dengan kondisi seperti di atas, tidak bisa dipungkiri jika bantuan luar negeri Cina dapat membawa manfaat bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Namun demikian, Indonesia harus tetap proaktif menjaga kepentingan dan stabilitas di kawasan tersebut di tengah dinamika politik yang ada. Dialog dan kerjasama yang konstruktif dengan negara-negara penting di Pasifik Selatan, khususnya Fiji sebagai negara yang paling berpengaruh harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga bisa mengimbangi Cina secara strategis yang kekuatannya jauh diatas Indonesia.

Simpulan

Dari uraian di atas terlihat bahwa manuver Cina di kawasan Pasifik Selatan secara umum dan pendekatan yang dilakukan ke Fiji setelah kudeta militer 2006 secara khusus adalah melalui pendekatan ekonomi politik dengan bantuan luar negeri. Bantuan ini memiliki motif politik yang ingin dicapai Cina. Sebagai negara yang masih berurusan dengan persoalan kedaulatan, Cina sangat memerlukan dukungan politik dari dunia internasional, terutama menyangkut integrasi Taiwan sebagai satu kesatuan politik dengan Cina daratan. Tidak ada

indikasi Cina merelakan Taiwan berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk mewujudkan ambisi kebijakan satu Cina atau dikenal dengan sebutan *One China Policy*, Cina memerlukan dukungan dari berbagai negara meski dari negara kecil dari kawasan yang kurang diperhitungkan secara ekonomi. Dalam hal ini, pergeseran Fiji yang awalnya memiliki hubungan yang erat dengan Taiwan kemudian bergeser ke Cina terlebih setelah kudeta militer 2006 memiliki arti penting dan strategis bagi Cina. Kepentingan Cina terhadap Fiji tidak lantas berhenti pada urusan politik dan *One China Policy* saja, tetapi berjalan lebih jauh dan teknis pada urusan ekonomi yang kelak bermuara pada agenda *Belt Road Initiatives*.

Selain itu, kudeta militer tahun 2006 yang terjadi di Fiji membuka babak baru dinamika kawasan di negara-negara kepulauan kawasan Pasifik Selatan. Di satu sisi pasca kudeta, Fiji “ditinggalkan” negara besar di kawasan yaitu Australia dan Selandia Baru yang biasanya menjadi donor utama pembangunan Fiji. Di sisi lain, “kepergian” negara-negara besar tersebut digantikan Cina yang terlihat sigap dan agresif dalam merangkul Fiji. Faktanya memang hubungan kemitraan antara Fiji dan Cina sudah terjalin jauh sebelum kudeta 2006 berlangsung, akan tetapi pasca kudeta Cina justru meningkatkan kedekatannya secara signifikan. Padahal, di atas kertas, jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara Fiji dan Tiongkok dari berbagai sisi, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemajuan ekonomi.

Cina ingin membangun citra yang positif di kawasan Pasifik Selatan dan membangun legitimasi untuk ikut andil dalam pembangunan di kawasan. Citra yang ingin dibangun

adalah pandangan bahwa negara ini tidak mencampuri urusan-urusan domestik negara lain dan tidak mengaitkan bantuan luar negeri kebijakan domestik suatu negara. Upaya membentuk citra ini dalam rangka membangun legitimasi Cina di Fiji dan kawasan Pasifik Selatan. Citra diri sebagai “penyelamat” dengan Fiji sebagai contoh juga sangat mungkin terjadi di negara-negara lain di kawasan tersebut. Selain itu, manuver Cina di Fiji dan kawasan untuk menegaskan bahwa kehadiran Cina bukan sebagai ancaman, namun justru sebagai bagian untuk memberikan solusi atas negara yang menghadapi masalah.

Semakin intensifnya diplomasi Cina di kawasan Pasifik Selatan harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, karena dari kawasan ini dukungan terhadap separatisme di Papua berasal. Meskipun dalam kenyataannya Cina mengakui integritas teritorial Indonesia termasuk Papua di dalamnya, namun relasi antara Indonesia dengan Cina terkait dengan wilayah masih menyisakan masalah terutama di kawasan Laut Natuna Utara. Cina tentu mengharapkan dukungan timbal balik dari kawasan Pasifik Selatan tidak hanya pergeseran dari Taiwan ke Cina, namun juga kebijakan-kebijakan luar negerinya termasuk menyangkut Laut Cina Selatan.

Daftar Pustaka

- Bilali, Rezarta, 2010. “Assessing the Internal Validity of Image Theory in the Context of Turkey-U.S. Relations.” *International Society of Political Psychology*, 2010.
- Bolatiki, Maika, 2015. Fiji-China Extradition Law Focus”. 12 September [online]. dalam <https://fijisun.com.fj/2015/09/12/fiji-china-extradition-law-focus/> [diakses 7 Juli 2021].

- Center for Internasional Law National University of Singapore.
n.d. Why Indonesia Has take in Fight to Defend
UNCLOS. dalam <https://cil.nus.edu.sg/publication/why-indonesia-has-stake-in-fight-to-defend-unclos/> [diakses
15 April 2025]
- Chang, Shao, 2014. "Mutual Use: the Relationship Between
Yiguandao and the Ruling Political Forces." *Communications and Humanities*.
- China MFA, 2006. "Briefings by Qin Gang, Spokesperson of
China's Ministry of Foreign Affairs at the Routine Press
Conference" 7 Desember [online]. dalam http://se.china-embassy.gov.cn/eng//fyrth/200612/t20061208_2876838.htm [diakses 8 April 2021]
- China Military Online, 2016. "PLA Navy Training Ship
Zhenghe Berths at Port of Suva in Fiji," 12 December
[online]. dalam http://eng.chinamil.com.cn/view/2016-12/12/content_7403360.htm [diakses 7 Juli 2021]
- Fossen, A. V, 2012. "Aid Competition Between China and
Taiwan in the Pacific Islands", in Kim, H. And Potter D.
M. (eds), *Foreign Aid Competition in Northeast Asia*.
Virginia: Stylus Publishing LLC.
- Herrmann, Richard K., 2013. "Perceptions and Image Theory in
International Relations." *The Oxford Handbook of
Political Psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Hill, Bruce, 2017. "Dozens of Chinese fraud suspects deported
from Fiji arrived handcuffed, in hoods." 8 Agustus
[online]. dalam <https://www.abc.net.au/news/2017-08-08/chinese-suspects-deported-from-fiji-arrive-hooded-and-handcuffed/8786080> [diakses 7 Juli 2021].

- Intelligent Economist, 2019. "Types of Foreign Aids" [online]. dalam <https://www.intelligenteconomist.com/foreign-aid/> [diakses 19 Oktober 2019].
- Jacques, Martin, 2011. *When China Rules the World*. London: Penguin Books.
- Kan, Shirley A, 2014. "China/Taiwan: Evolution of the "One China" Policy – Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei." *Congressional Research Service Report*. 10 October [online]. dalam <https://sgp.fas.org/crs/row/RL30341.pdf> [diakses 7 Juli 2021]
- Levick, E., 2018. 'Foreign aid and strategic competition in the South Pacific', *Global Risk Insights* [online], <https://globalriskinsights.com/2018/03/foreign-aid-competition-south-pacific/> [accessed 12 April 2025]
- Linder, A., 2018. "Fiji unceremoniously shuts down representative office in Taipei to better reallocate resources", May 17. *Shanghaiist*.
- Lu, Dadao, Mingxing Chen , dan Yi Liang, 2019. "The Spatial Evolution of Geoeconomic Pattern among China and Neighboring Countries since the Reform and Opening-Up." *MDPI* [online]. dalam <https://doi.org/10.3390/su11072168> [diakses 21 Juli 2021]
- Mauna, Boer, 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Meick , Ethan, Michelle Ker, dan Han May Chan, 2018. "China's Engagement in the Pacific Islands: Implications for the United States." U.S.-China

- Economic and Security Review Commission [online]. dalam <https://www.uscc.gov/research/chinas-engagement-pacific-islands-implications-united-states> [diakses 21 Juli 2021]
- Nowak, W., 2015. “China’s Development Aid Strategies”, *Chinese Business Review*, 28(4), April: 201–209 [online]. dalam <https://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Article/index/?id=14714.html> [diakses 12 April 2025]
- Peterson, Rachele, 2017. “Outsourced to China: Confucius Institutes and Soft Power in American Higher Education,” National Association of Scholars, April [online]. dalam <https://eric.ed.gov/?id=ED580866> [diakses 30 Juli 2021]
- Poirson, H., 1998. “Economic Security, Private Investments, and Growth in Developing Countries”, *IMF Working Paper* 98/4. Washington DC: International Monetary Fund [online]. dalam <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9804.pdf> [diakses 13 April 2025]
- Roberge, M. & Youkyung, Lee, 2011. “China-Taiwan Relations”. Council on Foreign Relations Background.
- Salem, Saber, 2020. Chinese Foreign Aid to Fiji: Threat or Opportunity. *China Report*, 56(2), May: 242-258 [online]. dalam <https://doi.org/10.1177/0009445520916875> [diakses 2 Agustus 2021]
- Stringer, K., 2006. “Pacific Island Microstates: Pawns or Players in Pacific Rim Diplomacy?” *Diplomacy & Statecraft*, 17(3): 547-577 [online]. dalam

- <https://doi.org/10.1080/09592290600867636> [diakses 25 Juli 2021]
- Strüver, G., 2017. "China's Partnership Diplomacy: Internasional Alignment Based on Interests or Ideology" *The Chinese Journal of International Politics*, 10(1): 31-45 [online]. dalam <https://doi.org/10.1093/cjip/pow015> [diakses 25 Juli 2021]
- Tarte, Sandra, 2010. "Fiji's look north strategy and the role of China. In *China in Oceania: Reshaping the Pacific?*" Foundations in Asia Pacific Studies. New York: Berghahn Books, 118-132.
- Thontowi, Jawahir & Iskandar, Pranoto, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Vihma, Antto, 2018. "Goeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak." *Geopolitics*, 23(1) [online]. dalam <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1302928> [diakses 23 Maret 2021]
- Wang, Zhen, 2014. "China's Bilateral Aid to the South Pacific Region: A Constructivist Analysis." Thesis, Victoria University of Wellington [online]. dalam https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/thesis/China_s_Bilateral_Aid_to_the_South_Pacific_Region_A_Constructivist_Analysis/17007688?file=31461112 [diakses 30 Maret 2021]
- Wesley-Smith, Terence, and Porter, Edgar A., (2010). *China in Oceania: Reshaping the Pacific*. New York and Oxford: Berghahn Books.
- Wigell, Mikael, dan Sören Scholvin, 2018. "Geo-Economics as Concept and Practice in International

- Relations: Surveying the State of the Art.” *Finnish Institute of International Affairs*. April/102 [online]. dalam https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2018/04/wp102_geo-economics_oikea_issn.pdf [diakses 12 April 2025]
- Willis, Joanne, 2012. The South Pacific: Microcosm of Future US – China Competition? *E-International Relations*. September 19 [online]. dalam <https://www.e-ir.info/2012/09/19/the-south-pacific-microcosm-of-future-us-china-competition/> [diakses 12 April 2025]
- Zhang, Denghua, and Stephanie Lawson, 2017. “China in Pacific Regional Politics”, *The Commonwealth Journal of International Affairs and Policy Studies*, 106(2):197–206 [online]. dalam <https://doi.org/10.1080/00358533.2017.1296705> [diakses 11 April 2025]
- Zhang, Denghua, 2018. “China, India, and Japan in the Pacific: Latest Developments, Motivations, and Impact”, ANU College of Asia and the Pacific, (6) [online]. dalam <https://researchportalplus.anu.edu.au/en/publications/china-india-and-japan-in-the-pacific-latest-development-motivatio> [diakses 13 April 2025]
- Zhang, Jian, 2015. “China’s Role in the Pacific Island Region” *Regionalism, Security, and Cooperation in Oceania*. Honolulu: University of Hawai’i at Manoa, 43-56 [online]. dalam <https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2015/08/C3-China-Pacific-Zhang.pdf> [diakses 12 April 2025]

Zhao, C & Hao, Y., 2013. “Xi Jinping met with Fijian Prime Minister Bainimarama” *People’s Daily* [online]. dalam http://losangeles.china-consulate.gov.cn/eng/topnews/201705/t20170519_4296210.htm [diakses 8 April 2025]

BAGIAN II: KEAMANAN MANUSIA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL

Mengintegrasikan Keamanan Manusia Dalam Kebijakan ASEAN

Vinsensio Dugis

Pendahuluan

Secara konseptual, keamanan manusia (*human security*) adalah suatu pendekatan keamanan yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mendasar manusia dari berbagai bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional, dengan menggeser fokus keamanan dari negara ke individu (Nasu, 2013). Pendekatan ini memastikan manusia terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kungkungan memenuhi keinginan (*freedom from want*), yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa sebagai individu manusia dapat hidup bertarbat, bebas dari ancaman kekerasan, kemiskinan, penyakit, serta berbagai bentuk ancaman lainnya (Frerks & Goldewijk, 2007).

Sebagai suatu konsep, keamanan manusia pertamakali dirumuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang dituangkan dalam dokumen Human Development Report 1994 (UNDP, 1994). Di dalam dokumen ini, keamanan manusia didefinisikan sebagai berikut:

Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life—whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development (UNDP, 1994; 23) [Keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama. Pertama, keamanan

berarti keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, keamanan berarti perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Ancaman semacam itu dapat terjadi di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional].

Dari definisi itu, terlihat jelas bahwa konsep keamanan manusia adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa keamanan tidak hanya tentang keamanan negara, tetapi juga tentang keamanan individu dan masyarakat. Keamanan manusia berpusat pada manusia dengan fokus utama melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia dari berbagai ancaman. UNDP juga menggarisbawahi empat poin penting terkait konsep keamanan manusia. Pertama, keamanan manusia bersifat universal yang artinya berlaku untuk semua orang di mana pun berada. Kedua, berpusat pada manusia dimana prioritas utama adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu. Ketiga, dimensinya saling bergantung yang merujuk pada premis bahwa keamanan manusia tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional, regional, dan global. Keempat, pencegahan dini yang menekankan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya ancaman, termasuk ancaman yang tidak konvensional, seperti kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim merupakan hal penting terkait keamanan manusia, oleh karena keamanan manusia lebih mudah dipastikan melalui pencegahan dini daripada intervensi di kemudian hari (UNDP, 1994; 22-23).

Penekanan terhadap empat poin itu, dengan demikian memperlihatkan bahwa konsep keamanan manusia juga menitikberatkan pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial,

dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan manusia sebagai suatu pendekatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keamanan harus berubah dalam dua sisi secara bersamaan; dari penekanan eksklusif pada keamanan teritori menjadi penekanan yang jauh lebih besar pada keamanan masyarakat, dan, dari keamanan melalui persenjataan hingga keamanan melalui pembangunan manusia berkelanjutan (UNDP, 1994; 24). Dengan begitu, maka sumber ancaman bagi keamanan manusia semakin luas spektrumnya. Gagasan keamanan manusia didasarkan pada asumsi yang lebih luas bahwa keamanan negara tidak sama dengan melindungi wilayah negara dan penduduknya. Untuk itu, UNDP mengklasifikasikan spektrum sumber ancaman terhadap keamanan manusia ke dalam tujuh kategori utama (UNDP, 1994; 24-25) yaitu; keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan individu (*personal security*), keamanan masyarakat (*community security*), dan keamanan politik (*political security*).

Sejak diperkenalkan oleh UNDP, keamanan manusia sebagai suatu pendekatan telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan negara dan organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadi pendukung penting penggunaan pendekatan keamanan manusia, dengan memasukkannya ke dalam berbagai dokumen penting PBB pasca-UNDP Report tahun 1994. Salah satu yang monumental, misalnya, ketika pendekatan keamanan manusia masuk ke dalam proposal reformasi tahun 2004 yang dituangkan oleh PBB dengan judul “A More Secure World: Our Shared Responsibility”/“Dunia yang Lebih Aman: Tanggung Jawab

Bersama Kita” (United Nations, 2004; lihat juga, McCormack, 2007; Wählisch, 2014)). PBB juga semakin menekankan pendekatan yang berpusat pada masyarakat, mengintegrasikan keamanan manusia ke dalam operasi perdamaian dan strategi manajemen krisis (Benedek, 2011; MacFarlane, 2014; (Hunt & Sharland, 2019). Demikian juga, sejumlah negara seperti Jepang, Norwegia, dan Kanada telah menjadikan keamanan manusia sebagai landasan kebijakan luar negerinya (Krause, 2013). Kanada, Norwegia, dan Swiss, bahkan secara bersama-sama membangun jaringan keamanan manusia (human security network) dimana jaringan ini mempromosikan keamanan manusia sebagai tujuan kebijakan luar negeri dan mengadvokasi perlindungan individu di forum internasional (Oberleitner, 2013). Tidak berhenti di situ, berbagai unsur masyarakat sipil juga semakin luas memberi perhatian terhadap dimensi-dimensi keamanan manusia (Black, 2014). Sementara tanggung jawab atas perdamaian, keamanan, dan perlindungan manusia berada di tangan pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga telah menunjukkan kapasitasnya untuk melengkapi upaya pemerintah dalam perdamaian dan keamanan. Oleh karena pengetahuan dan ketrampilan OMS yang mendalam tentang konteks dan keahlian dalam bekerja sama dengan masyarakat, banyak pemimpin politik di dunia telah menyadari kekuatan OMS dalam mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik (Eze, 2016).

Sebagaimana halnya organisasi-organisasi internasional lainnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) juga telah mengadopsi pendekatan keamanan manusia di dalam berbagai kebijakannya (Pitsuwan & Caballero-Anthony, 2014). Adalah

suatu kenyataan bahwa keamanan manusia telah menjadi pusat kebijakan keamanan di masing-masing negara di Asia Tenggara dan dalam kebijakan keamanan regional dalam ASEAN (Nishikawa, 2010). Bab ini berfokus melihat berbagai upaya yang telah dilakukan ASEAN untuk mengintegrasikan aspek keamanan manusia ke dalam sejumlah kebijakannya, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN, termasuk implikasinya terhadap Indonesia. Untuk itu, bab ini dibagi ke dalam beberapa sub-bagian berikut; langkah ASEAN mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia ke dalam agenda-agenda ASEAN dan apa saja inisiatif-inisiatif ASEAN, komponen-komponen kunci agenda keamanan manusia ASEAN, tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mengintegrasikan agenda keamanan manusia, serta implikasinya bagi Indonesia, dan bagian simpulan sebagai penutup.

Langkah Pengintegrasian Pendekatan Keamanan Manusia ASEAN

Sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, ASEAN secara bertahap telah mengintegrasikan keamanan manusia ke dalam banyak agendanya, meskipun proses ini tentu saja tidak mudah karena keamanan manusia pada dasarnya bersifat multidimensi sehingga dalam proses pengintegrasiannya menghadirkan sejumlah tantangan tersendiri. Kompleksitas isu-isu global dan regional semakin beragam dan mekanisme-mekanisme lama ASEAN juga dituntut untuk mampu beradaptasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Melly Caballero-Anthony, walaupun informalitas boleh jadi hanya mempunyai sedikit keberhasilan

dalam mengelola isu-isu regional tertentu di masa lalu, ASEAN dituntut untuk mengkalibrasi ulang proses-proses informalnya dan menjadikan ASEAN lebih sesuai dengan tujuannya di dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang semakin kompleks, karena hal ini dianggap lebih mendesak dari sebelumnya (Caballero-Anthony, 2022). Secara umum, masuknya elemen-elemen pendekatan keamanan manusia di dalam beragam agenda-agenda ASEAN, secara perlahan mulai terlihat setelah ASEAN tuntas melakukan proses regionalisasi atau perluasan keanggotaan dari yang awalnya lima negara menjadi sepuluh negara anggota pada akhir 1990-an. Hal ini tentu saja dapat dipahami karena bertambahnya anggota ASEAN, dengan sendirinya menghadirkan semakin beragam isu keamanan non-tradisional (Caballero-Anthony & Gong, 2020).

Proses pengintegrasian elemen-elemen keamanan manusia ini selanjutnya semakin terlihat bersamaan dengan proses ‘institusionalisasi’ ASEAN yang dalam konteks ini dipahami sebagai proses pergeseran mekanisme kerja kelembagaan ASEAN yang sedari awal hanya mengandalkan mekanisme *consensus model* ke suatu level mekanisme institusional yang lebih terlembaga, ditandai dengan penandatanganan ASEAN Charter pada tahun 2007 yang setahun kemudian, tahun 2008, berhasil diratifikasi oleh kesepuluh negara anggota ASEAN. Meskipun ASEAN Charter tidak secara eksplisit menyebut diksi keamanan manusia (human security), pengadopsian ASEAN Charter jelas membentuk kerangka kerja regional yang juga di dalamnya termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental manusia lainnya. Bahkan, pasal 14 ASEAN Charter mengamanatkan pembentukan Badan Hak

Asasi Manusia ASEAN untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia (Assosiation of Southeast Asian Nations, 2008). Komitmen ini menggarisbawahi pengakuan ASEAN terhadap pentingnya hak asasi manusia dalam kerangka stabilitas dan pembangunan regional. Hal ini sejalan dengan konsep yang lebih luas yaitu melindungi orang dari ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan, elemen penting yang terkait dengan substansi pendekatan keamanan manusia, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

Secara umum, terdapat setidaknya tiga parameter yang bisa dilihat sebagai bukti proses pengintegrasian pendekatan keamanan manusia ke dalam kerangka kerja ASEAN yaitu, pengadopsian diksi keamanan manusia, mekanisme institusional yang dikembangkan intra-ASEAN, dan hadirnya berbagai isu terkait agenda keamanan non-tradisional dalam ASEAN. Berseiring dengan perkembangan ASEAN, melalui ketiga parameter inilah semakin terlihat elemen-elemen penting pendekatan keamanan manusia masuk menjadi bagian di dalam beragam agenda ASEAN.

Dalam konteks pengadopsian diksi, ASEAN telah secara resmi mengadopsi diksi keamanan manusia dan perlindungan manusia, yang mencakup hak asasi manusia, pencegahan kekejaman massal, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata (Morada, 2016; Morada, 2019a). Pergeseran ini merupakan bagian dari langkah yang lebih luas menuju regionalisme yang berpusat dan berorientasi pada masyarakat (people-oriented), sebagaimana yang menjadi sorotan utama dalam Bali Concord II tahun 2003 (Morada, 2019b). Sebagaimana diketahui, Bali Concord II, yang ditandatangani ASEAN pada tahun 2003, memasukkan konsep keamanan

manusia dalam kerangkanya, khususnya melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Konsep ini mengakui bahwa keamanan manusia terkait erat dengan keamanan nasional, dan bahwa kesejahteraan individu sangat penting bagi stabilitas regional. Selanjutnya, di dalam dokumen Bali Concord II, ASEAN menegaskan bahwa keamanan nasional dan keamanan manusia saling terkait dan saling memperkuat. Artinya, upaya penguatan keamanan nasional juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Komunitas Keamanan ASEAN, sebagaimana diuraikan dalam Bali Concord II, mencakup pandangan keamanan yang komprehensif, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Association of Southeast Asian Nations, 2003). Pendekatan yang luas ini mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk kemiskinan, penyakit, dan kerusakan lingkungan.

Parameter kedua terkait bukti masuknya pendekatan keamanan manusia ke dalam agenda kebijakan ASEAN ialah mekanisme institusional yang dikembangkan intra-ASEAN. Selepas ratifikasi ASEAN Charter pada tahun 2008, banyak mekanisme institusi yang dibentuk dan dikembangkan intra-ASEAN sesuai amanat ASEAN Charter untuk menangani berbagai isu, terutama yang terkait dengan isu-isu keamanan non-tradisional. Salah satu yang signifikan dan terkait secara langsung dengan pendekatan keamanan manusia ialah pembentukan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) dimana ini dilihat sebagai perkembangan kelembagaan yang signifikan. Badan ini

dibentuk karena demokratisasi di negara-negara regional utama dan dorongan untuk integrasi regional di bawah agenda Komunitas ASEAN (Ryu & Ortuose, 2014).

Kehadiran AICHR jelas mencerminkan norma-norma regional baru seperti tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, yang kondusif bagi pengembangan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Ryu dan Ortuose (2014) berargumen bahwasanya AICHR merupakan hasil dari dua faktor yaitu fenomena demokratisasi di negara-negara utama ASEAN dan upaya intensifikasi integrasi regional melalui inisiatif pembentukan Komunitas ASEAN. Faktor pertama melahirkan agen-agen utama untuk inisiatif-inisiatif pro-hak asasi manusia dan menetapkan arah pengembangan hak asasi manusia di ASEAN. Sementara faktor kedua melemahkan norma-norma lama ASEAN Way dan melahirkan norma-norma regional baru seperti tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, yang tentu saja semakin kondusif bagi pengembangan hak asasi manusia.

Selain AICHR, berbagai badan sektoral yang berada di bawah Komunitas Keamanan Politik ASEAN (ASEAN Political Security Community/APSC) menangani isu-isu spesifik seperti kejahatan transnasional, perdagangan narkoba, dan pengelolaan perbatasan. Di samping itu, ada juga Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian (ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security) dan ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) yang adalah suatu pencatatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang wanita-wanita di ASEAN yang terlibat dalam upaya perdamaian dan keamanan. Kesemuanya berkontribusi pada keamanan manusia, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan pembangunan perdamaian.

Hadirnya berbagai isu keamanan non-tradisional dalam berbagai agenda ASEAN merupakan bukti ketiga masuknya pendekatan keamanan manusia. ASEAN telah memperluas mandat keamanannya untuk mencakup isu-isu keamanan non-tradisional, yang meliputi ancaman transnasional dan non-militer seperti isu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konseptualisasi keamanan yang lebih luas ini sejalan dengan prinsip-prinsip keamanan manusia yang berfokus pada perlindungan individu dan bukan hanya negara (Koh, 2012). ASEAN kini menangani sejumlah isu keamanan non-tradisional, termasuk kejahatan transnasional, penanggulangan terorisme, dan pengelolaan perbatasan. Secara khusus, isu-isu ini mencakup penyelundupan senjata, pergerakan orang secara ilegal, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, pencucian uang, dan perdagangan narkoba ilegal. Selain itu, ASEAN juga menyadari semakin pentingnya keamanan siber, termasuk membangun mekanisme formal untuk kerja sama.

Banyak contoh yang dapat diangkat untuk membuktikan semakin banyaknya isu-isu keamanan non-tradisional yang ditangani dalam kerangka kerja sama ASEAN. ASEAN telah mengakui pandemi sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang signifikan, dan mendorong kerja sama regional untuk mengelola krisis tersebut. Masalah-masalah seperti pandemi telah mendorong ASEAN untuk memperdalam kerja sama keamanan regional (Caballero-Anthony, 2008). Pandemi COVID-19, khususnya, menyoroti perlunya mekanisme dan kerja sama kesehatan regional yang kuat (Kliem, 2021). Meskipun terdapat beberapa kelemahan, sekuritisasi isu kesehatan merupakan langkah strategis untuk memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif (Azmi, et al.,

2021). Terkait isu perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya, ASEAN telah melaksanakan operasi seperti Operasi Maharlika III (Operation Maharlika III) dan Operasi HAECHI-I (Operation HAECHI-I) untuk memerangi perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya dimana upaya-upaya ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas batas (Sundram, 2024). Untuk mengatasi kejahatan transnasional, ASEAN telah menekankan perlunya kerja sama multilateral dan penerapan hukum internasional melalui kerangka kerja seperti Bantuan Hukum Timbal Balik- Mutual Legal Assistance/MLA (Syafrialdi, et al., 2022).

Isu keamanan non-tradisional lain yang juga telah menjadi perhatian ASEAN adalah isu lingkungan lintas batas (transboundary environmental issues). ASEAN telah memperluas mandat keamanannya untuk mencakup isu lingkungan, dengan mendorong kebijakan yang mengatasi tantangan lingkungan lintas batas dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Koh, 2012). Selanjutnya isu-isu yang terkait migrasi dan keamanan perbatasan (migration and border security) terutama yang terkait pengendalian migrasi. Sebagai respons terhadap ancaman keamanan non-tradisional seperti kejahatan transnasional dan terorisme, ASEAN telah mendukung inisiatif seperti patroli perbatasan trilateral dan lembaga pertahanan multilateral untuk meningkatkan kerja sama imigrasi regional dan keamanan perbatasan (Low, 2019).

Sebagaimana juga telah disinggung dalam parameter pertama, ASEAN telah memasukkan keamanan manusia ke dalam agendanya, menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, pencegahan kekejaman massal, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, meskipun norma-norma tradisional

tentang kedaulatan dan non-intervensi masih menimbulkan tantangan (Morada, 2019a). Adapun terkait perubahan iklim, ASEAN mengakui perubahan iklim sebagai isu keamanan non-tradisional yang kritis yang mengancam stabilitas dan keamanan regional. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mengelola kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan (Sundram, 2024). Menggunakan tiga parameter di atas, maka tampak jelas sejumlah contoh yang menjadi bukti bahwa pendekatan keamanan manusia telah diadopsi ASEAN ke dalam berbagai agendanya, terutama semenjak ASEAN melewati proses institusionalisasi melalui pengadopsian ASEAN Charter pada tahun 2007.

Komponen Kunci Agenda Keamanan Manusia ASEAN

Agenda keamanan manusia ASEAN mencakup berbagai isu yang ditujukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu di negara-negara anggotanya. Komponen kunci pertama agenda keamanan manusia ASEAN adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, ASEAN telah mengintegrasikan hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata ke dalam agendanya. Ini termasuk pencegahan kekejaman massal dan promosi prinsip tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect/R2P), meskipun norma-norma tradisional kedaulatan dan non-intervensi sebagian masih menjadi tantangan.

Komponen kunci berikutnya adalah isu-isu keamanan non-tradisional. ASEAN telah memperluas mandat keamanannya untuk menangani masalah keamanan non-

tradisional seperti masalah lingkungan lintas batas, penanggulangan bencana, kemiskinan, penyakit, kejahatan transnasional, dan perdagangan manusia. Masalah-masalah ini semakin diakui, termasuk dalam hal ini oleh ASEAN, sebagai isu-isu yang penting bagi keamanan manusia (Nishikawa, 2010). Dalam kaitannya dengan itu, Brendan Howe dan Min Joung Park berargumen bahwa di dalam ASEAN, telah terjadi evolusi bertahap dalam pembuatan kebijakan dan praktik-praktik yang mencerminkan konseptualisasi yang lebih berpusat pada manusia. Akibatnya, dalam hal kepatuhan terhadap universalisme dan norma-norma kemanusiaan, ASEAN tidak terlalu berbeda daripada yang umumnya diasumsikan sebelumnya (Howe & Park, 2017). Dalam wacana ASEAN, terminologi “berorientasi pada manusia” (*people oriented*) dan “berpusat pada manusia” (*people-centred*) cenderung digunakan dalam kaitannya dengan jenis ancaman seperti bencana, kemiskinan, masalah lingkungan, penyakit, kejahatan transnasional, perdagangan manusia. Sejak diadopsinya Bali Concord II pada tahun 2003, ASEAN telah bergeser ke arah pendekatan yang lebih berpusat dan berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini mencakup penegakan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, yang sangat penting untuk membangun Komunitas ASEAN. Dengan demikian, berbagai isu keamanan non-tradisional menjadi bagian kunci dari agenda-agenda pokok ASEAN.

Sebagaimana sudah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, ASEAN telah bergeser ke arah pendekatan yang lebih berpusat dan berorientasi pada rakyat, terutama sejak diadopsinya Bali Concord II pada tahun 2003. Oleh karena itu, isu-isu terkait penegakan tata pemerintahan yang baik,

demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, juga mulai menjadi bagian dari komponen kunci pendekatan keamanan manusia ASEAN yang sekaligus semakin dilihat sebagai elemen penting untuk membangun Komunitas ASEAN (Howe & Park, 2017).

Komponen kunci berikutnya terkait keamanan lingkungan (*environmental security*). Agenda keamanan manusia ASEAN juga menekankan pentingnya lingkungan alam yang sehat bagi generasi mendatang. Ini termasuk mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan (Koh, 2012). Agenda-agenda ASEAN terkait lingkungan alam yang sehat berfokus pada berbagai inisiatif untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan. ASEAN mendorong kerja sama regional terkait konservasi, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pengelolaan limbah (Shaari, et al., 2024). Sejumlah contoh dapat disebutkan di sini seperti halnya ASEAN yang telah aktif dalam mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati laut melalui berbagai program seperti ASEAN ENMAPS --yang merupakan proyek konservasi laut lima tahun yang difokuskan pada peningkatan jaringan Area Lindung Laut (MPA) dan perikanan berkelanjutan di negara-negara ASEAN—serta ASEAN Heritage Parks, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas laut dan melindungi ekosistem. ASEAN juga mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat dan lingkungan.

Komponen selanjutnya terkait keamanan kesehatan (*health security*). Agenda ASEAN mengenai kerja sama

keamanan kesehatan berfokus pada penguatan kesiapsiagaan dan respons regional terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, khususnya penyakit menular baru dan penyakit zoonosis. Pencantuman hak kesehatan, khususnya bagi pekerja migran, merupakan aspek penting dari agenda keamanan manusia ASEAN. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk mengintegrasikan para migran ke dalam sistem jaminan kesehatan universal di seluruh negara anggota, dengan mengakui pentingnya jaminan kesehatan bagi semua individu (Guinto, et al., 2015). Prirotas-prioritas dapat ditemukan pada misalnya upaya memperkuat sistem kesehatan dan membangun ketahanan terhadap pandemi, penyakit menular, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat lainnya. Selanjutnya, penyediaan akses ke perawatan kesehatan berkualitas dan memastikan perlindungan risiko finansial, mendorong perilaku sehat dan mencegah penyakit kronis melalui kampanye kesehatan masyarakat dan inisiatif kebijakan, dan penerapan langkah-langkah untuk mencegah penyakit bawaan makanan dan memastikan keamanan pasokan makanan.

Untuk mendukung optimalisasi capaian pada komponen-komponen kunci di atas, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama telah mengadopsi langkah-langkah membangun kepercayaan, diplomasi preventif, dan strategi penyelesaian konflik untuk mengelola konflik regional. Upaya-upaya ini dipengaruhi oleh norma-norma eksternal dan bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan status ASEAN sebagai lembaga keamanan yang kooperatif (Katsumata, 2011). Agenda pendukung lainnya mencakup upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan individu secara menyeluruh. Hal

ini melibatkan penanganan kesenjangan sosial-ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara merata. ASEAN juga telah bertekad untuk meningkatkan kapasitas dalam menanggapi krisis kemanusiaan, termasuk menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para pengungsi, memastikan akses terhadap layanan dasar, dan memfasilitasi pemulangan serta pemukiman kembali para pengungsi dan pengungsi internal secara aman dan tertib.

Beberapa contoh bisa dilihat dari upaya ASEAN membangun kembali masyarakat yang terkena dampak konflik, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kelembagaan, dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi. ASEAN menekankan pentingnya mempromosikan perdamaian dan mengurangi ketegangan antar-komunitas melalui pertukaran pendidikan, reformasi kurikulum, dan upaya rekonsiliasi. Terkait dengan itu, ASEAN juga berupaya membangun mekanisme untuk memobilisasi sumber daya guna mendukung pembangunan perdamaian pascakonflik, termasuk melalui kerja sama dengan negara donor dan lembaga internasional. ASEAN mengakui peran penting perempuan dalam proses perdamaian dan telah mengembangkan Rencana Aksi Regional untuk menangani masalah perempuan, perdamaian, dan keamanan. Dengan demikian, pendekatan ASEAN terhadap keamanan melampaui pertimbangan militer tradisional hingga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan, dengan menekankan pendekatan komprehensif dan terpadu untuk membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh.

Secara umum dapat digarisbawahi bahwa komponen kunci agenda keamanan manusia ASEAN berfokus pada hak

asasi, isu-isu keamanan non-tradisional, pendekatan yang berfokus pada manusia, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, resolusi konflik dan diplomasi, serta pembangunan ekonomi-sosial.

Tantangan-Tantangan ASEAN

ASEAN menghadapi sejumlah tantangan dalam mengadopsi pendekatan keamanan manusia, terutama karena fokusnya yang secara historis berpusat pada negara dan potensi konflik interpretasi pendekatan keamanan manusia dengan prioritas nasional. Selain itu, kompleksitas dalam menyeimbangkan keamanan manusia dengan stabilitas nasional dan menjaga perdamaian antarnegara, bersama dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional, menghadirkan rintangan yang signifikan. Penekanan ASEAN secara tradisional pada kedaulatan negara dan integritas teritorial dapat berbenturan dengan pendekatan keamanan manusia, yang mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan keengganan untuk memasukkan keamanan manusia secara eksplisit ke dalam kerangka ASEAN. Secara garis besar, tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN dapat dikategorikan dalam penjelasan berikut.

Tantangan pertama bersifat struktural karena bersumber dari pada karakteristik ASEAN sendiri yaitu prinsip non-intervensi. Kepatuhan ASEAN terhadap prinsip non-intervensi terkait urusan dalam negeri negara anggota, seringkali justru mempersulit penerapan pendekatan keamanan manusia yang dalam banyak hal justru memerlukan intervensi terhadap masalah dalam negeri manakala berusaha melindungi individu (Khoirunnisa, 2023). Tantangan struktural ini juga terkait

dengan fondasi kelembagaan ASEAN yang belum sepenuhnya terlembaga, sehingga sulit untuk mengukur dan mengembangkan kerja sama keamanan secara efektif. Kelemahan ini menghambat kemampuan kawasan untuk menangani keamanan manusia secara komprehensif.

Tantangan kedua berdimensi politik. Ketegangan geopolitik semisal karena kebangkitan Tiongkok dan konflik teritorial yang belum terselesaikan seperti halnya di Laut Cina Selatan, menciptakan lingkungan geopolitik yang kompleks yang mengalihkan perhatian dari prioritas keamanan manusia (Caballero-Anthony, 2022). Sementara terkait isu HAM, ASEAN telah berjuang keras untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh kawasan, yang merupakan komponen inti dari keamanan manusia. Pembentukan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN belum menghasilkan mekanisme hak asasi manusia yang kuat (Hadiprayitno, 2019).

Tantangan selanjutnya dapat ditemukan pada tingkat operasional. Dalam kaitannya dengan ancaman keamanan transnasional, isu-isu seperti pandemi, terorisme, perdagangan manusia, dan bencana alam memerlukan respons regional yang terkoordinasi. Namun, pendekatan ASEAN yang berpusat pada negara dan proses informal, sering kali tidak memadai untuk mengatasi ancaman transnasional yang bersifat kompleks ini (Caballero-Anthony, 2008). Selanjutnya terkait konflik internal. Konflik internal yang sedang berlangsung di negara-negara anggota, seperti krisis politik di Myanmar, menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap penerapan pendekatan keamanan manusia. Konflik-konflik ini menguji kemampuan ASEAN untuk menyeimbangkan antara norma-norma regional

dengan kebutuhan akan intervensi yang efektif (Caballero-Anthony, 2023).

Tantangan lainnya bersifat kebudayaan dan konseptual. Di satu sisi pendekatan yang berpusat pada negara dimana secara historis ASEAN berfokus pada keamanan dan kedaulatan negara justru dapat bertentangan dengan paradigma keamanan manusia yang mengutamakan kesejahteraan individu. Pendekatan yang berpusat pada negara ini tertanam kuat dalam budaya operasional ASEAN (Howe & Park, 2017). Di sisi lain, adanya beragam penafsiran, dimana konsep “berpusat pada masyarakat” dalam dokumen-dokumen ASEAN dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, sehingga menyebabkan penerapan prinsip-prinsip keamanan manusia yang tidak konsisten di seluruh kawasan (Howe & Park, 2017). Selanjutnya, beberapa pihak menganggap keamanan manusia berpotensi merusak stabilitas nasional dan kerja sama antarnegara, sebab menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek keamanan ini merupakan tantangan yang kompleks. Konsep keamanan manusia itu sendiri memiliki banyak sisi dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai negara di ASEAN. Pendekatan terpadu yang sesuai dengan semua negara anggota sangatlah penting, tetapi bisa jadi sulit untuk dicapai.

Implikasinya Terhadap Keamanan Manusia Di Indonesia

Kemajuan ASEAN mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia ke dalam berbagai agendanya, tentu saja memberi dampak positif kepada negara anggotanya. Demikian juga, tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN, berimplikasi juga terhadap anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Semakin meluasnya penerapan keamanan manusia ke dalam berbagai

sektor kerja sama regional ASEAN, potensial menghadirkan stabilitas regional, peningkatan pembangunan social ekonomi, serta penguatan kerja sama internasional lainnya. Ujungnya adalah arah perkembangan ASEAN yang semakin inklusif dan semakin berpusat pada masyarakat. Dalam kondisi demikian, kelomok-kelompok rentan di Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang paling plural karakteristiknya, potensial mendapat keuntungan.

Karena pendekatan keamanan manusia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam menangani berbagai isu yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat warga negaranya, seperti kejahatan transnasional, penyelundupan senjata, dan migrasi ilegal, maka upaya-upaya kolaboratif seperti ini dapat sangat bermanfaat bagi Indonesia, yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN lainnya dan menghadapi berbagai tantangan terkait isu-isu ini. Karena itu, beberapa catatan berikut menjadi penting bagi Indonesia.

Terkait promosi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, Indonesia termasuk salah satu yang telah melakukannya di antara negara-negara anggota ASEAN, melalui misalnya inisiatif-inisiatif seperti Forum Demokrasi Bali. Namun upaya Indonesia masih agak terhambat oleh kepemimpinan yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan penolakan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya (Emmers, 2021). Pemahaman yang lebih luas tentang keamanan dalam ASEAN telah juga memberi Indonesia suatu platform untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan manusia, termasuk misalnya ancaman lingkungan dan masalah keamanan yang bermotif agama (Hara, et al., 2022).

Adalah penting untuk dicatat bahwa Indonesia menghadapi tantangan keamanan manusianya sendiri, seperti pemberontakan dan masalah keamanan transnasional seperti terorisme dan perdagangan manusia (Nishikawa, 2010). Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan keamanan manusia yang bersifat local dan selaras dengan konteks social-politik Indonesia yang unik dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya (Hara, et al., 2022).

Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa sebagaimana halnya organisasi-organisasi internasional lainnya, ASEAN telah mengadopsi pendekatan keamanan manusia di dalam berbagai kebijakannya. Langkah-langkah pengintegrasian dilakukan secara bertahap seiring dengan proses regionalisasi (perluasan keanggotaan) dan institusionalisasi yang dilakukan ASEAN. Adapun komponen kunci agenda keamanan manusia ASEAN berfokus pada hak asasi dan perlindungan, isu-isu keamanan non-tradisional, pendekatan yang berfokus pada manusia, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, resolusi konflik dan diplomasi, serta pembangunan ekonomi-sosial. Di dalam prosesnya, ASEAN mengalami dan tentu saja akan terus mengalami tantangan, baik yang bersifat struktural, politis, operasional, maupun yang terkait dengan kultur dan konseptual terkait diksi keamanan manusia.

Dalam kaitan dengan itu, beberapa catatan berikut perlu menjadi perhatian. Pertama, ASEAN perlu secara efektif menangani berbagai masalah keamanan non-tradisional seperti kejahatan transnasional, terorisme, dan keamanan siber, yang

dapat berdampak langsung pada keamanan manusia. Mengkoordinasikan upaya dan memastikan bahwa masalah ini ditangani dari perspektif keamanan manusia merupakan suatu tantangan. Kedua, menerapkan inisiatif keamanan manusia memerlukan sumber daya, termasuk modal keuangan dan manusia, yang mungkin terbatas di beberapa negara anggota ASEAN. Ketiga, implementasi keamanan manusia yang efektif memerlukan koordinasi dan kerja sama yang kuat antara berbagai badan ASEAN dan negara-negara anggota. Mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan komunikasi yang efektif merupakan tantangan. Keempat, pengaruh aktor eksternal, seperti lembaga donor dan LSM, juga dapat berperan dalam membentuk pendekatan ASEAN terhadap keamanan manusia, yang berpotensi menimbulkan prioritas yang saling bertentangan.

Daftar Pustaka

- Assosiation of Southeast Asian Nations, 2003. *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Assosiation of Southeast Asian Nations, 2008. *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Azmi, N. M., Hamzah, I. S. & Hussin, N. I., 2021. The Implications of securitising Health Crisis: The Case of Southeast Asia. *Journal International Studies*, Volume 17, pp. 53-79.
- Benedek, W., 2011. Mainstreaming human security in United Nations and European Union peace and crisis management operations. In: W. Benedek, M. C. Kettemann & M. Möstl, eds. *Mainstreaming Human*

- Security in Peace and Crisis Management: Policies, Problems, Potential*. London: Routledge, pp. 13-33.
- Black, D. R., 2014. Civil Society and the Promotion of Human Security: Achievements, Limits, and Prospects. *Asian Journal of Peacebuilding*, 2(2), pp. 169-184.
- Caballero-Anthony, M., 2008. Non-traditional security and infectious diseases in ASEAN: going beyond the rhetoric of securitization to deeper institutionalization. *Pacific Review*, 21(4), pp. 507-525.
- Caballero-Anthony, M., 2022. The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*, 11 June.
- Caballero-Anthony, M., 2023. Conflict Management and Atrocity Prevention in Southeast Asia: Making asean “Fit for Purpose”. *Journal of International Peacekeeping*, Volume 26, pp. 235-257.
- Caballero-Anthony, M. & Gong, L., 2020. Beyond Securitization: Governing NTS Issues in Southeast Asia. In: M. Caballero-Anthony & L. Gong, eds. *Non-Traditional Security Issues in ASEAN: Agendas for Action*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Emmers, R., 2021. Democratization, national identity, and Indonesia's foreign policy. In: G. Rozman, ed. *Democratization, National Identity and Foreign Policy in Asia*. London: Routledge.
- Eze, C. B., 2016. The Role of csos in Promoting Human Rights Protection, Mass Atrocities Prevention, and Civilian Protection in Armed Conflicts. *Global Responsibility to Protect*, 8(2-3), p. 2490269.

- Frerks, G. & Goldewijk, B. K., 2007. *Human Security and International Insecurity*. Wageningen: Brill.
- Guinto, R. L. L. G., Curran, U. Z., Suphanchaimat, R. & Pocock, N. S., 2015. Universal health coverage in 'One ASEAN': are migrants included?. *Global Health Action*, PMID: 25626624(PMCID: PMC4308585).
- Hadiprayitno, I., 2019. Deadlock and Denial: Domestic Challenges and the Institutionalization Human Rights in ASEAN. *Global Jurist*, 19(1), pp. 1-15.
- Hara, A. E., Indriastuti, S. & Trihartono, A., 2022. Beyond the Global Agenda. State and Religious Non-state Actors' Responses to Human Security in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(2), pp. 204-225.
- Howe, B. & Park, M. J., 2017. The evolution of the "ASEAN Way": Embracing human security perspectives. *Asia-Pacific Social Science Review*, 16(3), pp. 1-15.
- Hunt, C. T. & Sharland, L., 2019. Implementing R2P through United Nations peacekeeping operations. Opportunities and challenges. In: C. Jacob & M. Mennecke, eds. *Implementing the Responsibility to Protect. Future Agenda*. London: Routledge.
- Katsumata, H., 2011. Mimetic adoption and norm diffusion: 'Western' security cooperation in Southeast Asia?. *Review of International Studies*, 37(2), pp. 557-576.
- Khoirunnisa, K., 2023. Toward a Political-Security Community in Southeast Asia: Progress, Pitfalls, and Prospects. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 9(1), pp. 269-294.

- Kliem, F., 2021. ASEAN and the EU amidst COVID-19: overcoming the self-fulfilling prophecy of realism. *Asia Europe Journal*, 19(3), pp. 371-389.
- Koh, K.-L., 2012. The discourse of environmental security in the ASEAN context. In: B. Jessup & K. Rubenstein, eds. *Environmental Discourses in Public and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 218-237.
- Krause, K., 2013. Critical perspectives on human security. In: M. Martin & T. Owen, eds. *Routledge Handbook of Human Security*. London & New York: Routledge, pp. 76-93.
- Low, C. C., 2019. Extraterritorial migration control in Malaysia: Militarized, externalized, and regionalized. *Regions and Cohesion*, 9(3), pp. 1-28.
- MacFarlane, N. S., 2014. The United Nations and Human Security. *Asian Journal of Peacebuilding*, 2(2), pp. 151-168.
- McCormack, T., 2007. From state of war to state of nature: human security and sovereignt. In: C. J. Bickerton, P. Cunliffe & A. Gourevitch, eds. *Politics Without Sovereignty: A Critique of Contemporary International Relations*. New York: UCI Press, pp. 77-92.
- Morada, N. M., 2016. Southeast Asian Regionalism, Norm Promotion and Capacity Building for Human Protection: An Overview. *Global Responsibility to Protect*, 8(2-3), pp. 111-132.
- Morada, N. M., 2019a. Southeast Asian Regionalism, Norm Promotion and Capacity Building for Human Protection: An Overview. In: C. T. Hunt & N. M. Morada, eds.

- Regionalism and Human Protection: Reflections from Southeast Asia and Africa*. Leiden: Koninklijke Brill NV, pp. 7-28.
- Morada, N. M., 2019b. ASEAN regionalism and capacity-building for atrocities prevention. Challenges and prospects.. In: C. Jacob & M. Mennecke, eds. *Implementing Responsibility to Protect. A Future Agenda*.. London: Routledge.
- Nasu, H., 2013. The Place of Human Security in Collective Security. *Journal of Conflict and Security Law*, 18(1), pp. 95-129.
- Nishikawa, Y., 2010. *Human security in Southeast Asia*. 1st ed. Oxford & New York: Routledge.
- Oberleitner, G., 2013. Human security: Idea, policy and law. In: M. Martin & T. Owen, eds. *Routledge of Human security*. London & New York: Routledge, pp. 319-330.
- Pitsuwan, S. & Caballero-Anthony, M., 2014. Human Security in Southeast Asia: 20 Years in Review. *Asian Journal of Peacebuilding*, 2(2), pp. 199-215.
- Ryu, Y. & Ortuose, M., 2014. Democratization, regional integration, and human rights: The case of the ASEAN intergovernmental commission on human rights. *Pacific Review*, 27(3), pp. 357-382.
- Shaari, M. S. et al., 2024. Examining the interplay between green technology, co2 emissions, and life expectancy in the asean-5 countries: insights from the panel FMOLS and DOLS approaches. *Discover Sustainability*, 5(456).
- Sundram, P., 2024. ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects. *Frontiers in Political Science*, Volume 6, p. 1304828.
- Syafrinaldi, S., Prayuda, R. & Harto, S., 2022. Toward an Effective ASEAN Mutual Legal Assistamce in

- Combating Nontraditional security Threats in the Southeast Asian Region. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, 11(22), pp. 176-195.
- UNDP, 1994. *Human Development Report 1994*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- United Nations, 2004. *A more secured world: our shared responsibility*. New York: United Nations.
- Wählich, M., 2014. Human Security: Concept and Evolution in the United Nations. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 18(1), pp. 1-31.

Forum Multilateral atas Pengungsi Lingkungan di Kawasan Indo-Pasifik: Respons dan Tantangan¹

Citra Hennida

Fadhila Inas Pratiwi

Agastya Wardhana

Pendahuluan

Kawasan Indo-Pasifik terdiri atas banyak pulau-pulau kecil yang rentan akan perubahan iklim. Di dalam wilayah daratannya pun, negara dengan wilayah dataran rendah dan kota-kota di sepanjang pantai juga rawan terhadap perubahan iklim. Kerawanan ini memicu semakin banyaknya jumlah pengungsi lingkungan di kawasan. Bahkan hampir 80 persen jumlah pengungsi lingkungan global disumbang oleh kawasan Indo-Pasifik (McAdam, 2024). Negara-negara di Indo-Pasifik memiliki kontur geografis yang rawan terhadap bencana yang banyak dipicu oleh perubahan iklim. Perubahan iklim membuat permukaan air laut naik, badai menjadi lebih sering terjadi, curah hujan berlebih, dan kekeringan yang berkepanjangan. Ini mengancam ruang hidup dan pangan masyarakat di kawasan yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mengungsi. Negara-negara mini dan mikro di Pasifik Barat Daya; negara berlokasi di dataran rendah dan hilir sungai besar seperti Bangladesh adalah negara-negara yang setiap tahunnya mencatatkan banyak pengungsi

¹ Artikel ini merupakan bagian dari luaran Pengabdian Masyarakat Internal skema PKM Universitas Airlangga tahun 2022 no SK 1023/UN3/2022.

lingkungan. Kawasan Indo-Pasifik juga rumah bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan variatif di dunia. Negara dengan jumlah penduduk besar seperti Cina, India, dan Indonesia ada di wilayah Indo-Pasifik. Mereka ini berpotensi dan sudah menimbulkan gelombang pengungsi lingkungan yang besar baik inter maupun antar negara.

Berangkat dari permasalahan ini maka tulisan ini fokus kepada bagaimana forum multilateral dan Indonesia merespon isu ini. Bagian pertama menjelaskan kawasan Indo-Pasifik dan kerawanannya terhadap perubahan iklim, termasuk kehadiran pengungsi lingkungan. Bagian kedua membahas mengenai tata kelola pengungsi dalam forum-forum multilateral yang tersedia. Bagian ketiga, mendiskusinya pengungsi lingkungan dalam konteks Indonesia.

Kehadiran Pengungsi Lingkungan di Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik dianggap sebagai kawasan yang paling rawan terkena dampak dari perubahan iklim karena kawasan ini terpapar risiko lingkungan yang besar dan kepadatan penduduknya terutama di wilayah pesisir dan delta sungai. Perubahan iklim di Indo-Pasifik tercatat sebagai yang tertinggi di dunia dengan rata-rata peningkatan suhunya adalah 0,25⁰C dalam lima dekade terakhir (Price dan Singer, 2015). Indo-Pasifik juga memiliki banyak kota besar yang masyarakatnya rentan secara ekonomi dan sosial sehingga mitigasi terhadap perubahan iklim juga dipandang lambat.

Menurut UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), perubahan iklim mengakibatkan terganggunya proses hidrologi, termasuk di dalamnya banjir di wilayah-

wilayah pantai, salinasi, erosi, sedimentasi, meluapnya sungai, dan kerapnya badai. Perubahan iklim mengancam produksi pangan. Perubahan iklim meningkatkan hujan dan badai yang intensif namun dalam waktu yang singkat. Akibatnya masa tanam yang singkat menurunkan kapasitas produksi pangan. Hal ini diperkeruh dengan banjir, erosi, dan salinasi yang juga akan menghilangkan wilayah-wilayah subur untuk ditanami (Perry, 1990). Perubahan iklim mengancam ketersediaan air. Untuk wilayah-wilayah kering, pasokan air akan mengalami penurunan pasokan air, sedangkan untuk wilayah-wilayah basah tropis, pasokan air akan naik. Sedangkan untuk wilayah dingin, cadangan salju dan glasir akan mencair dan kemudian menipis akibat naiknya suhu permukaan bumi. Perubahan iklim juga berdampak pada ketersediaan tempat hidup. Orang-orang yang mendiami delta sungai, dataran rendah, pulau kecil, dan kepulauan adalah kelompok masyarakat yang rentan akan banjir, naiknya permukaan laut, dan terpaan badai (Hennida, 2012).

Indo-Pasifik memiliki karakter seperti yang disebutkan sebelumnya. Wilayah ini merupakan kawasan yang luas mencakup negara-negara kepulauan kecil, pesisir rendah, serta wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan. Negara-negara di kawasan ini menghadapi berbagai bencana alam yang semakin intensif akibat kombinasi faktor geografis, demografis dan ekonomi. Perubahan iklim membawa lebih banyak badai tropis, kenaikan permukaan laut, kekeringan ekstrem, serta perubahan pola hujan yang berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian. Akibatnya, semakin banyak penduduk yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, menciptakan fenomena pengungsi lingkungan. Indo-Pasifik mengalami banyak bencana akibat perubahan iklim. Hal

ini membawa konsekuensi banyaknya pengungsi lingkungan di kawasan ini. Antara tahun 2010 dan 2021 saja; rata-rata ada sekitar 19 juta pengungsi tiap tahun. Jumlah ini hampir 80 persen dari jumlah pengungsi dunia (McAdam, 2024).

Kenaikan permukaan laut membawa dampak bagi negara-negara kepulauan di Pasifik, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Maladewa. Mereka menghadapi ancaman tenggelam akibat kenaikan permukaan laut yang diproyeksikan mencapai 40 cm di tahun 2100. Kiribati dan Tuvalu, negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Barat Daya yang kemungkinan besar akan menjadi negara pertama yang hilang akibat kenaikan permukaan laut dan sempitnya wilayah mereka. Penduduknya terpaksa mengungsi ke negara lain seperti Fiji dan Selandia Baru. Kota-kota pesisir besar di Bangladesh, India, dan Vietnam juga berisiko tinggi mengalami banjir permanen karena letaknya di pinggir sungai besar Gangga-Brahmaputra dan delta sungai Mekong (Mayer, 2013); begitu juga kota-kota yang terletak di pesisir seperti Jakarta, Manila, Bangkok dan Yangon akan mengalami banjir yang semakin sering dan sulit surut. Perpindahan penduduk akan menjadi permasalahan serius bagi kota-kota ini (ASEAN 2015 dikutip dalam Marthin & Budiman, 2020). Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan bahwa sepertiga kota di Asia Tenggara rawan akan banjir (ADB 2011 dikutip dalam Gemenne dkk. 2015). Gemenne dkk (2015) juga menekankan bagaimana faktor-faktor lingkungan dan cuaca ekstrem dikombinasikan dengan populasi yang rentan memunculkan banyak pengungsi di kawasan. Bank Dunia juga memprediksi bahwa di tahun 2050 nantinya ada sekitar 143 juta orang menjadi pengungsi lingkungan di seluruh dunia (World Bank 2018 dikutip dalam Marthin & Budiman, 2020).

Tingginya jumlah pengungsi berpotensi memicu konflik di tingkat lokal, sebagaimana tercermin dalam ketegangan antara India dan Bangladesh. Dinamika ini semakin diperumit oleh dampak perubahan iklim yang mempertinggi frekuensi dan intensitas konflik terkait pengelolaan sumber daya air, khususnya di wilayah Sungai Gangga. Perselisihan mengenai distribusi air ini telah berlangsung sejak dekade 1970-an, ketika India membangun Bendungan Farakka beserta jaringan kanalnya untuk mendukung kebutuhan industri domestik. Pada tahun 1975, kedua negara mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pembukaan dan penutupan kanal tersebut. Meskipun awalnya mekanisme ini berjalan relatif stabil melalui pembaruan perjanjian setiap lima tahun, sejak tahun 1988 efektivitasnya menurun drastis. India kerap menutup kanal secara sepihak tanpa konsultasi atau persetujuan dari Bangladesh, dan absennya mekanisme sanksi memperburuk situasi (Swain, 1996). Dampaknya sangat signifikan bagi Bangladesh, dengan terjadinya kekeringan yang merugikan sektor pertanian dan industri yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketidakstabilan ini juga mengancam ketahanan pangan nasional, terutama karena sekitar sepertiga penduduk Bangladesh bermukim di wilayah aliran Sungai Gangga (Swain, 1996). Akibatnya, ketika bencana terjadi, proporsi yang sama dari populasi tersebut terpaksa melakukan migrasi internal (Hennida, 2012).

Perubahan iklim secara signifikan juga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang berdampak langsung terhadap pola perpindahan penduduk di kawasan Indo-Pasifik. Filipina dan Indonesia termasuk negara yang paling rentan terhadap bencana alam, khususnya topan dan gempa

bumi, yang setiap tahunnya menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar. Filipina, yang terletak di jalur topan Pasifik, secara konsisten mengalami lebih dari 20 badai besar setiap tahun. Badai-badai ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas dan mendorong terjadinya migrasi, baik internal maupun lintas negara. Misalnya, pada Desember 2011, Badai Washi menghantam kawasan Mindanao dan menyebabkan lebih dari 430.000 orang mengungsi, terutama dari kota Cagayan de Oro dan Iligan. Setahun kemudian, wilayah yang sama kembali terdampak oleh Badai Bhopa, dengan jumlah pengungsi mencapai satu juta jiwa. Sementara itu, Badai Trami yang melanda Manila pada tahun 2013 memicu pengungsian sekitar 1,7 juta orang (Gemenne dkk., 2015).

Di samping itu, perubahan iklim turut memperparah kejadian kekeringan ekstrem di berbagai wilayah. Australia dan Myanmar, misalnya, menghadapi kekeringan yang berkepanjangan, yang tidak hanya mengganggu sektor pertanian tetapi juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan dan potensi konflik terkait sumber daya alam. Negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Nepal, menghadapi tantangan besar akibat pencemaran air, desertifikasi, serta peningkatan suhu ekstrem yang memperparah krisis pangan. Wilayah delta seperti Sundarbans di Bangladesh dan pesisir Myanmar juga kian terancam oleh intrusi air laut, yang mengakibatkan gagal panen dan hilangnya mata pencaharian, sehingga mendorong terjadinya migrasi paksa (Gemenne et al., 2015).

Tata kelola pengungsi lingkungan dalam forum multilateral

Kerja sama antar negara dikelola dalam forum-forum multilateral dengan menghasilkan rezim internasional (Pratt, 2023). Pengungsi dan isu lingkungan tidak menjadi domain satu negara saja tapi sudah menjadi isu transnasional. Kelompok orang yang tinggal di luar negeri dapat dibedakan menjadi pengungsi dan migran. Keduanya ini sering digunakan secara bergantian, termasuk dalam mengidentifikasi dampak kepergiannya karena alasan-alasan lingkungan. Beberapa menyebutnya sebagai “pengungsi lingkungan”, sedang lainnya menyebutnya sebagai “migran lingkungan”. Pengungsi memiliki konotasi sebagai gerakan tidak sukarela, sedangkan migran lebih memiliki keleluasaan karena dipilih berdasar kesukarelaan (McCarney & Kent, 2020). PBB menerjemahkan pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara asalnya karena alasan penganiayaan yang ditakuti, konflik, kekerasan umum, atau keadaan lain yang secara serius mengganggu ketertiban umum dan, sebagai akibatnya, memerlukan perlindungan internasional. Definisi pengungsi dapat ditemukan di Konvensi Pengungsi 1951, instrument pengungsi regional, dan Statuta Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Migran, meskipun belum ada definisi hukum formal tentang suatu migran internasional, sebagian besar ahli sepakat bahwa seorang migran internasional adalah seseorang yang mengubah negara tempat tinggalnya yang biasa, terlepas dari alasan migrasi atau status hukum. Secara umum, perbedaan dibuat antara migrasi jangka pendek atau sementara, yang mencakup pergerakan dengan durasi antara tiga dan 12 bulan, dan migrasi jangka panjang atau permanen, merujuk pada

perubahan negara tempat tinggal selama satu tahun atau lebih (UNNews, 2018).

Istilah pengungsi lingkungan seringkali merujuk pada tulisan Essam El-Hinnawi di UNEP (UN Environment Programme) tahun 1985. Kesadaran mengenai hadirnya pengungsi lingkungan diperdebatkan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 1990an perdebatan mengarah pada pemikiran-pemikiran neo-Malthusian yang menghubungkan pertumbuhan populasi dengan krisis sosial dan ekonomi. Ada keterkaitan antara krisis lingkungan dan perpindahan penduduk. Populasi dan terbatasnya kapasitas lingkungan tetap menjadi perhatian utama sebagai penyebab adanya mobilitas manusia. Tulisan El-Hinnawi (1985), Jacobson (1988) dan Myers (1993 dan 1995) selanjutnya menjadi rujukan utama pembahasan mengenai pengungsi lingkungan di tahun-tahun tersebut (Morrissey, 2012).

Sayangnya, meski telah diketahui banyak pihak bahwa kenaikan permukaan laut, bencana alam yang semakin sering, serta degradasi lingkungan memaksa masyarakat untuk berpindah ke wilayah yang lebih aman namun keberadaan pengungsi lingkungan belum diakui oleh hukum internasional. Akibatnya perlindungan bagi mereka masih terbatas. Konvensi Pengungsi 1951 (UNHCR) hanya mengakui pengungsi yang melarikan diri karena persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau kelompok sosial; *tidak termasuk alasan lingkungan*. Meskipun demikian, UNHCR telah mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengungsi lingkungan, termasuk melalui advokasi, kebijakan, serta kerja sama dengan organisasi lain.

UNHCR telah mengadvokasi perluasan perlindungan hukum internasional bagi individu yang terdampak oleh degradasi lingkungan, khususnya melalui penguatan penerapan prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini, yang melarang pemulangan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko menghadapi penganiayaan serius atau perlakuan tidak manusiawi, merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi dan telah memperoleh status sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Artinya, prinsip ini mengikat seluruh negara, termasuk mereka yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 2025). Dalam konteks migrasi akibat perubahan iklim dan bencana alam, penerapan prinsip *non-refoulement* masih berada dalam wilayah abu-abu secara normatif. Namun, UNHCR menekankan bahwa prinsip ini mencakup larangan terhadap segala bentuk pengusiran, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya memaksa seseorang kembali ke situasi yang mengancam keselamatan dan hak asasinya. Panduan UNHCR membuka ruang interpretatif untuk penerapan prinsip ini dalam kasus di mana degradasi lingkungan menimbulkan ancaman yang sebanding dengan bentuk penganiayaan.

Lebih lanjut, kewajiban *non-refoulement* juga diperkuat oleh ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 menjamin hak atas hidup, sedangkan Pasal 7 melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. *Human Rights Committee*—badan pengawas ICCPR—dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa negara tidak boleh mendeportasi seseorang ke negara asalnya jika ada risiko nyata terhadap hak-hak tersebut, sehingga

memperluas cakupan *non-refoulement* di luar kerangka Konvensi Pengungsi.

UNHCR juga menjalin kerja sama dengan negara-negara terdampak, UNHCR mengembangkan pendekatan operasional dan normatif, termasuk fasilitasi mekanisme relokasi bagi komunitas yang rentan terhadap dampak lingkungan, seperti negara-negara kepulauan Pasifik yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 tidak secara eksplisit mengakui pengungsi lingkungan, UNHCR turut merespons perkembangan hukum internasional, termasuk putusan landmark *Teitiota v. New Zealand* (2020) oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Putusan ini memperluas interpretasi hak atas hidup dalam ICCPR untuk mencakup larangan pengembalian ke negara asal bila perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup, yang dapat dibaca sebagai penguatan prinsip *non-refoulement* dalam konteks lingkungan (De Coninck & Soete, 2022; McAdam, 2020).

Sebagai lembaga yang berperan membentuk norma internasional, UNHCR mendukung perluasan tafsir prinsip *non-refoulement* melalui panduan kebijakan dan advokasi, termasuk dengan mengusulkan penerapan prinsip ini terhadap situasi di mana degradasi lingkungan menimbulkan risiko serius yang menyerupai penganiayaan. UNHCR juga memfasilitasi penggunaan visa kemanusiaan dan pemberian status perlindungan sementara bagi individu yang terdampak oleh krisis iklim, sebagaimana terlihat dalam kebijakan migrasi di Selandia Baru dan Australia. Di tingkat operasional, UNHCR menjalankan mandat tanggap darurat melalui penyediaan bantuan kemanusiaan bagi populasi terdampak bencana lingkungan, termasuk tempat tinggal sementara, akses layanan

kesehatan, dan logistik. Dengan pendekatan kelembagaan yang adaptif, UNHCR berperan penting dalam menjembatani kekosongan normatif dalam hukum pengungsi internasional dan mendorong evolusi rezim perlindungan terhadap migrasi berbasis iklim.

Untuk memperkuat mandat kelembagaan UNHCR, negara-negara anggota PBB mengadopsi Deklarasi New York pada September 2016, yang menandai komitmen kolektif untuk memperkuat tata kelola global dalam merespons krisis pengungsi dan migrasi. Deklarasi ini menghasilkan dua kesepakatan utama. Pertama, menyusun kerangka kerja respons pengungsi yang komprehensif sebagai panduan bagi komunitas internasional dalam menghadapi situasi perpindahan berskala besar. Kedua, negara-negara anggota menyepakati pengembangan dua *Global Compact* yang diluncurkan pada tahun 2018, yakni *Global Compact on Refugees* (GCR) dan *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration* (GCM). Inisiatif ini dirancang bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melengkapi kerangka hukum internasional yang telah ada, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNNews, 2018).

Berbeda dengan Konvensi 1951 yang menekankan hak-hak individu pengungsi dan kewajiban negara-negara penerima, kedua *Compact* ini berfokus pada pembagian tanggung jawab dan beban secara kolektif di tingkat internasional. Konvensi tidak merinci mekanisme alokasi beban secara adil antarnegara, dan inilah celah yang diisi oleh GCR dan GCM (UNNews, 2018). Keduanya menjadi instrumen penting dalam mendukung solidaritas global melalui mobilisasi komitmen politik, perluasan dukungan internasional, serta penciptaan mekanisme

kolaboratif yang memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih adil, terprediksi, dan berkelanjutan bagi negara dan komunitas yang menampung pengungsi.

Sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan tanggapan internasional terhadap penyebab kompleks perpindahan paksa, GCR turut mengakui keterkaitan erat antara perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan dengan meningkatnya kerentanan migrasi paksa. Meskipun GCR tidak mengubah definisi hukum pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951, dokumen ini mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam perumusan kebijakan perlindungan. Hal ini mencakup penguatan langkah-langkah pencegahan agar komunitas rentan tidak terdorong untuk berpindah, serta memastikan bahwa mereka yang terdampak perubahan iklim tetap memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan yang relevan.

GCR juga merekomendasikan integrasi strategi adaptasi dan mitigasi iklim dalam kebijakan penanganan pengungsi, termasuk melalui penyediaan layanan dasar, promosi ketahanan iklim di wilayah rawan bencana, serta dukungan keuangan untuk program adaptasi di negara-negara berkembang. Salah satu contoh konkret adalah adopsi strategi relokasi terencana oleh sejumlah negara di kawasan Pasifik sebagai respons terhadap kenaikan permukaan laut. Melalui pendekatan ini, terlihat bahwa mandat kelembagaan UNHCR menunjukkan fleksibilitas normatif dalam merespons dinamika baru terkait pengungsi lingkungan. Namun demikian, proses negosiasi untuk memasukkan *climate-induced displacement* secara eksplisit dalam dokumen non-mengikat GCR menghadapi resistensi dari beberapa negara. Kekhawatiran utama muncul terhadap potensi

kaburnya batas-batas konseptual antara pengungsi konvensional dan mereka yang berpindah akibat perubahan iklim, yang dikhawatirkan dapat mengaburkan komitmen negara terhadap kewajiban inti dalam Konvensi 1951 (Claire & Elie, 2019).

Untuk level regional, inisiatif dan perlindungan pengungsi lingkungan juga mulai diinisiasi. Di November 2023, Pacific Regional Framework on Climate Mobility diadopsi oleh para pemimpin Pasifik. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini dapat mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespons dampak perubahan iklim terhadap mobilitas. Ini merupakan komitmen kolektif untuk menangani perpindahan yang disebabkan oleh peristiwa terkait iklim. Di tahun yang sama, Australia dan Tuvalu membentuk the Australia-Tuvalu Falepili Union yang menyediakan jalur bagi warga Tuvalu untuk bermigrasi ke Australia sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ini menawarkan pendekatan proaktif, memungkinkan individu untuk memilih kapan dan jika mereka ingin pindah akibat faktor lingkungan (McAdam, 2024). Kawasan Indo-Pasifik juga memiliki jaringan advokasi yang tergabung dalam Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN). APRRN mengumpulkan organisasi masyarakat sipil di seluruh Asia dan Pasifik untuk mempromosikan hak-hak pengungsi dan orang-orang yang terpaksa pindah. Jaringan ini memiliki 270 anggota yang tersebar di 28 negara di Asia Pasifik. Jaringan ini fokus pada memastikan bahwa suara lokal dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perlindungan pengungsi, termasuk mereka yang dipindahkan oleh faktor lingkungan (ClimateKIC, t.t.). Organisasi regional di Pasifik Selatan, Pacific Islands Forum (PIF), juga telah mendorong resolusi seperti Boe

Declaration on Regional Security (2018), yang mengakui perubahan iklim sebagai ancaman keamanan.

Berbeda dengan negara-negara kepulauan Pasifik yang telah mengembangkan strategi relokasi terencana untuk menghadapi dampak perubahan iklim, negara-negara Asia Tenggara masih menunjukkan kemajuan yang terbatas dalam menanggapi isu pengungsi lingkungan. Di tingkat regional, ASEAN telah mulai mengakui keterkaitan antara perubahan iklim dan dinamika migrasi, sebagaimana tercermin dalam pernyataan bersama serta komitmen yang disampaikan dalam forum-forum internasional seperti COP27. Dalam dokumen-dokumen tersebut, ASEAN menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan menyerukan peningkatan kapasitas adaptasi, khususnya bagi kelompok rentan. Meskipun belum secara eksplisit menetapkan kebijakan mengenai pengungsi lingkungan, ASEAN telah mengembangkan kerangka kerja yang secara implisit mencakup isu ini, antara lain dengan mendorong kerja sama antarnegara anggota dalam menghadapi perpindahan massal akibat bencana. Melalui instrumen seperti ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), ASEAN membangun mekanisme koordinasi dalam penanganan bencana dan krisis kemanusiaan. Namun demikian, respons ASEAN masih bersifat reaktif dan belum mengarah pada pendekatan preventif maupun perlindungan jangka panjang bagi pengungsi lingkungan (Khanh-Linh Ta, 2023).

Pengakuan terhadap status hukum pengungsi lingkungan dalam kerangka hukum internasional masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah pandangan bahwa perubahan iklim bukanlah penyebab tunggal

perpindahan, melainkan hanya mempercepat tren migrasi yang sudah ada. Dengan demikian, sebagian kalangan menilai tidak perlu adanya kategori hukum baru untuk pengungsi lingkungan (McCarney & Kent, 2020). Perpindahan akibat perubahan iklim kerap tumpang tindih dengan motif ekonomi, politik, dan sosial lainnya, sehingga sulit untuk memisahkan secara jelas antara pengungsi lingkungan dan kelompok migran lainnya (Morrissey, 2012). Selain itu, kompleksitas faktor-faktor demografis, budaya, serta kondisi politik dan ekonomi membuat motivasi migrasi bersifat multifaktor dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek lingkungan.

Kekhawatiran lain datang dari negara-negara yang berpotensi menjadi tujuan utama migrasi, khususnya negara-negara industri. Mereka cenderung menolak perluasan definisi hukum pengungsi karena takut menanggung tanggung jawab tambahan dalam skala besar. Saat ini, hanya pengungsi yang dilindungi Konvensi 1951 yang memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan formal dari UNHCR, sementara pengungsi lingkungan masih berada di wilayah abu-abu tanpa perlindungan hukum yang setara (Hartmann, 2010; Morrissey, 2012). Ketimpangan distribusi tanggung jawab juga memperburuk situasi: hanya sepuluh negara yang menampung sekitar 60 persen pengungsi dunia, dan sebagian besar dari mereka tinggal di negara-negara berkembang yang tengah menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan sendiri (UNNews, 2018). Sementara itu, kontribusi keuangan untuk UNHCR sangat bergantung pada segelintir donor, di mana sepuluh negara menyumbang hampir 80 persen dana. Kesenjangan besar antara kebutuhan pengungsi dan kapasitas global untuk meresponsnya memperkuat persepsi bahwa

pengungsi, termasuk mereka yang terdampak perubahan iklim, merupakan beban tambahan bagi negara-negara (UNNews, 2018).

Indonesia dan Pengungsi Lingkungan

Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia juga rentan akan hadirnya pengungsi lingkungan karena letak geografisnya yang berada di kawasan *ring of fire* dan memiliki ribuan pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (Puspita dkk., 2023). Kerentanan ini ditambah dengan tingginya populasi yang tinggal di wilayah pesisir dan dataran rendah yang rentan terhadap naiknya permukaan air laut, bencana hidrometeorologi, aktivitas vulkanik dan gempa bumi serta perubahan ekosistem akibat perubahan iklim (McMichael dkk, 2012). Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan pengungsian terbesar akibat perubahan iklim (Satria, 2024). Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 90% bencana di Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana lingkungan, dan secara konsisten menyebabkan perpindahan penduduk baik secara temporer maupun permanen (BNPB, 2020).

Mayoritas pengungsi lingkungan di Indonesia berasal dari dalam negeri sendiri (Internally Displaced Persons/IDPs) (Puspita dkk., 2023). Belum ada catatan resmi mengenai kehadiran pengungsi lintas batas ke Indonesia akibat perubahan iklim atau bencana alam di negaranya. Namun, potensi itu ada di masa depan karena Indonesia adalah negara kepulauan besar dan memiliki posisi geografis strategis, maka secara jangka panjang berpotensi menjadi tujuan atau transit migrasi iklim dari luar khususnya dari negara-negara Kepulauan Pasifik (seperti

Kiribati, Tuvalu) yang menghadapi ancaman tenggelam akibat naiknya permukaan laut; Bangladesh dan kawasan Asia Selatan yang menghadapi kombinasi banjir, siklon, dan overpopulasi; serta wilayah Papua Nugini dan Timor Leste yang rentan secara ekologis dan ekonomis (IOM, 2023; Almulhim dkk., 2024).

Sayangnya Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur pengungsi lingkungan secara eksplisit. Meski begitu terdapat beberapa langkah dan pendekatan kebijakan yang relevan, baik melalui kerangka penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim, maupun perlindungan sosial. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum utama dalam manajemen pengungsian akibat bencana alam. Hukum ini memberikan kewenangan kepada BNPB dan BPBD untuk mengelola evakuasi, tempat penampungan, dan rehabilitasi pascabencana. Keputusan Presiden No. 3/2001 mengatur soal keberadaan IDPs yang dimunculkan akibat situasi bencana. Meski tidak secara khusus menyebut keberadaan pengungsi lingkungan, tapi aturan ini memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi pengungsi. Melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan dokumen turunan lainnya, pemerintah merumuskan strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, termasuk penguatan kapasitas adaptasi bagi masyarakat rentan di daerah rawan bencana dan perubahan iklim. Pemerintah juga mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi dalam RPJMN dan Pembangunan Berbasis Risiko dalam strategi pembangunan, meskipun masih terbatas pada aspek teknis dan belum

menyentuh pengakuan status sebagai pengungsi lingkungan (Puspita dkk., 2023).

Di level internasional, Indonesia juga turut serta dalam perumusan tata kelola global soal lingkungan dan pengungsi yang secara langsung maupun tidak mendukung respons terhadap pengungsi lingkungan. Di rezim lingkungan internasional, Indonesia merupakan pihak pada UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Paris Agreement. Dalam konteks ini Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) yang mencakup adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko dan kerentanan masyarakat. Lewat skema adaptasi dan loss and damage, Indonesia ikut mendorong agenda dukungan internasional bagi negara berkembang yang terdampak bencana iklim, termasuk potensi perpindahan penduduk. Indonesia juga terlibat dalam Platform on Disaster Displacement (PDD). Meski Indonesia bukan anggota penuh, Indonesia menghadiri beberapa pertemuan dan diskusi yang diadakan oleh PDD, sebuah forum internasional yang bertujuan mengatasi displacement akibat bencana alam dan perubahan iklim. PDD merupakan kelanjutan dari Nansen Initiative, yang mendorong pengakuan pengungsi lintas batas akibat bencana lingkungan. Indonesia ikut meratifikasi dan menjalankan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015–2030 (Puspita dkk., 2023). Kerangka ini menekankan pengurangan risiko bencana dan perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks ini, Indonesia mengembangkan strategi nasional pengurangan risiko bencana, termasuk relokasi dan perlindungan warga terdampak.

Di rezim pengungsi internasional, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Namun, Indonesia tetap terlibat secara normatif dan administratif dalam tata kelola pengungsi melalui kerja sama dengan UNHCR dan IOM. Meski belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia mengadopsi prinsip non-refoulement melalui Perpres No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang bisa menjadi dasar moral dan administratif untuk menangani berbagai bentuk pengungsi, termasuk yang terdampak lingkungan (Maula, 2024). Indonesia juga mendukung GCM, yang secara eksplisit menyebutkan dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan sebagai faktor migrasi. GCM membuka ruang dialog dan kebijakan tentang migrasi karena bencana dan degradasi lingkungan, meski status hukumnya belum mengikat (McLeman, 2019).

Seperti dijelaskan diawal, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi lingkungan belumlah eksplisit. Untuk itu ke depan Indonesia perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, kerangka Hukum Nasional yang inklusif dengan meninjau ulang UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memasukkan skema perlindungan jangka panjang bagi pengungsi lingkungan; memperluas cakupan UU Keimigrasian dan Rencana Aksi Nasional HAM untuk mengakomodasi migrasi karena bencana atau degradasi lingkungan; menyusun regulasi lintas sektor yang menjembatani kebijakan lingkungan hidup, keimigrasian, dan kemanusiaan. Di level global, Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam mendorong pembentukan rezim yang mengakui status pengungsi lingkungan. Upaya yang bisa dilakukan misalnya aktif dalam forum UNHCR, IOM, dan UNFCCC untuk mendorong pembentukan mekanisme perlindungan bagi

pengungsi lingkungan lintas batas (Syahrin, 2024). Indonesia juga bisa mendukung inisiatif seperti PDD, GCR dan GCM. Terakhir, Indonesia bisa memperluas kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara Pasifik melalui ASEAN atau PIF, terutama dalam mekanisme respons bencana dan relokasi terkoordinasi. Indonesia dapat mendorong pembentukan kerangka kerja ASEAN yang menyediakan mekanisme penanganan bersama terhadap perpindahan lintas negara akibat bencana iklim; mengedepankan prinsip non-refoulement dan perlindungan HAM; menyediakan panduan etik dan praktis bagi negara anggota dalam menangani pengungsi lingkungan di kawasan. Perlu diingat juga karena potensi kedatangan pengungsi dari wilayah negara sekitar, Indonesia perlu menyusun skenario kontinjensi di wilayah-wilayah perbatasan dan kawasan transit seperti Papua, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi.

Simpulan

Perubahan iklim telah menghasilkan bentuk baru perpindahan paksa yang memunculkan kategori pengungsi lingkungan, yakni individu atau kelompok yang terdorong meninggalkan tempat tinggalnya akibat degradasi lingkungan dan bencana alam. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengakuan hukum internasional yang eksplisit terhadap kelompok ini. Instrumen utama seperti Konvensi Pengungsi 1951 tidak mencakup perpindahan akibat faktor lingkungan, sementara lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR belum menetapkan definisi resmi terkait. Ketiadaan kerangka normatif yang jelas turut diperburuk oleh kompleksitas dalam mengidentifikasi motif perpindahan yang kerap bersifat

multidimensional, serta keberatan sejumlah negara terhadap pengakuan formal karena potensi implikasi sosial dan fiskal yang menyertainya.

Di tingkat nasional dan regional, respons terhadap isu pengungsi lingkungan masih cenderung bersifat sektoral dan reaktif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim telah mengalami berbagai bentuk perpindahan internal akibat bencana, meskipun belum terdapat kerangka hukum yang secara khusus mengatur pengungsi lingkungan. Upaya yang telah dilakukan umumnya berlandaskan pada kebijakan penanggulangan bencana dan strategi adaptasi perubahan iklim, serta keterlibatan dalam rezim lingkungan global seperti UNFCCC, Paris Agreement, dan Platform on Disaster Displacement. Di sisi lain, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap prinsip perlindungan melalui kebijakan domestik.

Ke depan, Indonesia perlu memperkuat kerangka kebijakan nasional yang lebih inklusif terhadap dimensi lingkungan dalam isu migrasi dan pengungsian. Reformasi hukum domestik yang mengintegrasikan perspektif lingkungan, migrasi, dan HAM menjadi krusial, seiring dengan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi risiko perpindahan yang semakin kompleks. Di tingkat internasional dan kawasan, Indonesia juga perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong pembentukan norma dan mekanisme perlindungan pengungsi lingkungan, baik melalui forum-forum global seperti UNFCCC, IOM, dan UNHCR, maupun melalui penguatan kerja sama regional di ASEAN guna menghadapi potensi perpindahan lintas batas akibat krisis iklim secara kolektif dan terkoordinasi.

Daftar Pustaka

- Almulhim, A. I., Alverio, G. N., Sharifi, A., Shaw, R., Huq, S., Mahmud, M. J., ... & Abubakar, I. R. (2024). Climate-induced migration in the Global South: an in depth analysis. *Npj Climate Action*, 3(1), 47.
- BNPB. (2020). Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020.
- Claire, A., Elie, J. (2019). The difficult legal consideration of climate migrants. *Alternatives Humanitaires*, 11, 76–87
- ClimateKIC. (n.d.). Experimentation Fund Cohort 2023-2024: The Asia Pacific Refugee Rights Network. <https://www.climate-kic.org/programmes/learning-by-doing/silp/fund/cohort-aprrn/#:~:text=regional%20advocacy%20network>
- De Coninck, J., & Soete, A. (2022). Non-refoulement and climate change-induced displacement: Regional and international cross-fertilization?. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 31(3), 421-434.
- Gemenne, F., Blocher, J., & De Longueville, F. (2015). How climate extremes are affecting the movement of populations in the Asia Pacific region. In *Global Implications of Development, Disasters and Climate Change* (pp. 41-60). Routledge.
- Hartmann, B. (2010). Rethinking climate refugees and climate conflict: Rhetoric, reality and the politics of policy discourse. *Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association*, 22(2), 233-246.

- Hennida, C. (2012). Perubahan Iklim dan Potensi Konflik di Kawasan Asia Selatan. *Jurnal Global & Strategis*, 6(2), 201-213.
- IOM. (2023). IOM Strategy for Indonesia (2022-2025). https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-08/pub2022_0_0.pdf
- Khanh-Linh Ta, L. (2023). Protection for 'Climate Migration' in Southeast Asia; Examining the Role of International Environmental Law. *International Law Blog*. <https://internationallaw.blog/2023/12/19/protection-for-climate-migration-in-southeast-asia-examining-the-role-of-international-environmental-law/>
- Marthin, A., & Budiman, L. (2020). The discourse of climate migration: Unravelling the politics of ASEAN's environmental policies. *Pacific Journalism Review*, 26(2), 35-51.
- Maula, Bani Syarif. "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid Al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism." *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 1-40.
- Mayer, B. (2013). Environmental migration: Prospects for a regional governance in the Asia-Pacific Region. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 16, 77-103.
- McAdam, J. (2020). Protecting people displaced by the impacts of climate change: The UN human rights committee and the principle of non-refoulement. *American Journal of International Law*, 114(4), 708-725.
- McAdam, J. (2024). Expanding Refugee Protection for a Changing Climate. *UNSW Newsroom*. <https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2024/06/expa>

nding-refugee-protection-changing-
climate#:~:text=adopted%20the%20Pacific%20Regional
%20Framework

- McLeman, R. (2019). International migration and climate adaptation in an era of hardening borders. *Nature Climate Change*, 9(12), 911-918.
- McMichael, C., Barnett, J., & McMichael, A. J. (2012). *An overview of climate change and migration. Annual Review of Environment and Resources*.
- Morrissey, J. (2012). Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'. *Journal of Political Ecology*, 19(1), 36-49.
- Pratt, T. (2023). Value differentiation, policy change and cooperation in international regime complexes. *Review of International Political Economy*, 30(6), 2206–2232. <https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2262478>
- Price, S., & Singer, J. (Eds.). (2015). *Global implications of development, disasters and climate change: Responses to displacement from Asia pacific*. Routledge.
- Puspita, Natalia Yeti, Yanti Fristikawati, and Piter Zunimik. "Legal Protection of Internally Displaced Persons due to Climate Change Disaster in Indonesia." *JE Asia & Int'l L*. 16 (2023): 339.
- Satria, L. (2024). Perubahan iklim picu migrasi dan pengungsian di Indonesia. *Republika*, 16 Oktober. <https://esgnow.republika.co.id/berita/slg3zm416/perubahan-iklim-picu-migrasi-dan-pengungsian-di-indonesia>

- Swain, A. (1996). Displacing the conflict: Environmental destruction in Bangladesh and ethnic conflict in India. *Journal of Peace Research*, 33(2), 189-204.
- Syahrin, M. A., Qalandy, M. R., & Jafizhan, M. S. (2024). In Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: A State Security and Human Rights Protection Approach. *The Age of Human Rights Journal*, (22), e8255-e8255.
- UNHCR. (2025). Access to territory and non-refoulement. *Emergency Handbook*. <https://emergency.unhcr.org/protection/legal-framework/access-territory-and-non-refoulement>
- UNNews. (2018). Global Compact on Refugees: How is this different from the migrants' pact and how will it help? <https://news.un.org/en/story/2018/12/1028641>

Menggagas Pendekatan Komprehensif Keamanan Manusia: Aktivisme Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Xinjiang

*Sarah Anabarja
Arvian Ijlal Adhipratama
A. Safril Mubah*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan politik China dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya menjadi salah satu kekuatan global yang paling berpengaruh. Di kawasan Indo-Pasifik, China telah meningkatkan pengaruhnya melalui berbagai inisiatif, termasuk Belt and Road Initiative (BRI) dan beragam inisiasi pembangunan infrastruktur. Namun, di balik kesuksesan ekonomi dan politik China, terdapat isu keamanan manusia yang serius, terutama di wilayah Xinjiang. Berdasarkan temuan dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM), termasuk Human Rights Watch (2021) dan Amnesty International (2021), setidaknya lebih dari satu juta warga Uighur telah ditahan dalam “kamp-kamp re-edukasi” yang sebenarnya lebih mirip dengan penahanan massal yang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas. Penahanan ini sering kali disertai dengan penyiksaan fisik, penghilangan paksa, dan upaya sistematis untuk menghapus identitas budaya dan keagamaan Uighur. Laporan-laporan yang muncul juga

mengungkapkan bahwa wanita Uighur sering menjadi korban sterilisasi paksa sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menekan angka kelahiran di kalangan etnis ini.

Selain itu, pemerintah China juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat Uighur dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau setiap aspek kehidupan pribadi mereka. Hal ini termasuk penggunaan alat pengawasan canggih, seperti pengenalan wajah dan pelacakan digital yang membatasi kebebasan individu secara drastis (Finley, 2020; Slawotsky, 2021; VoA Indonesia, 2024). Tindakan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran berat terhadap HAM dan bahkan digolongkan sebagai genosida oleh sejumlah negara dan organisasi internasional. Dalam hal ini, kebijakan represif yang diterapkan di Xinjiang bukan hanya mencerminkan kebijakan domestik China yang menargetkan kelompok etnis tertentu, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan, termasuk kawasan Asia Tenggara, yang memiliki hubungan erat dengan China dalam hal ekonomi dan politik.

Isu-isu keamanan manusia di Xinjiang telah menjadi perhatian internasional dan telah memicu protes dan kritik dari berbagai negara dan organisasi HAM. Apalagi akhir-akhir ini China telah dipandang sebagai kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keamanan manusia di kawasan tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, negara-negara Indo-Pasifik telah mengalami peningkatan tekanan dari China. Salah satu kejadian terbaru yang memperlihatkan dampak kekuatan China terhadap kawasan ini adalah kebijakan Thailand yang mendeportasi 40 orang Muslim Uighur pada Februari 2025

(Reuters, 2025). Kebijakan deportasi ini disinyalir sebagai bentuk dari tekanan China terhadap Pemerintah Thailand untuk mengembalikan 40 orang tersebut yang telah tinggal di Thailand sejak tahun 2014 lalu. Hal ini diungkapkan oleh kelompok oposisi Thailand dan diakui pula oleh Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Russ Jalichandra. Setidaknya empat negara, yakni: Kanada, Amerika Serikat (AS), Swedia, dan Australia, telah menawarkan *resettlement* pada Thailand untuk 40 Muslim Uighur tersebut (Kashgary & Jewlan, 2025).

Akan tetapi Jalichandra, menyatakan bahwa Pemerintah Thailand khawatir akan tindakan retaliasi yang dilakukan China jika Thailand tidak mendeportasi 40 orang tersebut. Apalagi kemudian AS juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan memberikan sanksi berupa pembatalan visa AS bagi para pejabat Thailand yang telah dianggap sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab atas kebijakan deportasi tersebut (Willemyns, 2025). Hal ini semakin memperburuk situasi ini dan memperlihatkan konflik yang semakin mendalam antara HAM dan hubungan ekonomi internasional. Rentetan panjang atas kasus Xinjiang tersebut tentu saja menjadi kekhawatiran akan keberlangsungan keamanan manusia di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara, mengingat pengaruh China semakin kuat di kawasan ini.

Isu keamanan manusia pertama kali menjadi fokus utama dalam wacana internasional melalui laporan PBB pada tahun 1994. Pada perkembangannya, isu keamanan manusia tidak lagi didominasi oleh pendekatan berbasis negara. Peran aktor non-negara, utamanya masyarakat sipil, telah mengambil porsi yang semakin signifikan dalam pembentukan kesadaran terhadap kesadaran keamanan manusia, termasuk di Indonesia.

Sebelumnya, dalam studinya mengenai persepsi keamanan manusia di Indonesia, Alexandra (2019) mendapatkan kesan bahwa keamanan manusia kadang masih dianggap sebagai bagian atau sub-kategori dari keamanan nasional. Anggapan ini menjadi pertanda bahwa kesadaran terhadap keamanan manusia di negara ini masih didominasi oleh peran negara dalam pembangunan wacananya.

Di sisi lain, unggahan peristiwa dan tragedi kemanusiaan di dunia maya, telah membawa dampak terhadap tingkat kesadaran keamanan manusia, termasuk di Indonesia. Maraknya unggahan yang disertai dengan tagar #uighur, #saveuighur, #stopgenocide, #genocide, dan #uighurgenocide menunjukkan bahwa unggahan mengenai kasus diskriminasi dan isu yang mengancam keamanan manusia yang terjadi di Xinjiang, China, memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat sipil di Indonesia. Kesadaran tersebut bukan hanya berbentuk unggahan viral yang menunjukkan fakta dan korban genosida dan diskriminasi, akan tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aliansi kemanusiaan yang dilakukan oleh beragam organisasi atau aliansi kelompok masyarakat sipil.

Munculnya peran kelompok masyarakat sipil dalam isu keamanan manusia merupakan hal tak terelakkan. Terutama jika ternyata bentuk penyikapan terhadap isu keamanan manusia, seperti kasus pelanggaran HAM atau bahkan genosida, ternyata berbeda dengan respons yang ditunjukkan oleh pemerintah. Pada kasus Uighur di Xinjiang, penyikapan dan respons yang tercermin dari unggahan dengan tagar terkait memiliki ‘nada’ yang lebih tajam dan kritis, utamanya terhadap Pemerintah China. Unggahan yang berasal dari kelompok masyarakat sipil Indonesia di laman sosial media tersebut banyak yang mengarah

pada penyikapan yang kritis dan penggambaran yang gamblang tentang adanya isu diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Uighur di Xinjiang.

Hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan sikap Pemerintah Indonesia yang melihat bahwa isu Uighur merupakan sebuah respons Pemerintah China terhadap separatisme di Xinjiang (IPAC, 2019). Respons lain juga ditunjukkan pemerintah pada Oktober 2022 lalu, saat Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak mosi untuk mendiskusikan situasi Xinjiang di Komisi HAM PBB (The Jakarta Post, 2022). Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC, 2019) mencatat penyikapan pemerintah atas isu Uighur tersebut dipengaruhi oleh determinan politik domestik Pemerintah Indonesia yang terkait dengan isu HAM di Papua. Hal ini sejalan dengan Karim (2020) yang menyatakan bahwa kekhawatiran Indonesia terhadap potensi dampak global terhadap integritas teritorialnya, khususnya terkait dengan masalah separatisme di Papua, turut membentuk sikap negara ini dalam menangani isu HAM secara internasional. Selain itu, relasi Indonesia dan China dalam hal perdagangan dan investasi menjadi faktor lain yang melatarbelakangi penyikapan tersebut (IPAC, 2019; Karim, 2020).

Sementara di lain kasus, misalnya genosida di Palestina, penyikapan Pemerintah Indonesia tampak jauh lebih lantang dan tegas. Hal tersebut dapat ditinjau dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan para pemimpin negara, baik dalam forum internasional maupun pernyataan publiknya. Demikian pula, pada kasus Rohingya di Rakhine, Myanmar, respons yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia melalui kebijakan '*silent diplomacy*' juga dianggap

ambivalen, tergantung bagaimana kondisi politik domestik dan regional Asia Tenggara mempengaruhinya (Petra *et al.*, 2024). Ambivalensi dan kerancuan sikap pemerintah akan isu yang mengancam keamanan manusia, menjadi salah satu faktor utama bagi kelompok masyarakat sipil untuk berperan menginisiasi kesadaran akan isu keamanan manusia di Indonesia.

Peran masyarakat sipil maupun koalisinya, memiliki peran penting dalam promosi agenda keamanan manusia melalui beragam peran yang dimilikinya (Mc.Rae & Hubert, 2001). Meski signifikansinya tentu beragam dan naik-turun seiring dengan perubahan kondisi situasi global (Black, 2014). Meski demikian, Eze (2016) menggarisbawahi masyarakat sipil memang memiliki peran yang komplementer dengan pemerintah dalam upaya penciptaan perdamaian dan keamanan, termasuk dalam upaya memastikan perlindungan terhadap keamanan manusia. Ia mencontohkan pada konteks Afrika, peran masyarakat sipil dalam promosi keamanan manusia dengan cara membangun kepemilikan kolektif sebagai intervensi masyarakat terhadap krisis kemanusiaan (Eze, 2016).

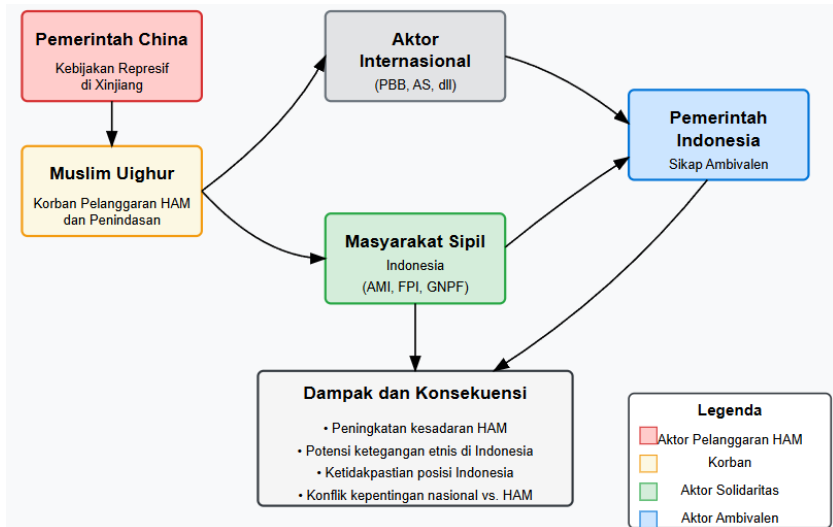
Aktivisme Masyarakat Sipil Indonesia atas Kasus Genosida Uighur

Isu keamanan manusia telah menjadi fokus utama dalam pergolakan internasional, khususnya terkait HAM yang terancam dalam berbagai konflik global. Kejahatan kemanusiaan yang dilaporkan terjadi di Xinjiang, China telah menarik perhatian internasional, tidak hanya dalam bentuk kecaman, tetapi juga dalam bentuk solidaritas aktif dari berbagai kelompok masyarakat internasional, termasuk Indonesia (Kourt, 2021; Yang & About The Convenor, 2021). Dalam hal ini,

Indonesia seharusnya berperan penting dalam merespons krisis kemanusiaan ini dengan memperlihatkan keterlibatan yang signifikan dalam percakapan internasional tentang HAM dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan, baik domestik maupun internasional (Gambar 1). Namun, Indonesia memperlihatkan sikap sebaliknya dan bersikap ambivalen, hal ini tidak sejalan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang gencar melakukan unjuk rasa terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang tersebut.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia, salah satunya Aliansi Mahasiswa Islam (AMI), telah aktif dalam mengorganisir unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Muslim Uighur. Unjuk rasa yang diadakan pada tahun 2023 di Jakarta ini menuntut agar Pemerintah China bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang menimpa Uighur, terutama tragedi di Ghujla 5. Selain itu, demonstrasi ini juga menuntut penghentian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah China, termasuk penghancuran tempat ibadah, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan beragama yang secara sistematis terjadi di Xinjiang (Detiknews, 2023; Antarafoto, 2023). Data menunjukkan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan dalam pusat-pusat re-edukasi yang diklaim oleh Pemerintah China sebagai tempat pelatihan untuk mengatasi ekstremisme, meskipun banyak laporan yang menunjukkan kondisi yang lebih dekat dengan penahanan massal dan penyiksaan (Human Rights Watch, 2024).

Gambar 1. Dinamika Respons Indonesia terhadap Isu Uighur di Xinjiang, China



(Sumber: Analisis Penulis)

Selain aksi massa, Indonesia juga menyaksikan diplomasi intensif oleh aktivis HAM, seperti kunjungan Rusman Abbas, pendiri Campaign for Uyghur, yang bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, Abbas memaparkan bahwa umat Muslim Uighur di Xinjiang tidak hanya menghadapi kekerasan fisik, tetapi juga penindasan terhadap praktik ibadah mereka, yang semakin memburuk dengan larangan terhadap simbol-simbol Islam dan pemantauan ketat oleh aparat negara (JURNIS, 2022; MUI, 2022). Laporan-laporan internasional juga menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah China secara sistematis telah menanggukkan kebebasan beragama dan

kebudayaan di Xinjiang, yang berdampak langsung pada identitas etnis dan keagamaan masyarakat Uighur.

Meski solidaritas masyarakat sipil Indonesia terhadap Uighur cukup tinggi, respons Pemerintah Indonesia terhadap krisis ini tergolong ambivalen. Meskipun Indonesia secara formal menegaskan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan perlindungan HAM, pemerintah Indonesia cenderung tidak mengkritik secara terbuka kebijakan represif China terhadap Uighur. Bahkan, pada tahun 2022, Indonesia menolak mosi yang diusulkan oleh Amerika Serikat di Dewan HAM PBB yang mengusulkan untuk mendiskusikan situasi Xinjiang. Alasan yang diberikan adalah pentingnya menjaga hubungan bilateral dengan China yang semakin kuat, serta prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain (VOA Indonesia, 2022; detiknews, 2022; Human Rights Watch, 2022).

Keputusan ini menyoroti ketegangan antara kepentingan politik domestik dan hubungan internasional yang semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia berusaha menjaga hubungan ekonomi dan tidak mengintervensi permasalahan domestik China, sementara di sisi lain, masyarakat sipil yang lebih kritis terhadap kebijakan China terus mendesak agar Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang (VOA Indonesia, 2022; Human Rights Watch, 2022). Ambivalensi ini menciptakan ketidakpastian dalam posisi Indonesia terhadap isu HAM, khususnya yang melibatkan negara besar seperti China. Hal ini menciptakan tantangan serius bagi masyarakat sipil dalam mempromosikan kesadaran tentang keamanan manusia tanpa menimbulkan kontradiksi yang dapat memicu ketegangan sosial di dalam negeri.

Aktivisme masyarakat sipil Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Xinjiang telah mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan isu-isu HAM, tetapi juga menimbulkan potensi dampak negatif bagi stabilitas sosial domestik. Sebagian kelompok masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, merespons secara emosional terhadap tragedi yang menimpa Uighur. Potensi ini dapat memengaruhi hubungan antara kelompok etnis Tionghoa di Indonesia dengan kelompok-kelompok tertentu yang terpengaruh oleh narasi solidaritas ini. Protes-protes yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dengan meningkatkan retorika anti-China, berisiko menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar di dalam negeri.

Pernyataan yang muncul dalam beberapa aksi protes di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh salah satu demonstran yang menyatakan ancaman terhadap etnis Tionghoa, mengindikasikan bahwa solidaritas internasional terhadap Uighur, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat berisiko memicu ketegangan sosial antar kelompok etnis di Indonesia (VOA Indonesia, 2018). Beberapa peserta demonstrasi bahkan menunjukkan pernyataan yang lebih ekstrem, termasuk ancaman terhadap keberadaan etnis China di Indonesia. Pernyataan ini menciptakan potensi eskalasi ketegangan etnis yang dapat merusak keamanan manusia di tingkat domestik, mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis yang tinggi.

Pendekatan Komprehensif untuk Pengarusutamaan Keamanan Manusia di Indonesia

Alexandra (2019), dalam studinya mengenai persepsi keamanan manusia di Indonesia, mendapatkan kesan bahwa keamanan manusia kadang masih dianggap sebagai bagian atau sub-kategori dari keamanan nasional. Anggapan ini menjadi pertanda bahwa kesadaran terhadap keamanan manusia di negara ini masih didominasi oleh peran negara dalam pembangunan wacananya. Sejalan dengan Alexandra (2019) dan Liu & Fitrah (2023) berpendapat bahwa internalisasi nilai keamanan manusia di Indonesia diwarnai beragam respons, baik secara institusional formal maupun nilai kemasyarakatan. Secara institusional, sejak diperkenalkannya konsep tersebut pada pertengahan 1990-an, skeptisisme akan penerapan nilai keamanan manusia ditunjukkan melalui pola pikir yang berbasis keamanan nasional. Hal ini kemudian diperburuk dengan situasi krisis moneter dan instabilitas politik yang mewarnai Indonesia tahun 1998. Hingga pada awal dekade 2000-an mengawali era reformasi, ide-ide keamanan manusia mulai terinternalisasi secara institusional di Indonesia. Diawali dengan disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2002 yang telah memasukkan unsur keamanan manusia di dalamnya. Kemudian pada tahun 2004, Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai menginisiasi agenda pembangunan nasional dengan kerangka keamanan manusia. Kemudian pada tahun 2005, Indonesia secara institusional mulai berkomitmen untuk mempromosikan agenda keamanan manusia.

Internalisasi secara insitusional nilai-nilai keamanan manusia tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat sipil yang saat reformasi menjadi salah satu kekuatan kuncinya.

Masyarakat sipil dapat mengambil peran lebih dari sekadar membendung ancaman terhadap keamanan manusia. Alkire (2002) bahkan juga mengungkapkan kelompok non-negara dalam menghadapi risiko perubahan institusional dan proses untuk perubahan sosial yang akan memberikan dampak jangka panjang pada keamanan manusia. Termasuk dalam rangkaian proses ini adalah tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengembangan kapasitas.

Selain internalisasi institusional, nilai-nilai keamanan manusia juga terjadi secara kemasyarakatan. Masyarakat sipil berperan secara komplementer pada proses internalisasi nilai-nilai keamanan manusia (Eze, 2016). Peran tersebut muncul sebagai respons atas keterbatasan peran pemerintah untuk menjamin tersedianya beragam aspek yang melingkupi keamanan manusia. Termasuk semakin beragamnya ancaman yang dihadapi oleh masyarakat secara nasional maupun global.

Menurut Alkire (2002), terdapat dua ancaman terhadap keamanan manusia 1) ancaman secara langsung atau disengaja. Ancaman ini disebabkan karena suatu kelompok seperti negara, teroris, faksi pemberontak, kelompok paramiliter dan lain sebagainya. Ancaman langsung biasanya dikaitkan dengan kekerasan, tetapi juga dapat mengambil bentuk lain, seperti kebijakan yang disengaja untuk mengucilkan masyarakat; 2) Ancaman tidak langsung. Ancaman ini dilakukan oleh kelompok, sistem, atau lembaga yang ancamannya terhadap keamanan manusia merupakan produk sampingan dari tindakan yang diambil karena memiliki tujuan utama yang berbeda (Alkire, 2002). Ancaman berat terhadap keamanan manusia dilihat dari beberapa bentuk seperti genosida, perbudakan, bencana alam, dan pelanggaran besar-besaran terhadap HAM,

seperti hak atas pangan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya (Kaldor et al., 2007).

Jika ditinjau dari beragamnya sumber dan ancaman yang menysasar pada keamanan manusia tersebut, maka peran masyarakat sipil akan makin besar. Namun, besarnya peran masyarakat sipil tidak jarang menimbulkan beragam langkah keliru bahkan ancaman bagi keamanan manusia pada sisi lainnya. Pada kasus aktivisme masyarakat sipil Indonesia untuk Uighur di atas misalnya, telah terjadi kekeliruan yang menjadi ancaman terhadap etnis tertentu di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendekatan komprehensif tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan perlu memperhatikan titik temu yang proporsional dalam internalisasi nilai keamanan manusia (Weller, 2014).

Gambar 2. Aspek-aspek Keamanan dalam Pendekatan Komprehensif



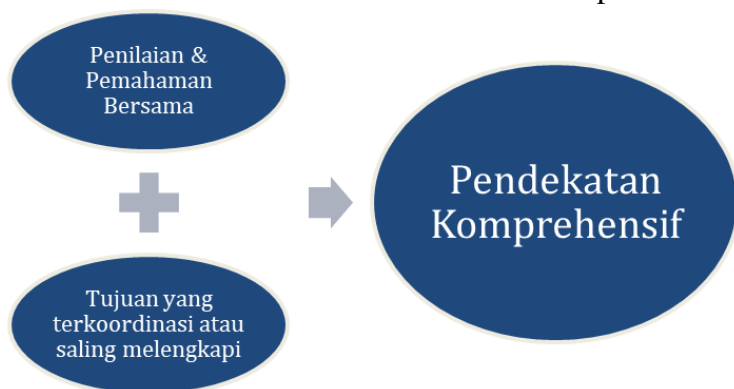
(Sumber: Weller, 2014)

Model pendekatan komprehensif dalam keamanan manusia adalah pendekatan yang menitikberatkan pada aspek manusia yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan merespons pada segala risiko yang berpotensi mengancam kesejahteraan manusia. Pendekatan ini bukan hal yang baru, tetapi bukan hal yang mudah dan sederhana untuk diterapkan karena luasnya aspek keamanan manusia (Weller, 2014; Jansen & Krammer, 2023). Dalam perspektif pendekatan komprehensif, isu keamanan manusia dipandang sebagai sesuai yang inheren dan tidak terlepas kelindannya antara domestik dan internasional. Weller (2014) menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini, aspek keamanan manusia, tidak bisa terlepas dari aspek keamanan nasional, keamanan transnasional, serta aspek pembangunan, dan perdamaian global (Gambar 2).

Pendekatan komprehensif mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi dalam beragam aktivitas yang melibatkan aktor lokal dan internasional (De Coning & Friis, 2011). Meskipun pendekatan ini banyak dipergunakan untuk *fragile state*, tetapi pendekatan ini memiliki inherensi bagi penerapan nilai keamanan manusia. Walaupun, terdapat kompleksitas yang perlu diperhatikan. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan kerja sama, koordinasi, serta integrasi atau koeksistensi yang terjalin antara elemen diplomasi dan pembangunan, serta implementasinya pada tataran lokal. Tantangan yang menyertai pendekatan ini adalah penerapannya yang kompleks (De Coning & Friis, 2011). Untuk itu, Weller (2014) kemudian menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang disepakati oleh beragam pihak dalam pendekatan tersebut.

Menurut Weller (2014), untuk mengurangi kompleksitas dalam pendekatan komprehensif ini, tiap aktor harus menyepakati tujuan minimum terlebih dahulu. Hal ini penting untuk kemudian mereka dapat membentuk mekanisme berbagi informasi, serta koordinasi lanjutan atas implementasi nilai keamanan manusia yang dituju. Weller (2014) kemudian membuat pemodelan atas elemen minimum yang harus dipenuhi dalam pendekatan komprehensif ini; (1) penilaian & pemahaman bersama (*shared assessment & shared understanding*) dan (2) tujuan yang terkoordinasi atau saling melengkapi (*coordinated or complementary goals*) (Gambar 3). Dalam penerapannya, pendekatan ini membutuhkan keterlibatan proaktif dan preventif, serta pentingnya pemahaman bersama antara pihak-pihak mengenai konteks dan kemampuan masing-masing, kebutuhan untuk berpikir berbasis hasil dan tujuan serta ukuran efektivitas yang disepakati bersama, dan kerja kolaboratif.

Gambar 3. Elemen Pendekatan Komprehensif



(Sumber: Weller, 2014)

Dalam penerapan pendekatan ini, pada kasus aktivisme masyarakat sipil Indonesia terkait Xinjiang, hal yang krusial untuk diperhatikan ke depan adalah identifikasi menyeluruh terhadap aktor-aktor yang terlibat serta kapasitas masing-masing pihak. Sebelumnya, telah disebutkan berbagai contoh aktivisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat. Munculnya gerakan ini lebih banyak dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ambivalensi sikap pemerintah dalam merespons isu Xinjiang. Secara khusus, hal ini memicu diskusi mengenai pentingnya peran tingkat lokal dalam memastikan terciptanya dan terjaganya keamanan manusia.

Dalam rangka menginternalisasi keamanan manusia secara kemasyarakatan, diperlukan sebuah operasionalisasi yang terstruktur dan terencana untuk memastikan kedua elemen dalam pendekatan komprehensif dapat terlaksana dengan baik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan harus dioperasionalkan untuk memastikan adanya pemilikan bersama terhadap isu keamanan manusia yang menjadi fokus. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain: (1) mengidentifikasi dan menyepakati aspek keamanan manusia yang menjadi prioritas, (2) mengonversi aspek tersebut dalam konteks lokal yang relevan, (3) melibatkan dan mengakomodasi berbagai aktor lokal yang terdampak oleh isu keamanan manusia tersebut, serta (4) memetakan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi aspek keamanan manusia yang dimaksud.

Dengan upaya kontekstualisasi antara dua aspek dalam pendekatan komprehensif, diharapkan internalisasi nilai keamanan manusia di Indonesia dapat berjalan lebih terkoordinasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam internalisasi institusional, sementara masyarakat sipil berperan

dalam internalisasi kemasyarakatan. Kedua pihak ini dapat menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang lebih baik di dalam negeri. Meskipun demikian, isu kemanusiaan internasional tetap perlu diperhatikan dan tidak boleh diabaikan.

Simpulan

Kasus Uighur di Xinjiang, China menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani isu-isu keamanan manusia di Indonesia (Gambar 3). Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan sosial domestik. Kesadaran terhadap kasus yang mengancam keamanan manusia, seperti genosida di Xinjiang, telah menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, ada ambivalensi sikap Pemerintah Indonesia terhadap isu yang berkaitan dengan keamanan manusia yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik dan pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan. Kedua, ambivalensi ini mendorong peningkatan peran masyarakat sipil dalam membangun kesadaran akan isu-isu tersebut. Meskipun demikian, peran masyarakat sipil harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi munculnya kontra-narasi yang dapat merusak keharmonisan sosial di Indonesia, terutama terkait dengan masyarakat etnis Tionghoa yang mungkin terpengaruh oleh narasi internasional. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan penjelasan tentang posisi Indonesia terhadap isu-isu internasional terkait HAM, agar narasi yang dibangun tidak berpotensi memperburuk ketegangan sosial. Selain itu, penguatan elemen pendekatan komprehensif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan internalisasi nilai keamanan manusia di Indonesia.

Peran masyarakat sipil dalam keamanan manusia sangat penting karena masyarakat sipil memiliki peran komplementer yang mendukung upaya pemerintah. Namun, agar peran ini efektif, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun oleh masyarakat sipil tidak berkembang menjadi kontradiktif atau mengancam keamanan manusia di dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat pendekatan holistik terhadap keamanan manusia yang melibatkan peran aktif masyarakat sipil dalam menangani permasalahan global. Namun, pengelolaan narasi yang berkembang harus dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan sinergis yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat sipil akan memastikan bahwa agenda keamanan manusia memberikan dampak positif secara global, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan domestik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alexandra, L. (2019). Perceptions on Human Security: An Indonesian View. *Human Security Norms in East Asia*. In Y. Mine, O. A. Gomez, & A. Muto, *Human Security Norms in East Asia* (pp. 67-89). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Alkire, S. (2002, February 16). Conceptual Framework for Human Security. Discussion Paper for the Commission on Human Security.
- Amnesty International. (2021, July 10). China: Draconian repression of Muslims in Xinjiang amounts to crimes against humanity. Retrieved March 22, 2025, from

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/china-draconian-repression-of-muslims-in-xinjiang-amounts-to-crimes-against-humanity/>

- Antarafoto.com. (2023, February 3). UNJUK RASA SOLIDARITAS UNTUK MUSLIM UIGHUR. antarafoto.com. Retrieved March 17, 2025, from <https://www.antarafoto.com/id/view/1871175/unjuk-rasa-solidaritas-untuk-muslim-ughur>
- Black, D. R. (2014). Civil Society and the Promotion of Human. *Asian Journal of Peacebuilding*, 169-184.
- De Coning, C., & Friis, K. (2011). Coherence and coordination: The limits of the comprehensive approach. *Journal of International Peacekeeping*, 243–272.
- Detiknews. (2022, October 7). RI Tolak Usul AS soal Debat Isu Uighur di PBB, Kemlu: Cegah Politisasi. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6334827/ri-tolak-usul-as-soal-debat-isu-ughur-di-pbb-kemlu-cegah-politisasi>
- Detiknews. (2023, February 3). Mahasiswa geruduk Kedubes China, kecam kekerasan terhadap Muslim Uighur. Detiknews. Retrieved March 17, 2025, from <https://news.detik.com/foto-news/d-6549467/mahasiswa-geruduk-kedubes-china-kecam-kekerasan-terhadap-muslim-ughur>
- Eze, C. B. (2016). The Role of CSOs in Promoting Human Rights Protection, Mass Atrocities Prevention, and Civilian Protection in Armed Conflicts. *Global Responsibility to Protect*, 249-269.
- Finley, J. S. (2020). Why scholars and activists increasingly fear a Uyghur genocide in Xinjiang. *Journal of Genocide*

- Research, 23(3), 348–370. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1848109>
- Human Rights Watch. (2021). “Break their lineage, break their roots.” In Human Rights Watch. Retrieved March 22, 2025, from <https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting>
- Human Rights Watch. (2022, October 19). Indonesia shamelessly abandons Uyghurs. Human Rights Watch. Retrieved March 11, 2025, from <https://www.hrw.org/news/2022/10/19/indonesia-shamelessly-abandons-uyghurs>
- Human Rights Watch. (2024). Asleep at the wheel. In Human Rights Watch. Retrieved March 22, 2025, from <https://www.hrw.org/report/2024/02/01/asleep-wheel/car-companies-complicity-forced-labor-china>
- IPAC. (2019). The Exodus to Southeast Asia: Explaining Indonesia Silence on the Uyghur Issue. JSTOR.
- Jansen, M., & Krammer, e.-H. (2023). The Future of the Comprehensive Approach as a Strategy for Intervention. In E. M. Kramer, Violence in Extreme Conditions. Cham: Springer.
- JURNIS. (2022, October 17). Sambangi MUI, Aktivis HAM Uighur Cerita Kondisi Memprihatinkan di Xinjiang. Jurnal Islam. Retrieved March 17, 2025, from <https://jurnalislam.com/sambangi-mui-aktivis-ham-uighur-cerita-kondisi-memprihatinkan-di-xinjiang/>
- Karim, M. F. (2020). The limits of global human rights promotion: Indonesia’s ambivalent roles in the UN Human Rights Council. *Contemporary Politics*, 26(3),

351–370.

<https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1720065>

Kashgary, J., & Jewlan. (2025, March 6). Radio Free Asia. Retrieved March 18, 2025, from [rfa.org: https://www.rfa.org/english/uyghur/2025/03/06/thailand-uyghurs-deported/](https://www.rfa.org/english/uyghur/2025/03/06/thailand-uyghurs-deported/)

Kaldor, M., Martin, M., & Selchow, S. (2007). "Human Security". *International Affairs*, 83(2): 273-288.

Kourt, N. (2021). United Nations' response to mass atrocities in China. *Global Responsibility to Protect*, 13(1), 33–36. <https://doi.org/10.1163/1875-984x-13010006>

Liu, F.-K., & Fitrah, E. (2023). Human Security Policy Initiative on Catastrophic Disaster and Crisis Response in Indonesia. *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences* (pp. 43-64). *KnE Social Sciences*.

McRae, R., & Hubert, D. (2001). *Human Security and New Diplomacy: Protecting People, Promoting Peace*. Montreal and Kingston: McGill Queen University Press.

MUI. (2022, October 17). Silaturahmi ke MUI, Aktivis HAM Uighur Beberkan Kondisi Terkini Muslim Xinjiang China. *Majelis Ulama Indonesia*. Retrieved March 17, 2025, from <https://mirror.mui.or.id/berita/39677/silaturahmi-ke-mui-aktivis-ham-uighur-beberkan-kondisi-terkini-muslim-xinjiang-china/>

Petra, H. A., Amalia, N. R., & Ahmadi, S. (2024). Muhammadiyah and the Indonesian Government's Peace Diplomacy toward the Rohingya Conflict. *SHS Web Conf.* 204 (2024) 06001, (pp. 1-6).

- Reuters. (2025, March 14). Reuters. Retrieved March 16, 2025, from [retuters.com: https://www.rfa.org/english/uyghur/2025/03/14/uyghur-us-visa-sanctions-thai-deportation/](https://www.rfa.org/english/uyghur/2025/03/14/uyghur-us-visa-sanctions-thai-deportation/)
- Slawotsky, J. (2021). Is China guilty of committing genocide in Xinjiang? *Chinese Journal of International Law*, 20(3), 625–635. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmab029>
- The Jakarta Post. (2022, October 7). The Jakarta Post. Retrieved March 17, 2025, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/10/07/indonesia-rejects-un-motion-to-scrutinize-chinas-human-rights-record.html>
- VOA Indonesia. (2018, December 22). Demo Protes Kebijakan China terhadap Etnis Muslim Uighur. VOA Indonesia. Retrieved March 17, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/demo-protes-kebijakan-china-terhadap-etnis-uighur/4711859.html>
- VOA Indonesia. (2022, October 7). Indonesia Tolak Dewan HAM PBB Bahas Isu Uighur di Xinjiang. VOA Indonesia. Retrieved March 20, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tolak-dewan-ham-pbb-bahas-isu-uighur-di-xinjiang/6780205.html>
- VOA Indonesia. (2024). VOA. Retrieved March 20, 2025, from [voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-ham-ratusan-ilmuwan-uighur-ditahan-di-china/7756081.html](https://www.voaindonesia.com/a/voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-ham-ratusan-ilmuwan-uighur-ditahan-di-china/7756081.html)
- Weller, E. (2014). *Comprehensive Approach to Human Security*. Knowledge Platform Security and Rule of Law.

- Willemyns, A. (2025, March 14). Radio Free Asia. Retrieved from rfa.org: <https://www.rfa.org/english/uyghur/2025/03/14/uyghur-us-visa-sanctions-thai-deportation/>
- Yang, Y. & About The Convenor. (2021). Crossing the river by feeling the stones. In **WORLD SCIENTIFIC eBooks** (pp. 1–43). https://doi.org/10.1142/9789811241116_0001

Peran United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) Mengakomodasi “Indigenous knowledge” Masyarakat Adat Terkait Isu Keamanan Manusia dalam Tata Kelola Global Kebencanaan

(Global Disaster Governance)

Siti R. Susanto

Himmalia D. A. Rahmah

Pendahuluan

Dalam diskursus HI klasik yang hanya memfokuskan pada peran negara sebagai determinan dalam dinamika politik internasional, keberadaan masyarakat adat begitu sangat minor atau bahkan nihil. Hal ini disebabkan karena posisi masyarakat adat yang sering digambarkan sebagai aktor periferi yang sangat tradisional yang menempati wilayah-wilayah terpencil dunia, jauh dari pusat keramaian, serta sangat mempertahankan nilai tradisi mereka. Oleh karena itu, keberadaan mereka merupakan negasi dari isu modernitas dan internasional yang sifatnya dinamis, *up-to date*, dan canggih.

Alhasil, masyarakat adat semakin ditinggalkan dalam isu pembangunan nasional dan global. Dengan kata lain, mereka adalah salah satu golongan masyarakat minoritas yang paling rentan dalam kebijakan negara maupun organisasi internasional, termasuk terkait penanganan bencana. Tercatat beberapa kasus dalam penanganan bencana alam yang terjadi, keberadaan masyarakat adat menjadi pihak yang sangat terdampak. Hal ini

seperti yang dialami oleh suku Métis, Inuit, dan First Nations di Kanada yang menjadi korban terbesar akibat bencana kebakaran hutan (Binon, 2024), termasuk juga suku Aborigin di Australia (Rosenhek dan Atkinson, 2024), dan suku Rukai di Taiwan yang terdampak taifun Morakot pada 2009 (Chuang, 2023). Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi keberadaan masyarakat adat yang jumlahnya mencapai 476 juta, yang merupakan 6 persen dari penduduk dunia, terlebih lagi 19 persennya berada di dalam kondisi kemiskinan yang sangat akut (World Bank, 2023). Dengan kondisi kesejahteraan yang minim, tingkat hidup masyarakat adat adalah 20 tahun lebih pendek dari pada kondisi masyarakat lainnya yang bisa mencapai 70 tahun atau 80 tahun (World Bank, 2023). Dalam kerangka konsep keamanan manusia (*human security*), kondisi masyarakat adat terkait isu bencana sangat rentan, padahal mereka adalah pihak yang selama ratusan tahun telah terbukti bisa hidup harmonis berdampingan dengan alam menggunakan IK-nya walaupun minim bahkan steril dari alat bantu teknologi modern.

Kondisi tersebut secara gradual mengalami perbaikan, ketika globalisasi menjadi tren besar politik internasional pasca Perang Dingin. Aktor-aktor minor internasional akhirnya memiliki peran yang signifikan, meskipun secara ukuran dan otoritas mereka berada di bawah posisi negara. Masyarakat adat (*indigenous people*) pun akhirnya mendapatkan rekognisi di level internasional karena memiliki identitas khas, spesifik, dan kedaulatan atas masyarakat dan komunitas yang mereka wakili. Keberadaan masyarakat adat mulai mendapatkan pengakuan sebagai salah satu aktor potensial internasional yang bisa bersuara dan berperan, termasuk dalam isu penanganan bencana, melalui eksistensi *indigenous knowledge* (IK).

Hal semakin jelas pada saat diadopsinya IK dalam United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) yang merupakan tata kelola global terkait isu kebencanaan di bawah PBB mulai tahun 2000 melalui pembentukan The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang merupakan sebuah badan penasihat tingkat tinggi dalam UN Economic and Social Council (ECOSOC) yang berfokus pada penghormatan atas eksistensi masyarakat adat terkait isu ekonomi dan Pembangunan sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia (IUCN, 2019). IK adalah seperangkat pemahaman, praktik, ketrampilan, dan nilai filosofis yang dikembangkan masyarakat adat dimana semua komponen tersebut memiliki sejarah dan relasi historis dengan lingkungan alam sebagai tempat tinggal (UNESCO, 2017). Meskipun IK sering digambarkan sebagai praktik budaya yang statis, tetapi kenyataannya IK diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat adat dan berfungsi memberikan rujukan pada mereka tentang bumi beserta ekosistemnya, sekaligus kelengkapan untuk mengobservasi perubahan lingkungan yang berjalan selama ratusan abad (UNESCO, 2017). Oleh karena itu, beberapa kalangan menilai jika IK bisa menawarkan pengetahuan yang berada di luar jangkauan metode ilmiah. Dengan kata lain, IK bisa melengkapi rujukan keilmuan perspektif Barat yang cenderung menjadi rujukan dominan tata kelola bencana global. Dengan demikian, artikel ini meneliti bagaimana UNDRR berperan memfasilitasi IK masyarakat adat terkait isu keamanan manusia (*human security*) dalam tata kelola global kebencanaan.

Global Disaster Governance, human security, dan masyarakat adat

Secara ilmiah hubungan antara penanganan global isu kebencanaan dan diadopsinya IK sebagai representasi masyarakat adat terkait wacana keamanan manusia dapat dijelaskan berdasarkan teori *global disaster governance* (GDG). Sebelum menjelaskan GDG, maka perlu dijelaskan hubungan antara masyarakat adat dan keamanan manusia. Menurut Hossain (2013) keamanan manusia berfokus pada isu terpenuhinya kebutuhan mendasar individu dalam konteks politik dan sosial, yang hampir sebagian besarnya sangat terkait dengan isu hak asasi manusia (HAM). Hal ini terjadi karena isu HAM melindungi setiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk hidup setara dan mempertahankan eksistensinya, termasuk menjamin ketersediaan akses terhadap sumber daya dan ekonomi (Hossain, 2013). Oleh karenanya, konsep tersebut yang membentuk relasi antara masyarakat adat dan isu keamanan manusia melalui IK, karena IK merupakan sebuah praktik menjamin terpenuhinya *human security* di kalangan masyarakat adat. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama jika budaya dan pengetahuan masyarakat adat sangat berkontribusi menjaga berlangsungnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, tidak terkecuali bagaimana mereka mencegah, mempersiapkan, dan merespon atas terjadinya bencana alam (UN, n.d, Jonsson, 2022). Dalam konteks inilah, masyarakat adat terhubung dengan *disaster governance* (DG).

Berdasarkan definisi Tierney (2012), *disaster governance* adalah upaya terkait penanganan bencana yang menekankan pada 3 poin. Pertama, mengacu pada sistem tata kelola mengantisipasi dampak dan resiko bencana yang terjadi

pada masyarakat (*risk reduction*); kedua, strategi mengintervensi bencana melalui pemberian insentif terkait pengelolaan, pengetahuan, kelembagaan, perilaku, dan proses pengambilan keputusan dalam isu lingkungan; dan ketiga, fokus pada upaya penjagaan tata kelola sistem kebumiharian (*earth system governance*), yang meliputi gabungan strategi sistem peraturan formal dan informal serta jaringan aktor di semua tingkat masyarakat yang dibentuk untuk memengaruhi proses evolusi perkembangan manusia dan alam dengan cara yang menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sehingga sebagai sebuah praktik norma, organisasi, aktor-aktor yang terlembaga dalam periode masa sebelum, saat dan pasca bencana, yang ditujukan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam, dampak teknologi, dan tindakan terorisme, DG merupakan sebuah upaya kolaborasi bersama yang melibatkan semua pihak yang memiliki kapasitas kebencanaan, termasuk masyarakat adat melalui IK (Tierney, 2012).

Dengan tipologi *governance* yang ada, menurut Tierney (2012) maka DG memiliki beberapa karakter yang melekat: pertama adalah *polycentric* dan *multiscale*, yang artinya bahwa karena sistem kebencanaan melibatkan banyak pihak dengan kapasitas masing-masing, akhirnya melahirkan sistem dengan banyak pusat dengan skala yang beragam antara satu dengan yang lain. Kedua, *fragmented* dan *unbalanced*, sebagai konsekuensi dari poin pertama maka DG akhirnya terpecah-pecah operasionalisasinya dan memiliki ketidakseimbangan antara satu dengan yang lain. Salah satu konsekuensinya adalah dari sisi kecenderungan akomodasi aktor-aktor yang terlibat, misalnya adalah keterlibatan masyarakat adat yang minim. Meskipun DG sudah mengakui keberadaan masyarakat adat

sebagai elemen penting sejak akhir 1980-an, tetapi dinilai masih sangat rendah, implisit, bahkan kurang. Sehingga komitmen terhadap masyarakat adat kembali ditegaskan dalam UNDRR pada era globalisasi.

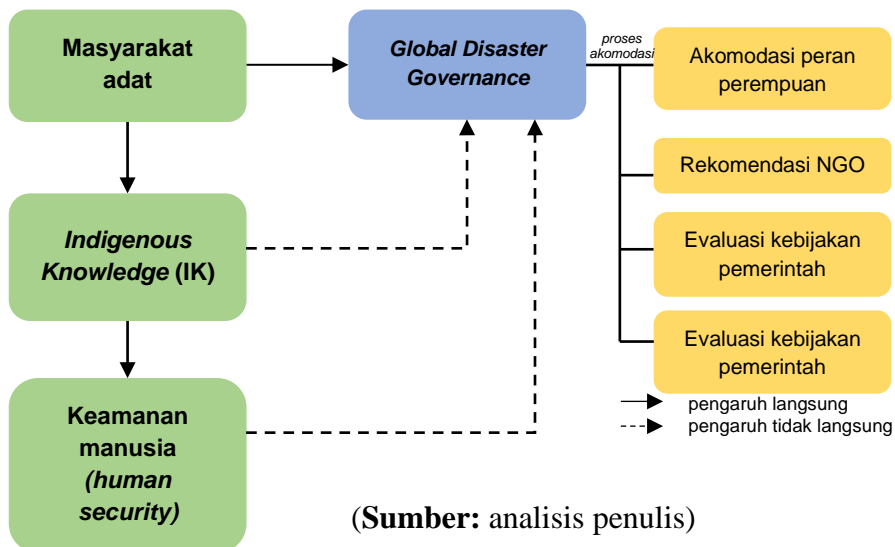
Dengan tipologi karakter di atas, tidak bisa dihindari jika tata kelola kebencanaan masih memiliki banyak kelemahan sehingga perlu terus dikembangkan. Jonsson (2022) mencatat bahwa terdapat kelemahan dalam DG khususnya dalam mengurangi risiko kebencanaan karena terkendala oleh kesenjangan pada negara atau aktor terkait isu penanganan bencana, kurangnya kerangka regulasi, kurangnya data tentang risiko bencana, tidak adanya budaya pembiayaan risiko, dan keengganan aktor negara maupun aktor terkait menciptakan mekanisme pemberian jaminan bagi investasi terhadap aspek tata kelola kebencanaan. Selalu diidentifikasi dengan proyek kerugian, tata kelola bencana kurang mendapatkan sambutan positif dari banyak kalangan. Padahal jika dikelola secara serius, terukur dan terintegrasi, maka terdapat aspek keuntungan ekonomi yang besar dari isu DG. Masih kuatnya wacana kerugian dari tata kelola bencana mengakibatkan peran masyarakat adat dan IK masih cenderung terpinggirkan, padahal mereka sudah terbukti ratusan abad lamanya dapat mempertahankan eksistensi masyarakat adat yang ada, mampu hidup berdampingan dengan alam, dan melakukan aktivitas produktif sosial ekonomi, politik yang berkelanjutan.

Namun dengan adanya globalisasi, yang menjadikan keberadaan entitas-entitas budaya serta adat diakui keberadaannya setara sebagaimana entitas negara atau aktor internasional yang lain, maka secara bertahap keberadaan masyarakat adat melalui IK-nya semakin diakui perannya untuk

terlibat dalam kerangka global DG melalui UNDRR (Jonsson, 2022).

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun Jonsson (2022) menggambarkan secara garis besar jika terdapat proses akomodasi IK dalam UNDRR. Pertama, diakomodasikannya isu keterlibatan budaya dalam DG diawali dengan difokuskannya pada wacana tentang representasi serta pemenuhan kebutuhan perempuan dalam tata kelola bencana. Hal ini sangat berhubungan dengan isu pengarusutamaan gender karena menjadi isu global yang lebih dulu muncul dibanding isu masyarakat adat. Selain itu, karena fungsi perempuan adalah tidak hanya reproduksi biologis tetapi juga reproduksi budaya; maka perempuan sering mewakili kondisi masyarakat adat yang juga berperan serupa. Kedua, proses pengakomodasian dilakukan melalui diskusi intensif komprehensif dengan *non-governmental organizations* (NGOs) sebagai pihak yang sering merepresentasikan posisi masyarakat adat di level internasional. Ketiga, UNDRR mengevaluasi kebijakan negara dalam merespon isu kebencanaan yang pernah terjadi. Keempat, mekanisme instusionaliasi dimana UNDRR menerbitkan rekomendasi, membuat *norm-setting* mengenai kebencanaan, dan memformalkannya dalam aktifitas badan PBB, termasuk dengan memberikan apresiasi dan penghargaan atas peran masyarakat adat secara resmi.

Gambar 4. Relasi Masyarakat Adat, *Indigenous Knowledge*, Keamanan Manusia, dan *Global Disaster Governance*



UNDRR: sejarah, kerangka dan akomodasi terhadap masyarakat adat serta budayanya

Dalam struktur politik internasional, termasuk sejak berdirinya PBB pada 1945, isu kebencanaan pada dasarnya bukan merupakan isu sentral yang menjadi prioritas bersama. Sebagai sebuah praktik tradisional kebencanaan, yang cenderung dilakukan PBB adalah berfokus mengatasi dampak setelah terjadinya bencana melalui pemberian bantuan darurat. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah bencana alam yang terjadi dan korban yang jatuh, pada 1970 isu bencana alam (*natural disaster*) dan pengurangannya (*natural disaster reduction*) telah

masuk dalam agenda PBB melalui mekanisme Majelis Umum, yang selanjutnya dibentuk tata kelola globalnya melalui UN Disaster Relief Office atau UNDRO pada 1971 (UNDRR, 2022). Pada 1980-an terdapat sebuah pergeseran paradigma dimana Majelis Umum PBB yang mulai menekankan pada pentingnya mengurangi dampak bencana bagi semua orang. Tahun 1987 merupakan periode ketika tata kelola kebencanaan global mulai dilakukan secara inklusif, yaitu dengan mulai memasukkan peran semua kalangan masyarakat global, termasuk masyarakat adat. PBB juga memberikan penghargaan bagi semua kalangan yang berperan besar dalam isu tersebut melalui Sasakawa Award. Perhatian terhadap isu bencana berkembang pesat di 1990, dengan ditetapkannya International Decade for Disaster Risk Reduction, yang bertujuan meningkatkan kerjasama internasional dimana secara kelembagaan akhirnya melahirkan kerangka global kebencanaan sebagai berikut:

- 1) the 1994 First World Conference on Disaster Reduction and the Yokohama Strategy for a Safer World (the Yokohama Strategy). Strategi ini menegaskan bahwa masyarakat menjadi semakin rentan terhadap bencana.
- 2) The Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, (the Hyogo Framework). bahwa risiko bencana telah menjadi perhatian global dan perlunya pendekatan yang lebih proaktif, termasuk melibatkan masyarakat lokal.
- 3) the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (the Sendai Framework). Kerangka Sendai menandai peralihan dari konsep manajemen bencana

menjadi manajemen risiko bencana, selain itu juga lebih berfokus pada bahaya alam maupun buatan manusia.

Berdasarkan ketiga kerangka di atas, kontribusi masyarakat adat diakui secara resmi dalam DG meski prosesnya berjalan bertahap. Agar lebih memberikan uraian yang lebih komprehensif bagaimana UNDRR mengakomodasi IK dan masyarakat adat dalam DG, maka selanjutnya dijelaskan mengenai studi kasus peran masyarakat adat Simeulue Aceh dalam mengkonstruksi DG gempa bumi melalui praktek budaya mereka yang disebut dengan *Smong*.

Studi Kasus: *indigenous knowledge* masyarakat Simeulue terhadap gempa dan *smong*

Peningkatan perhatian yang substantial pada studi terkait peran indigenous knowledge dalam praktik DRR kemudian dapat dikaitkan dengan bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 (Hiwasaki et al., 2014). Bencana yang dipicu oleh gempa bumi sebesar 9.1–9.3 M_w ini menjadi salah satu yang terkuat karena dampaknya dapat dirasakan di beberapa negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar), Asia Selatan (Sri Lanka, Maladewa, dan India), hingga beberapa bagian di pantai timur Afrika. Dengan pusat gempa di sisi barat daya Aceh, 40% kerusakan terjadi di kawasan pantai, utamanya di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya (Syafwina, 2014 Syamsidik et al., 2019). Simeulue, sebuah kabupaten di pulau yang terletak 100 km dari pusat gempa pun tidak lepas dari gempa dan tsunami ini. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 78 ribu jiwa, jumlah korban meninggal tercatat tidak lebih dari 7

orang (McAdoo, 2006). Peran signifikan masyarakat Simeulue dalam mengurangi korban jiwa bahkan mendapatkan penghargaan UN Sasakawa Award for Disaster Reduction pada tahun 2005.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum bencana ini, tidak ada sistem peringatan dini terintegrasi yang dibangun oleh pemerintah maupun NGOs di kawasan Samudra Hindia. PBB melalui UNESCO Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) sebenarnya telah bekerja untuk memonitor gempa bumi dan potensi tsunami di kawasan Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*) dikarenakan tingginya frekuensi gempa dan tsunami di kawasan tersebut (McAdoo, 2006). Oleh karena itu, rendahnya jumlah korban jiwa di Simeulue memunculkan perhatian dan ketertarikan untuk mengetahui cara masyarakat setempat menyelamatkan diri di tengah kurangnya informasi resmi dan cepat tanggap terkait mitigasi dan evakuasi bencana.

Tidak banyak catatan maupun tulisan yang dapat dijadikan referensi terkait Simeulue sebelum 2005. Menurut Marschall (2010), Pulau Nias yang berseberangan dengan Simeulue justru memiliki bukti literatur dan peninggalan sejarah yang lebih beragam. Informasi terkait Simeulue kebanyakan direkam oleh ahli bahasa Kähler sejak tahun 1938 hingga 1963. Kähler mempelajari dan mendokumentasikan ragam ungkapan lokal dan tata bahasa asli Simeulue, oleh karena itu perbandingan maupun pendalaman antropologis terkait pulau Simeulue pun tidak banyak ditemukan. Selain itu, tidak ada juga warisan budaya berbentuk fisik yang dapat diteliti dikarenakan bencana tsunami yang terjadi hampir satu abad sebelumnya (Sutton et al., 2001).

Kurangnya perhatian terhadap Simeulue dapat dilihat dari buruknya catatan terkait gempa bumi dan tsunami mematikan yang terjadi pada tahun 1907. Perlu diingat bahwa sebagai kawasan yang banyak terpengaruh oleh sosial dan keagamaan Aceh, penduduk Simeulue pun mayoritas beragama Islam (Marschall, 2010). Oleh karena itu, bencana yang terjadi pada hari Jumat, 4 Januari 1907 itu diestimasikan memakan korban sebesar 50-70% dari total populasi Simeulue yang tidak sempat menyelamatkan diri dikarenakan sedang melaksanakan ibadah salat Jumat (Rahman et al., 2018). Masyarakat lokal menyebut peristiwa ini sebagai *smong*, yang kemudian berkembang menjadi lebih dari sekadar terminologi untuk mengidentifikasi bencana, namun juga sebagai kearifan yang diturunkan ke generasi penerus.

Smong berasal dari bahasa Suku Devayan, kelompok etnis terbesar di pulau tersebut. Rahman et al. (2002) menjelaskan bahwa *smong* mencakup pengalaman masyarakat dalam menggambarkan rangkaian peristiwa gempa bumi yang disusul oleh surutnya air laut dan kemudian datangnya ombak besar. Belajar dari pengalaman sebelumnya, masyarakat setempat kemudian mengabadikan *smong* melalui budaya lisan seperti *nafi-nafi* (cerita dan nasihat), *nandong* (nyanyian dan musikalisasi puisi), dan lagu pengantar tidur (Rahman et al., 2018; Sutton et al., 2021). Pemahaman mendalam masyarakat terhadap budaya lokal inilah yang membantu penduduk Simeulue selamat dari Tsunami 2004.

Akomodasi UNDRR terhadap *Smong*

UNDRR merilis buku panduan *Words into Action: Using Traditional and Indigenous Knowledges for Disaster Risk Reduction* (2022) sebagai rujukan dan akses pengetahuan terkait langkah pencegahan risiko bencana untuk ahli, pembuat kebijakan, serta komunitas. UNDRR menjelaskan bahwa penggunaan IK harus beranjak dari sekadar mendokumentasikan dan ‘mengemas’ kebudayaan asli masyarakat dikarenakan ada bahaya penyederhanaan realitas dan hambatan struktural yang menjadikan masyarakat rentan terhadap bencana. Oleh karenanya, akomodasi terhadap IK pada praktik pencegahan risiko bencana harus melalui keterlibatan masyarakat lokal yang lebih mendalam.

Hubungan antara sains dan pengetahuan lokal bersifat mutualistik. IK mampu memberi informasi spesifik terkait kebencanaan, sementara sains akan lebih mudah diserap ketika dikolaborasikan dan disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat. Oleh karenanya, UNDRR menegaskan pentingnya mengakui peran integral komunitas lokal dalam kerangka pencegahan bencana, misalnya melalui pelibatan masyarakat setempat dalam proses dialog dan formulasi kebijakan. Sementara itu, peneliti eksternal dapat menggunakan metode seperti wawancara, survei, maupun pembuatan video untuk memperkenalkan pengetahuan lokal tersebut (UNDRR, 2022).

Dalam menginkorporasikan pengetahuan lokal dengan strategi DRR, perlu pandangan bahwa solusi adalah sebuah proses dan bukannya tujuan akhir itu sendiri (UNDRR, 2022). Hal ini akan memastikan komunitas pemilik pengetahuan bisa secara kreatif mengembangkan inisiatifnya. Dalam pengetahuan

smong misalnya, masyarakat bebas mengadaptasi sejarah dalam bentuk kebudayaan nyanyian dan cerita.

Gambar 5. *Nafi-nafi* (cerita dan nasihat) terkait *Smong*

Bahasa Devayan

Nga sao nafi nafi, Inang maso nang ere, waktu iye taon tuju. Ra angkume singa marasokan, rasesewan mek dia mai, fani manjadi pengalaman orep. Maso iye falal rima'at ngahae termasuk melafek ae. Sahuli fesang linon, mek mek liti ne ata ado raik sia ra aidek. Sefelne ata ere la o da me kota, sebayang rima'at alek balanjo. fesang sa a Linon sebel. Unen unen mali Linon, saa ra enak owek asen ngang suruik, sagalo nae ngang fesete fete etak angkal angkal iye. Daram nae iya sebagian ata ere me tot ra aleko. Araya saa ado ran tek iye meram bakat sebel toro i deden asen, menandan menan alefo. Sagalo tu a tu a hampong ranau u maong. Smong! Smong! Smong! Minau humodong mek delok! Minau humodong mek delok! sakajap Fesang Smong sebel, sao saone hampong ranap. Sefelne ata ere ado sempat sia manyalamatkan diri, fahae pengalaman.

Matuai smongia, ranau tot bebalek mek hampong, da asek asek uluda, nga singa singa umengek, maraong simahawali anak, si mahawali lafe, simahawali tu a tu a da. Anga ata ngang be gelimpangan ek iye mowi. Te en sol ata tapi marek hebao matae,manok matae. Ngang ulagu kiamat iya anga singa maninggal afel mowi lebi satenga satiok hampong iya fa eng ata. Smongia taekne nida 10–15 m. Mek mek tae ne smongia afel ata, hebao atos tasanguik ek detak ayo ayo. sahek nga singa nilewan mek delok.

Jadi, singa harus teher mi redem, anga alek Linon sebel, mi aheya mi enak owek asen, anga suruik, minau lanjar humodong mek delok atao omae famon singa ataek. Aifak ame malibu mangabek falon forae, gulo, asila, enen, sulot, fisok. Nue nue so ere miredeman teher, mi sesewan mek anakne mobome, atang railla.

Bahasa Indonesia

Inilah cerita pengalaman nenek moyang kita yang terjadi di zaman dulu kala, ketika tahun tujuh. Mereka mewariskan cerita ini kepada kita untuk mengingat apa yang terjadi di masa lalu sebagai refleksi dalam hidup kita. Saat Jumat pagi, ketika orang-orang bersiap menuju masjid dan sebagian berangkat ke pasar, tiba-tiba gempa bumi kuat terjadi, orang-orang pun tidak dapat berdiri dengan tegak. Orang-orang melihat air laut surut dan ikan terdampar di tepi pantai. Namun malang, banyak yang lari ke pantai untuk mengambil ikan itu. Ombak besar datang dari laut dan mencapai daratan. Orang tua segera berteriak *Smong* berulang kali. Tetapi banyak orang tidak cukup waktu untuk berlari.

Setelah *Smong* reda, orang-orang kembali ke desa dan melihat banyak yang telah mati. Lebih dari setengah penduduk desa tidak selamat. Air diperkirakan setinggi 10-15 meter; kami melihat banyak orang, kerbau, dan ayam yang mati, dan sebagian terjebak di pucuk pohon, dan sebagian terdampar di atas bukit yang tingginya 10-15 meter.

Saat gempa besar tiba, segeralah amati perubahan air laut atau sungai. Jika engkau menemui surut, bergegaslah berlari dari pantai dan larilah ke tempat yang tinggi. Bawalah nasi, gula, penerangan, pisau, korek, dan pakaian. Ingatlah cerita ini dan wariskan kepada generasi selanjutnya.

(**Sumber:** Rahman et al., 2018, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penulis)

Dalam komunitas masyarakat Simeulue, *nafi-nafi* menjadi media utama untuk mempelajari *Smong*. Praktik ini tak hanya membantu masyarakat mengidentifikasi sebuah fenomena alam, namun juga cara untuk menyelamatkan diri dan bertahan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2018) membuktikan bahwa responden yang menerima *nafi-nafi Smong* langsung dari orang yang mengalami tsunami tahun 1907 dapat lebih tanggap dalam memahami situasi dan menjadi penggerak utama dalam evakuasi. Namun kelompok responden yang tidak mendapatkan cerita langsung dari penyintas tsunami 1907 cenderung menganggap *smong* sebagai takhayul. UNDRR menyoroti seringnya sistem peringatan dini yang bersumber dari pengetahuan lokal dianggap sebatas anekdot sehingga menyebabkan terpinggirkannya pengetahuan dari pelibatan praktik dan kebijakan DRR (UNDRR, 2022). Dengan demikian, *smong* perlu dilestarikan dan dikembangkan agar bisa menjadi pengetahuan lokal yang arus utama dan bertahan lintas generasi. Bagi anak-anak, kisah *smong* bisa dijumpai saat mereka selesai mengaji hingga pengantar tidur. Dalam konteks ini, diperlihatkan jika salah satu mekanisme sosialisasi *smong* adalah melalui keterlibatan perempuan yang secara pengambilan keputusan publik mungkin dirasakan sangat kurang. Tetapi dalam konteks tata kelola dan aktivitas kerumahtanggaan dan pendidikan keluarga, peran perempuan sangat signifikan termasuk dalam mengajarkan *smong* dikalangan balita, anak-anak, dan generasi muda (lihat gambar 2).

Selain itu, masyarakat sering mempertunjukkan *nandong smong* dalam pesta adat, pernikahan, hingga pertemuan keluarga. Namun generasi muda cenderung tidak memiliki kedekatan emosional terhadap *smong* sehingga tidak acuh

kepada signifikansi pengetahuan tersebut (Sutton et al., 2021). Ini artinya, tradisi penuturan lisan *smong* harus dikembangkan dalam bentuk yang lebih menarik, misalnya melalui animasi maupun video dokumenter sehingga memiliki rekam digital dan dapat lebih mudah diintegrasikan ke dalam kebijakan DRR yang lebih terstruktur.

Gambar 6. Animasi *Smong*



(Sumber: Izzato Studio, 2020)

Gambar 7. Film dokumenter *Smong* yang menggambarkan peran Ibu



(Sumber: Museum Tsunami Aceh, 2023)

Gambar 8. Video singkat *Senandung Smong: Tradisi Lisan yang Ajarkan Cara Hadapi Tsunami*



(Sumber: DW Indonesia, 2023)

Meskipun UNDRR sendiri tidak secara eksklusif mempromosikan pengetahuan lokal dari komunitas tertentu, UNDRR berperan dalam menyarankan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan pengetahuan lokal dalam kebijakan DRR. Strategi ini meliputi (1) pembangunan lembaga yang bertanggungjawab dalam koordinasi kebijakan DRR; (2) melakukan pengumpulan data dan studi terbaru; (3) melaksanakan dialog antar penduduk lokal dan panel ahli; (4) menyiapkan asesmen risiko; dan (5) mengkomunikasikan hasil studi dalam bahasa daerah setempat (UNDRR, 2022).

Setelah Tsunami 2004, pemerintah Indonesia kemudian menerapkan sistem komprehensif *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan koordinasi diseminasi informasi peringatan dini tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa informasi tersebut dapat tersebar kurang dari tiga menit setelah gempa pertama terdeteksi (Prasetyo, 2024). Maka dari itu, sejalan dengan visi UNDRR, kearifan *smong* dapat diintegrasikan dengan sains dan teknologi dengan cara memberi informasi yang terlokalisasi dan membantu verifikasi lapangan. Integrasi ini dapat memaksimalkan potensi DRR karena kedua pengetahuan dapat saling melengkapi kekurangan yang ada (UNDRR, 2022). Pada akhirnya, meskipun masyarakat dapat menyelamatkan diri berkat familiaritas dengan *smong*, evakuasi yang tanggap harus dilakukan berdasarkan rencana evakuasi terstruktur yang dibentuk atas kebijakan berbasis bukti yang disusun oleh pemerintah (McAdoo, 2006).

Simpulan

Keberadaan konsep keamanan manusia, masyarakat adat, *indigenous knowledge*, dan *global disaster governance* memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam menghadapi tantangan global, terutama bencana alam dan krisis lingkungan. Masyarakat adat melalui pengetahuan lokalnya (IK) telah lama mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem. Konsep keamanan manusia yang berfokus pada perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk keamanan lingkungan dan sosial, dapat diperkuat melalui integrasi IK ke dalam kebijakan *global disaster governance*, termasuk dalam kerangka UNDRR. Dengan demikian, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat serta pengetahuan tradisional mereka menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola bencana yang inklusif dan efektif. Hal tersebut salah satunya bisa dibuktikan bagaimana UNDRR mengakomodasi IK masyarakat Simelue dalam mengurangi resiko gempa alam yang terjadi saat tsunami besar melanda pesisir Samudra Hindia pada 2004.

Selanjutnya, *global disaster governance* yang responsif harus memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga mitra aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. IK menawarkan solusi berbasis lokal yang sering kali lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis. Dengan memadukan pendekatan keamanan manusia yang holistik, kearifan lokal masyarakat adat, dan kerangka *global disaster governance*, dunia dapat membangun ketahanan yang lebih kuat terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan yang berkeadilan sosial. Sinergi ini menunjukkan bahwa masa depan pengurangan risiko bencana

harus dibangun atas kolaborasi yang setara antara pengetahuan modern dan tradisional.

Daftar Pustaka

- Binon, Elisa. 2024. Canada's Indigenous peoples increasingly at risk of disaster displacement. *International Displacement Monitoring Centre*. <https://www.internal-displacement.org/expert-analysis/canadas-indigenous-peoples-increasingly-at-risk-of-disaster-displacement/>.
- DW Indonesia (2023, Desember 26). *Senandung Smong: Tradisi Lisan yang Ajarkan Cara Hadapi Tsunami* [Video]. YouTube. https://youtu.be/N11eqeI56yo?si=XpSsECihJ-OZ_LcW
- Hiwasaki, L., Luna, E., & Shaw, R. (2014). Process for integrating local and indigenous knowledge with science for hydro-meteorological disaster risk reduction and climate change adaptation in coastal and small island communities. *International journal of disaster risk reduction*, 10, 15-27. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdr.2014.07.007>
- Hossain, Kamrul. 2013. "Securing the Rights: A Human Security Perspective in the Context of Arctic Indigenous Peoples". *The Yearbook of Polar Law*, The Netherlands: Brill.
- IUCN. 2019. Indigenous Peoples' Struggle for Recognition of Traditional Knowledge & the UNPFII. *IUCN*. <https://iucn.org/news/commission-environmental-economic-and-social-policy/201906/indigenous-peoples-struggle-recognition-traditional-knowledge-unpfii>.

- Izzato Studio (2020, Oktober 30). *Smong* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/gN0YBkSROK4?si=X-B92Iu6KLgVbGRu>
- Jonsson, Josefin. 2022. *Indigenous Peoples and Power Relations in Disaster Risk Reduction: A Critical Discourse Analysis of Three UNDRR Frameworks*. Uppsala University: Bachelor Thesis of Development Studies.
- Marschall, W. (2010). Nias and Simeulue. Dalam A. Graf, S. Schröter, E. Wieringa (Eds.), *Aceh History, Politics and Culture*. ISEAS Publishing.
- McAdoo, B.G., Dengler, L., Prasetya, G., Titov, V. (2006). *Smong*: How an Oral History Saved Thousands on Indonesia's Simeulue Island during the December 2004 and March 2005 Tsunamis. *Earthquake Spectra*, 22(3), 661-669.
- Museum Tsunami Aceh (2023, September 19). *Smong - Film Dokumenter Tsunami* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/q3jfbNaQZBA?si=Jwf2hWZycL-VqWM1>
- Prasetyo, M. R. B. E. (2024, Oktober 2). BMKG Pastikan Distribusi Peringatan Tsunami Kurang dari Tiga Menit. *Antara Bali*. <https://bali.antaranews.com/rilis-pers/4370419/bmkg-pastikan-distribusi-peringatan-tsunami-kurang-dari-tiga-menit>
- Rahman, A., Sakurai, A., Munadi, K. (2018). The Analysis of the Development of the *Smong* Story on the 1907 and 2004 Indian Ocean Tsunamis in Strengthening the Simeulue Island Community's Resilience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 29 (2018), 13-23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.07.015>

- Rahman, A., Sakurai, A., Sutton, S., Syahbandir, M., Nofiradi, N. (2022). *Smong Means More than Tsunami: The Understanding of Tsunami in the Indonesian Context. E3S Web of Conferences*, 340, 3-10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234003010>
- Rosenhek, Ruth, Caroline Atkinson. 2024. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, gender and disaster: A Commentary. *Australian Journal of Emergency Management*, July, 39(3), 87-93.
- Sutton, S.A., Paton, D., Buergelt, P., Sagala, S., Meilianda, E. (2021). Nandong Smong and Tsunami Lullabies: Song and Music as an Effective Communication Tool in Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62 (2021) 102527. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102527>
- Syafwina (2014). Recognizing Indigenous Knowledge for Disaster Management: *Smong*, Early Warning System from Simeulue Island, Aceh. *Procedia Environmental Sciences*, 20 (2014), 573-582. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.070>
- Syamsidik, Nugroho, A., Oktari, R. S., Fahmi, M. (2019). *Aceh Pasca Lima Belas Tahun Tsunami: Kilas Balik dan Proses Pemulihan*. Tsunami and Disaster Mitigation Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala.
- Tierney, Kathleen. 2012. "Disaster Governance: Social, Political, and Economic Dimensions". *The Annual Review of Environment and Resource*, 37, h. 341–63.
- UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2022). *Words Into Action: Using Traditional and Indigenous Knowledges for Disaster Risk Reduction*.

<https://www.undrr.org/words-into-action/traditional-and-indigenous-knowledges-drr>

UNESCO. 2017. Local Knowledge, Global Goals. *UNESCO*.
<https://en.unesco.org/links>.

United Nations. n.d. Indigenous People. *UN*.
<https://www.un.org/en/observances/indigenous-day>.

World Bank. 2023. *Indigenous People*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>.

Chuang, Yu-Chen. 2023. Tracing Disaster Injustice: Indigenous People's Vulnerability and Resilience in Taiwan. *Taiwan Insight*.
<https://taiwaninsight.org/2023/10/13/tracing-disaster-injustice-indigenous-peoples-vulnerability-and-resilience-in-taiwan/>

BAGIAN III: TANTANGAN KEAMANAN NON- TRADISIONAL DI INDO-PASIFIK

Relevansi Ekonomi Biru ASEAN bagi Keamanan Pangan Indonesia

Baiq Wardhani

Pendahuluan

Ekonomi biru dalam konteks Indo-Pasifik merupakan peluang yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, dan memastikan kesehatan ekosistem laut. Sebagai salah satu kawasan paling dinamis di dunia, Indo-Pasifik merupakan wilayah yang kaya keanekaragaman hayati, garis pantai yang luas, dan rute pelayaran yang penting, sehingga menjadikannya titik fokus bagi inisiatif ekonomi biru. Ekonomi biru bahkan menjadi tujuan kebijakan publik di Indo-Pasifik (Singh, 2022). Dengan berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, ekonomi biru merupakan pendekatan transformatif. Potensi Indo-Pasifik yang signifikan dalam keanekaragaman hayati laut dan potensi ekonomi, menjadikan ekonomi biru sebagai bagian penting dari strategi resiliensi bagi keamanan manusia di wilayah ini. Tulisan ini berfokus pada bagaimana ekonomi biru dioperasionalkan di ASEAN dan Indonesia, dan apa implikasinya terhadap keamanan manusia, khususnya keamanan pangan biru.

Perkembangan ekonomi biru di ASEAN semakin pesat karena negara-negara anggota menyadari potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan

meningkatkan kerja sama regional. Pendekatan ini khususnya relevan untuk Asia Tenggara, yang sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh lautan, sehingga menghadirkan peluang besar bagi pembangunan ekonomi (Gamage, 2016). Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada di garis depan inisiatif ini, memanfaatkan sumber daya lautnya yang melimpah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan penghidupan masyarakat pesisirnya. Untuk mengakselerasi penerapan ekonomi biru, Indonesia menerbitkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, yang diluncurkan selama Forum Ekonomi Biru ASEAN. Dokumen ini menguraikan pendekatan komprehensif untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya secara berkelanjutan. Dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai yang membentang sekitar 108.000 kilometer, wilayah maritim Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Peta jalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Kawasan Konservasi Perairan hingga mencakup 30% perairannya pada tahun 2045, sehingga mendorong lingkungan laut yang sehat dan produktif yang penting untuk menopang perikanan dan akuakultur—dua sektor penting untuk ketahanan pangan (Arisepplus Indonesia, 2023).

Dengan mendiversifikasi ekonomi maritimnya, Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus memastikan pasokan makanan bergizi yang stabil bagi penduduknya (Sardan, et al., 2023). Integrasi praktik berkelanjutan dalam sektor-sektor ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ekosistem, yang secara langsung memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan. Selain itu, kerangka ekonomi biru sejalan dengan upaya global

untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan nol kelaparan (SDG 2); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8); Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDG 9); Mengurangi Ketimpangan (SDG 10); Aksi Iklim (SDG 13); Kehidupan di Bawah Air (SDG 14).

Ekonomi Biru ASEAN dan Keamanan Pangan

Para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi biru melalui Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Ekonomi Biru, yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 pada bulan Oktober 2021. ASEAN mendefinisikan ekonomi biru sebagai “pendekatan yang terpadu, holistik, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan yang menciptakan nilai tambah dan rantai nilai sumber daya dari lautan, laut, dan air tawar secara inklusif dan berkelanjutan, menjadikan ekonomi biru sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi masa depan ASEAN.” Sesuai dengan salah satu tujuan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk melaksanakan prioritas kerja sama ASEAN yang ada dan menjajaki area kerja sama lain, termasuk kerja sama maritim, konektivitas, SDGs, ekonomi, dan area kerja sama lain yang memungkinkan, Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN mendorong dengan mengutamakan ASEAN Centrality sebagai prinsip dasar untuk mendorong kerja sama di kawasan Indo-Pasifik (ASEAN.org, 2023).

Lautan merupakan bagian penting dari kehidupan, mata pencaharian, dan pertukaran ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Rute perdagangan kuno telah membentuk budaya, kepercayaan, bahasa, migrasi, arsitektur, dan perkembangan

mereka. Wilayah ini menyediakan sumber daya laut yang sangat melimpah. Negara-negara ASEAN memperoleh hingga 30 persen PDB mereka dari ekonomi kelautan (Lihat Tabel). Perairan teritorial ASEAN mencakup tiga kali ukuran daratan negara-negara anggotanya. Terdapat dua negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Filipina. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat luas, termasuk lebih dari 2.000 spesies ikan, dan sepertiga dari padang lamun, tutupan terumbu karang, dan luas hutan bakau di dunia (Randhawa, 2024). Chan, et al. (2017) mencatat, ikan memasok 20% protein hewani dan menjadi kontributor utama di masa depan bagi ketahanan pangan dan gizi global. Permintaan global pangan biru terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan peningkatan preferensi relatif terhadap pangan biru. ASEAN berada di garis depan tren global permintaan ikan laut sampai dengan tahun 2050.

Tabel 2 Perkiraan Potensi Ekonomi Biru negara-negara ASEAN

Negara	Nilai Tambah Bruto pada tahun 2015 (US\$ miliar)	Porsi Ekonomi Kelautan terhadap PDB	Nilai Layanan Ekosistem (US\$ miliar)
Cambodia	2,39	16%	0,0834 – 0,4
Indonesia	182,54	28%	412,0
Malaysia	63,00	23%	17,7
Filipina	11,81	7%	17,0
Singapura	20,78	7%	n.a.

Negara	Nilai Tambah Bruto pada tahun 2015 (US\$ miliar)	Porsi Ekonomi Kelautan terhadap PDB	Nilai Layanan Ekosistem (US\$ miliar)
Thailand	118,19	30%	36.0
Vietnam	38,23	20,8%	n.a
Myanmar	n.a	n.a	n.a
Brunei	n.a	n.a	n.a
Laos	n.a	n.a	n.a

Sumber: disesuaikan oleh penulis berdasar pada tulisan
Randhawa (2024)

Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam Ekonomi Biru ASEAN. Terdapat beberapa alasan yang memandang pentingnya ketahanan pangan dalam kaitan dengan ekonomi biru. Pertama, laut adalah penyedia sumber makanan biru (*blue food*), yaitu makanan yang dihasilkan dari laut, danau, dan sungai. Ikan dan makanan laut merupakan sumber protein dan nutrisi penting lainnya bagi banyak komunitas. Lebih dari separuh populasi di beberapa negara ASEAN bergantung pada ikan sebagai bagian penting dari makanan mereka, menjadikan perikanan penting untuk ketahanan pangan. Makanan biru memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan, mengakhiri kekurangan gizi, dan membangun sistem pangan yang sehat, ramah lingkungan, dan tangguh. Sekali pun demikian makanan biru belum menjadi agenda prioritas dari sistem ketahanan pangan karena pada umumnya bahasan ketahanan pangan masih berkisar pada hasil pangan pertanian dan ternak yang tersedia di daratan (*green food*). Tidak

mengintegrasikan makanan biru dalam mata rantai pangan secara potensial menghilangkan banyak kesempatan memperoleh nutrisi berharga yang dikandungnya. Kebijakan kelautan juga sering mengabaikan kontribusi pangan biru terhadap gizi manusia dan manfaat bagi masyarakat yang memproduksinya (The United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2021; T20 Indonesia, 2022).

Selanjutnya, perikanan dan akuakultur sangat penting bagi mata pencaharian banyak masyarakat di ASEAN. Mereka tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi rumah tangga. Sektor ini menyediakan kesempatan kerja langsung bagi jutaan orang di ASEAN, khususnya di daerah pedesaan dan pesisir yang dapat berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional negara-negara ASEAN. Misalnya, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar termasuk di antara negara-negara penghasil ikan teratas secara global, yang menunjukkan pentingnya industri-industri ini. Akuakultur merupakan sumber lapangan kerja utama di kawasan ASEAN, yang menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang. Misalnya, Indonesia mempekerjakan sekitar 12 juta orang di sektor perikanan, termasuk akuakultur. Sektor ini menjadi semakin penting karena perikanan tangkap mengalami stagnasi, yang menyebabkan pergeseran ke arah akuakultur sebagai sumber utama produksi ikan (Okamoto, 2024). Ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketahanan pangan yang baik tidak hanya mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjamin ketahanan pangan yang baik. Di luar

faktor ekonomi, produk ikan merupakan bagian integral dari masakan lokal dan praktik budaya. Hidangan tradisional sering kali sangat bergantung pada ikan, menjadikannya makanan pokok yang tidak mudah digantikan (Rabanal, 1986; Nguyen & Lai, 2016; Sugiyama, Staples, & Funge-Smith, 2004).

Terakhir, ekonomi biru mampu menciptakan ketahanan masyarakat dengan cara meningkatkan ketahanan pangan. Perikanan menyediakan sumber protein dan nutrisi penting yang signifikan bagi banyak masyarakat. Dengan memastikan pasokan hasil laut yang stabil, sektor ini secara langsung berkontribusi terhadap ketahanan pangan, yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan membantu membangun ketahanan masyarakat dengan menyediakan ketahanan pangan dan peluang ekonomi. Hal ini khususnya penting di masa krisis, seperti saat terjadi bencana alam atau kemerosotan ekonomi. Perubahan iklim dapat berdampak negatif bagi ketahanan pangan dan ketahanan masyarakat. Frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang meningkat, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, karena kurangnya akses terhadap makanan bergizi dapat meningkatkan risiko malnutrisi. Jika masyarakat lokal memiliki sumber dayanya sendiri, ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Seperti diketahui, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan dampak berantainya (misalnya, rawan pangan), terdapat peningkatan minat terhadap budidaya laut sebagai pendekatan terpadu untuk pengembangan ekonomi biru di masa depan, khususnya terkait dengan mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim (Dingal, Shah, Wescombe, & Denkenberger, 2023).

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan konsumsi ikan dan makanan laut (*seafood*) dari negara-negara anggota ASEAN.

Tabel 3 Konsumsi ikan dan makanan laut negara-negara ASEAN tahun 2022

No	Negara	Total konsumsi per kiloton
1.	Indonesia	11365.19
2.	Vietnam	4019.77
3.	Filipina	3026.58
4.	Myanmar	2184.1
5.	Thailand	2052.14
6.	Malaysia	1770.57
7.	Cambodia	686.77
8.	Laos	189.81
9.	Brunei	n.a
10.	Singapura	n.a

Sumber: disesuaikan oleh penulis berdasar pada World Population Review (2024).

Keamanan Pangan Biru di Indonesia dan Tantangannya

Sektor perikanan yang merupakan penghasil pangan biru mendukung mata pencaharian jutaan orang di Indonesia. Diperkirakan sekitar 38 juta orang di seluruh dunia bekerja di bidang penangkapan ikan liar, dengan akuakultur juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja (regalsprings.co.id, 2024). Di Indonesia, baik perikanan skala

kecil maupun operasi akuakultur yang lebih besar berkontribusi terhadap ekonomi lokal yang menyediakan pendapatan dan ketahanan pangan bagi banyak keluarga (Kusdiantoro, Fahrudin, Wisudo, & Juanda, 2019).

Pangan biru merujuk pada berbagai produk makanan yang bersumber dari lingkungan perairan, termasuk ikan, makanan laut, dan rumput laut. Makanan ini dikenal karena nilai gizi dan keberlanjutannya, menyediakan protein, vitamin, dan mineral penting yang diperlukan untuk pola makan yang sehat. Di Indonesia, pangan biru sangat penting untuk ketahanan pangan karena berkontribusi secara signifikan terhadap kebutuhan gizi penduduk. Ikan dan makanan laut merupakan sumber utama protein hewani bagi banyak orang Indonesia, terutama di masyarakat pesisir yang aksesnya terhadap berbagai sumber makanan mungkin terbatas. Pangan biru membantu mengatasi kekurangan gizi dengan menawarkan nutrisi penting seperti asam lemak omega-3, yang sangat penting untuk kesehatan (regalsprings.co.id, 2024). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya konsumsi ikan laut bagi penduduk pesisir mengakibatkan tingginya angka stunting. Angka produksi ikan di Indonesia mencapai 6,5 juta ton/tahun ternyata konsumsi hanya 33,86 kg/kapita/tahun (Mahulette, Zulham, & Sabaryono, 2017)

Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km² (3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif) dan garis pantai sepanjang 108.000 km, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi dan merupakan penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, hasil produksi perikanan dari perikanan tangkap dan budidaya

menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, bahkan hampir dua kali lipat, yaitu dari 11,7 juta ton pada tahun 2010, menjadi 22,18 juta ton pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023, p. 15). Program Ekonomi Biru yang menghasilkan pangan biru di Indonesia berpotensi besar dalam mencapai ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pasokan makanan yang stabil dan berkualitas dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi laut Indonesia (monitor.co.id, 2024) dengan cara melakukan transisi ke pangan biru. Tahun 2035, populasi Indonesia diperkirakan meningkat 14%, dan kebutuhan protein naik menjadi 56%. Sekali pun demikian, Indonesia masih mengimpor 70% protein, sementara Indonesia memiliki sumber protein yang tidak tergantung impor, yaitu ikan (Darwin, 2025).

Tantangan Indonesia dalam mengembangkan pangan biru cukup besar. Proyeksi populasi dunia mencapai 10 miliar pada tahun 2050 sehingga kebutuhan akan pangan diperkirakan meningkat lebih dari 56%. Mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ini, pangan biru menawarkan solusi untuk tantangan ini (Grahadyarini, 2023). Hal ini disebabkan karena lahan pertanian semakin terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber pangan. Terlebih lagi rawan pangan akan menjadi ancaman global dalam beberapa tahun mendatang akibat perubahan iklim dan konflik bersenjata yang masih akan berlangsung di beberapa tempat, menjadikan lahan darat dan pertanian semakin terbatas jumlah maupun kualitasnya. Kondisi ini menjadi pendorong pentingnya melakukan transisi dari pangan tradisional ke pangan biru. Bagi Indonesia, transisi ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan.

Sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi rawan pangan, konsep pangan biru memiliki beberapa aspek positif. Selain berprotein tinggi dan Indonesia mampu menyediakannya, makanan biru umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan peternakan hewan berbasis lahan. Praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem perairan, yang sangat penting untuk produksi pangan biru yang berkelanjutan (Nguyen, Shen, Lu, & Woo, 2024). Transisi ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan. Dengan meningkatkan produktivitas dan akses pasar, nelayan kecil dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Demi mendukung transisi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan berbagai program, termasuk kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan sambil meningkatkan produktivitas (Ambari, 2024).

Indonesia tengah mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Salah satu hal penting yang digarisbawahi, dan berkaitan dengan pangan biru adalah komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia dalam pembangunan menuju visi tersebut (bpk.go.id, 2024). Komitmen Indonesia terhadap tujuan mitigasi iklim internasional dan nasional melalui pelestarian Ekosistem

Karbon Biru² (Blue Carbon Ecosystems/BCE) sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir dalam produksi pangan biru yang berkelanjutan. Disamping merupakan peluang, komitmen ini merupakan tantangan dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembangunan Indonesia. Pengembangan pangan biru di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Beberapa faktor yang menjadi tantangan, di antaranya, masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, belum menunjukkan minat terhadap pangan biru. Hal ini dibuktikan dengan angka konsumsi ikan (AKI). Pulau Jawa, memiliki AKI yang lebih rendah dibandingkan AKI nasional, berbeda dengan Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia bagian timur, yang AKI-nya mencapai lebih dari 60 kg/kapita/tahun pada tahun 2023 (kedaulatanpangan.org, 2019). Tantangan lain adalah masih adanya praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Hal ini mengancam kelestarian sumber daya laut dan dapat mengurangi potensi pangan biru yang dapat diperoleh dari laut. Metode penangkapan yang merusak, seperti penggunaan dinamit atau pukat harimau dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi ketersediaan ikan sebagai

² Ekosistem karbon biru merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah pesisir dan laut yang di sekitarnya terdapat hutan mangrove, padang lamun, estuaria/rawa air payau/rawa air asin, dan terumbu karang. Ekosistem ini dapat menyerap karbon dalam jumlah besar dengan kapasitas menyimpan karbon hingga empat kali lebih banyak per hektare dan 30-50 kali lebih cepat dibandingkan hutan terrestrial (lindungihutan.com, 2022).

sumber makanan (Reef Resilience Network, n.d). Meskipun potensi ekonomi biru sangat besar, investasi dalam sektor ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Faktor ini merupakan tantangan lain.

Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi ekonomi biru secara efektif. Banyak daerah, terutama yang terpencil, tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini mencakup kurangnya sekolah, program pelatihan vokasional, dan akses ke pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, termasuk kurangnya pengetahuan dan kapasitas dan keahlian di kalangan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil. Tanpa infrastruktur pendidikan yang memadai, masyarakat lokal tidak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi biru. Hal ini mengakibatkan rendahnya kapasitas untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, yang sangat penting untuk keberhasilan ekonomi biru. Tidak memadainya pendidikan dan pelatihan dapat menghambat upaya untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan. Ini berarti bahwa potensi ekonomi dari sektor kelautan tidak dapat dimaksimalkan, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024; (Jatmiko, 2024). Selain itu kurangnya peraturan dan kebijakan yang mendukung juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi biru. Tanpa kerangka regulasi yang jelas dan kondusif, pelaku industri akan kesulitan untuk mengambil langkah-

langkah inovatif dan berkelanjutan. Kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan atau tidak mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut dapat menghambat investasi dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi biru.

Untuk meningkatkan konsumsi dan keamanan pangan biru, dapat diambil beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan biru yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye kesadaran dan pendidikan yang lebih efektif, yang bertujuan untuk mengarusutamakan pangan biru secara nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan kerja sama antarberbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas, dan dilakukan melalui beberapa metoda, seperti penggunaan media cetak maupun elektronik, seperti media sosial yang populer. Bagi generasi muda, cara ini dapat menarik perhatian mereka sehingga mengonsumsi makanan biru dapat menjadi sebuah pembiasaan. Kedua, langkah pertama dapat dilanjutkan dengan pengembangan teknologi pangan biru yang bergizi tinggi melalui investasi dan penelitian yang melibatkan sektor swasta dan dunia akademik. Cara ini dapat membantu diversifikasi jenis pangan biru yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga konsumsi jenis makanan ini meningkat secara kuantitatif. Ketiga, melalui jalur kultural dapat dilakukan perubahan cara berpikir masyarakat, misalnya melalui kuliner lokal yang mengedepankan pangan biru sebagai sumber protein primer dalam masakan tradisional dengan mengembangkan resep yang menarik dan mudah diakses. Di Jawa khususnya yang memiliki AKI rendah, pendekatan kultural penting untuk mengubah konsep “ikan” (*iwak*) yang selama ini digunakan

untuk menyebut “lauk,” menjadi ikan dalam makna yang sebenarnya.

Simpulan

Sebagai pendekatan baru yang transformatif, ekonomi biru menawarkan solusi bagi perkembangan ekonomi di ASEAN yang dapat bersinergi dengan pelestarian alam, khususnya alam bawah laut. Bagi beberapa negara ASEAN yang berbentuk kepulauan, seperti Indonesia dan Filipina, laut bukan menjadi pemisah antarpulau, melainkan menjadi penghubung dan pemersatu bagi penduduknya. Selain itu laut telah lama menjadi bagian dari identitas mereka karena laut membentuk budaya, menyediakan sarana ketahanan ekonomi, dan penyedia sumber pangan yang penting. Bahkan sebelum istilah ‘ekonomi biru’ dikonstruksi, kehidupan laut pada dasarnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian banyak orang di Asia Tenggara. Tidak hanya di tingkat regional, ekonomi biru telah menjadi andalan bagi masyarakat global untuk *survive* di tengah kecenderungan meningkatnya berbagai kesulitan ekonomi dan krisis lingkungan. Sekali pun demikian, antusiasme pengembangan ekonomi biru di peringkat dunia belum sepenuhnya beresonansi dengan kondisi lokal setiap negara anggotanya. Benar bahwa pemerintah negara-negara ASEAN telah menghasilkan banyak kesepakatan politik yang mendukung penerapan ekonomi biru secara lebih luas, namun seringkali kondisi lokal di setiap negara belum gayut dengan ekonomi biru sebagai *platform* global. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi biru di ASEAN.

Sejumlah persoalan yang dihadapi ASEAN dalam pengembangan ekonomi biru tidak menjadi halangan bagi upaya mewujudkannya. Dalam konteks Indonesia, mempromosikan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan mendorong peluang ekonomi di wilayah pesisir, Indonesia dapat memajukan ketahanan pangan sekaligus mendukung mata pencaharian jutaan orang yang bergantung pada sumber daya laut. Karena negara-negara ASEAN berupaya mencapai pembangunan berkelanjutan, perikanan dan akuakultur dipandang sebagai sektor yang dapat dikelola secara bertanggung jawab untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pemanfaatan ekonomi biru, Indonesia perlu mengarusutamakan konsumsi pangan biru sebagai menu utama keluarga. Sekali pun terdapat kecenderungan yang meningkat pada permintaan pangan biru, jenis pangan ini dikonsumsi tidak merata di Indonesia. Meningkatkan konsumsi pangan biru menjadi bagian dari survival strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan di masa depan, khususnya di negara berkembang di Indo-Pasifik.

Daftar Pustaka

- Ambari, M. (2024, September 06). Strategi Ekonomi Biru Indonesia di Tengah Dampak Perubahan Iklim. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://www.mongabay.co.id/2024/09/06/strategi-ekonomi-biru-indonesia-ditengah-dampak-perubahan-iklim/>
- Ariseplus Indonesia. (2023, Juli 03). Roadmap Ekonomi Biru Indonesia Diluncurkan di Forum Ekonomi Biru ASEAN dengan Dukungan ARISE+ Indonesia. Retrieved Januari

- 17, 2025, from <https://ariseplus-indonesia.org/id/kegiatan/roadmap-ekonomi-biru-indonesia-diluncurkan-di-forum-ekonomi-biru-asean-dengan-dukungan-arise-plus-indonesia.html>
- ASEAN.org. (2023, September). ASEAN Blue Economy Framework. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir* (Vol. 20). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://web-api.bps.go.id/download.php>
- bpk.go.id. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- Chan, C., Tran, N., Dao, D., Sulser, T., Phillips, M., Batka, M., . . . Preston, N. (2017). Fish to 2050 in the ASEAN Region. World Fish Centre. Retrieved from <https://digitalarchive.worldfishcenter.org/server/api/core/bitstreams/dd94e6b1-49e3-4c10-b147-16e664381520/content>
- Darwin, D. (2025, Januari 07). Menyiapkan Pangan Biru untuk Ketahanan Pangan. detik.com. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://news.detik.com/kolom/d-7721200/menyiapkan-pangan-biru-untuk-ketahanan-pangan>
- Dingal, F., Shah, S., Wescombe, N., & Denkenberger, D. (2023). Blue Economy Futures: Mariculture Development in the ASEAN Region. The Alliance to

- Feed the Earth in Disasters (ALLFED). Retrieved from <https://allfed.info/images/pdfs/bluefutures2023.pdf>
- Gamage, R. (2016). Blue economy in Southeast Asia: Oceans as the new frontier of economic development. . *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, , 2, 1-15. doi: <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1244361>
- Grahadyarini, B. (2023, November 16). Pangan Biru Jadi Solusi. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/16/target-ambisius-untuk-pangan-biru>
- Jatmiko, A. (2024, Februari 16). Potensi Ekonomi Biru dan Cara Mengatasi Hambatan Pengembangannya. Retrieved Februari 04, 2024, from <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/65ce8a9427b63/potensi-ekonomi-biru-dan-cara-mengatasi-hambatan-pengembangannya>
- kedaulatanpangan.org. (2019, Oktober 24). Blue Food, Bagian dari Transformasi Sistem Pangan di Negeri Bahari. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://kedaulatanpangan.org/blue-food-bagian-dari-transformasi-sistem-pangan-di-negeri-bahari/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). SDM Unggul untuk Ekonomi Biru Untuk Indonesia Sejahtera. Retrieved from https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/SDM_Unggul_untuk_Indonesia_Sejahtera___compressed.pdf
- Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan

- Keberlanjutannya. *J. Sosek KP*, 14(2), 145-162.
doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>
- lindungihutan.com*. (2022, Maret 18). Pengertian Blue Carbon, Manfaat, dan Elemen Ekosistem Karbon Biru. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-blue-carbon/>
- Mahulette, R., Zulham, A., & Sabaryono. (2017). *Pengembangan Perikanan Tangkap Laut Kota Kendari*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- monitor.co.id*. (2024, Desember 06). Pakar ungkap Pentingnya Ekonomi Biru dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://monitor.co.id/2024/12/06/pakar-ungkap-pentingnya-ekonomi-biru-dalam-mewujudkan-ketahanan-pangan-nasional/>
- Nguyen, C., & Lai, L. (2016, Oktober). Sustainable fisheries in the ASEAN region – Lessons from the EU’s Common Fisheries Policy? Retrieved Januari 18, 2025, from https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/4358753/NGUYEN-Cuc-Thi-Kim-and-LAI-Long-Thanh.pdf
- Nguyen, D., Shen, K., Lu, J., & Woo, M. (2024, Agustus). Blue Carbon Ecosystems – Blue Foods Nexus: Lessons Learned from Global Examples of Blue Carbon Ecosystems. Stanford Centre for Ocean Solution. Retrieved Januari 19, 2025, from https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/08/StanfordBlueFoodActionLab_StudentReport_BlueFoodBlueCarbonNexus_2024JUL.pdf

- Okamoto, S. (2024, November 21). Celebrating the World Fisheries Day - Driving Innovation in Sustainable Fisheries in Southeast Asia. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://www.undp.org/indonesia/blog/celebrating-world-fisheries-day-driving-innovation-sustainable-fisheries-southeast-asia>
- Rabanal, H. (1986, November). Seafarming as Alternative to Small-Scale Fishing in ASEAN Region. Manila. Retrieved from <https://www.fao.org/4/ag160e/AG160E00.htm>
- Randhawa, D. (2024, Januari 2024). The Potential and Frailties of the Blue Economy in ASEAN. Singapore. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/the-potential-and-frailties-of-the-blue-economy-in-asean/>
- Reef Resilience Network. (n.d). Status Perikanan Karang. Retrieved from <https://reefresilience.org/id/management-strategies/coral-reef-fisheries-module/coral-reef-fisheries/overfishing/>
- regalsprings.co.id. (2024, Juni 20). Understanding Blue Food and Its Critical Role in Food Security. regalsprings.co.id. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://regalsprings.co.id/en/articles/understanding-blue-food-and-its-critical-role-in-food-security/>
- Sardan, M., Ali, N., Ali, A., Samsudin, A., Harun, N., Tan, Y., & Kadir, J. (2023). Blue economy and food security the way forward: A systematic literature review analysis. *International Journal of Asian Social Science*, 13(9), 271-281.

- Singh, S. (2022). *The Blue Economy in the Indo-Pacific: Prospect and Challenges in the Indian Ocean*. Bangkok: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . Retrieved January 17, 2025, from <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/asia/19232.pdf>
- Sugiyama, S., Staples, D., & Funge-Smith, S. (2004). Status and potential of fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific. Bangkok. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://www.fao.org/4/ad514e/ad514e00.htm#Contents>
- T20 Indonesia. (2022, Agustus). Integrating Blue Foods into Food System Policy and Practice . Retrieved Januari 18, 2025, from https://www.t20indonesia.org/wp-content/uploads/2022/08/Integrating-Blue-Foods-into-Food-System-Policy-and-Practice_Tf4.pdf
- The United Nations: Department of Economic and Social Affairs . (2021, Mei 05). Sustainable Blue Foods are Vital to Global Food Security. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://sdgs.un.org/news/sustainable-blue-foods-are-vital-global-food-security-33148>
- World Population Review. (2024). Fish Consumption by Country 2024. Retrieved from <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/fish-consumption-by-country>

Keamanan Siber-Maritim Indo-Pasifik: Respon Kebijakan Indonesia

Fadhila Inas Pratiwi
Massari Inong Tanaurant

Pendahuluan

Pentingnya Keamanan Siber-Maritim di Indo-Pasifik

Free-Open Indo-Pacific (FOIP) dari the Quad (Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia) salah satu strategi geopolitik keempat negara tersebut untuk menggunakan pengaruhnya di luar wilayah region mereka. Salah satu regional yang terdampak dari strategi geopolitik ini adalah Asia Tenggara yang secara strategis terletak di rantai produksi global termasuk di dalamnya adalah Indonesia (Pratiwi *et al.*, 2021). Indo-Pasifik menjadi wilayah yang vital bagi keamanan dan stabilitas global terutama dalam aspek keamanan maritim mengingat wilayah ini merupakan rute perdagangan internasional yang terbentang dari bagian timur samudera Hindia hingga bagian barat samudera Pasifik dan terkoneksi melalui selat Malaka. Medcalf (2019) menjelaskan bahwa popularitas istilah "Indo-Pasifik" merefleksikan dan memengaruhi kekhususan pendekatan diplomasi, ekonomi, dan keamanan negara-negara sekitar. Medcalf (2019) menambahkan bahwa Indo-Pasifik mencerminkan perspektif terhadap China yang inklusif – mengategorikan kepentingan China sebagai isu regional – sekaligus eksklusif atau proses *balancing* (menyeimbangkan) negara-negara atas peningkatan kekuatan China. Isu-isu keamanan maritim di regional Indo-Pasifik antara dua negara besar Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan salah satu yang

cukup sering dibahas (Dachi et al., 2023; Gopal, 2017; Tertia & Perwita, 2018). Hal ini karena keamanan maritim memiliki peran yang krusial dalam memastikan berjalannya perdagangan global dan regional dengan baik, mengingat wilayah Indo-Pasifik merupakan jalur perdagangan dunia.

Konstruksi strategi Indo-Pasifik yang memang mengutamakan keamanan maritim nampaknya juga harus diperluas dari yang semula merupakan keamanan tradisional, dan sudah seharusnya memasukkan elemen keamanan siber dan informasi. Kesadaran bahwa tatanan keamanan global dan regional sangat dipengaruhi oleh duopoli teknologi informasi dan *Artificial Intelligence* (AI). Sehingga sudah seharusnya untuk memperluas konsep tatanan keamanan Indo-Pasifik menjadi tatanan keamanan siber Indo-Pasifik. Dengan memperluas konsep tradisional Indo-Pasifik diharapkan semakin mampu untuk memperkuat tatanan liberal melalui kerjasama, investasi gabungan, pertukaran teknologi dan pembangunan kapasitas. Uni Eropa dan Jepang memiliki fokus untuk melindungi keamanan siber serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan TIK bisa digunakan untuk melemahkan prinsip demokrasi dan mengancam kebebasan berinternet. Transformasi digital dan semakin pentingnya konektivitas digital, serta pengaruh dan ketergantungan terhadap perusahaan teknologi besar di Tiongkok dan AS, membuat kedua negara besar ini sadar bahwa pengaruh bisa dilakukan agar sejalan dengan visi kedua negara tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan kedua negara dalam mengembangkan tatanan keamanan siber di Indo-Pasifik (Vosse, 2022).

Ancaman Keamanan Siber di Indo-Pasifik

Definisi, Jangkauan, dan Situasi Keamanan Siber Maritim

Berbicara mengenai industri maritim, Maritime Institute of Technology and Graduate Students (2024) merujuknya sebagai salah satu industri terbesar di dunia. Pernyataan ini didukung oleh Sharma (2024) bahwa berdasarkan data pada tahun 2018 dari United Nations Conference on Trade and Development, industri maritim menyumbang 80% volume perdagangan global. Sebanyak 60% aliran perdagangan tersebut melewati pusaran pertumbuhan perekonomian terbesar dan tercepat dunia, yakni Kawasan Indo-Pasifik (Sharma, 2024). Dewasa ini, digitalisasi operasi perkapalan lintas membawa industri maritim menuju efisiensi dan ekspansi kontribusi. Di sisi lain, terdapat ancaman baru terhadap keamanan maritim, yakni ancaman siber (Sharma, 2024). Maritime Institute of Technology and Graduate Students (2024) mendefinisikan keamanan maritim sebagai istilah umum untuk upaya perlindungan internal dan eksternal kapal dari sejumlah ancaman, seperti terorisme, pembajakan, perampokan, polusi, perdagangan barang dan orang secara ilegal, serta pencurian sumber daya laut, seperti ikan. Adapun "risiko siber maritim" menurut Organisasi Maritim Internasional (IMO) adalah tolok ukur ancaman terhadap aset teknologi industri maritim oleh keadaan atau peristiwa potensial yang berakibat pada kegagalan operasional, keselamatan, atau keamanan perihal pengiriman (perdagangan) sebagai imbas dari kerusakan, kehilangan, atau gangguan sistem informasi (IMO, no date). Dengan demikian, "keamanan siber maritim" merupakan penggunaan seperangkat alat, kebijakan, konsep, pedoman, perlindungan, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, jaminan, dan teknologi

untuk organisasi maritim beserta kapal dan lingkungan sibernya (Mission Secure, no date).

Dengan adanya internet yang terhubung dengan sistem kontrol dan teknis, terdapat konektivitas kapal maritim modern yang semakin meluas. Namun, cukup banyak jaringan – terdapat dua jenis, yakni sistem teknologi informasi (IT) dan teknologi operasional (OT) – serta infrastruktur kapal yang masih memanfaatkan teknologi lama dan sederhana, seperti *flash drive USB* atau koneksi Wi-Fi yang tidak aman; menyebabkan potensi peretasan atau ancaman internal dapat terjadi (Mission Secure, no date). Dari pendekatan keamanan siber, terdapat perbedaan antara IT dan OT. Spesialisasi IT merupakan para profesional yang ahli di bidang keamanan aplikasi, jaringan, atau disiplin lainnya (koneksi internet, pemahaman integrasi jaringan kapal IT-OT, dst.); sementara OT merupakan orang-orang yang menangani teknologi operasional kapal (sistem navigasi, kontrol propulsi, kemudi, pemberat, dsb.). Pencurian data merupakan salah satu jenis serangan IT, namun serangan terhadap OT berimbas pada cedera atau kehilangan nyawa, kerusakan aset, atau dampak lingkungan (Mission Secure, no date). Konvergensi IT dan OT perlu diseimbangkan dengan menggunakan alat keamanan IT yang juga memenuhi persyaratan OT.

Saat ini militer semakin bergantung pada Internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memproyeksikan kekuatan. Negara-negara juga menggunakan internet untuk menargetkan sistem persenjataan musuh. Tn. Frank Kendall, mantan Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Akuisisi, Teknologi, dan Logistik, menyampaikan kepada Kongres AS pada tahun 2015 bahwa hampir semua program senjata AS memiliki kesalahan

konfigurasi dan rentan terhadap serangan siber. Hal ini menunjukkan bahwa AS salah satu negara canggih juga memiliki tantangan keamanan siber. Sektor maritim juga memiliki kerentanan tersendiri sebagai contoh pada tahun 2017, kapal pengiriman Belanda Maersk diserang oleh malware Petya, *ransomware* yang memengaruhi sebagian besar operasi Maersk, termasuk pengiriman peti kemas, operasi pelabuhan dan kapal, produksi minyak dan gas, layanan pengeboran, dan kapal tanker minyak di seluruh dunia. Maersk menangani 25 persen dari semua pengiriman pada rute pengiriman penting Asia-Eropa dan dampak dari serangan ini terhambatnya operasi pengiriman dari Tacoma, Washington ke pelabuhan Jawaharlal Nehru, Mumbai (Reiber, 2018).

Data dan Ancaman Keamanan Siber di Indo-Pasifik

Sharma (2024) menyoroti kompleksitas dan ketegangan isu yang ada di Indo-Pasifik. Hal ini dapat memperparah dilema atas risiko keamanan siber. Kawasan ini memiliki lanskap maritim dengan garis pantai yang panjang dan masif serta kanal-kanal strategis (Selat Malaka dan Lombok), namun diperebutkan oleh negara-negara: (1) dengan kekuatan besar (*great powers*), seperti India, China, Amerika Serikat; (2) dengan stabilitas rendah (Irak, Iran, Pakistan, Korea Utara); dan (3) yang memiliki masalah perbatasan serta kepulauan di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Komposisi dan karakteristik rumit ini lantas membuat keamanan siber maritim sulit diprediksi. Sharma (2024) menyatakan bahwa terdapat lima tantangan universal risiko siber maritim yang dapat terjadi di Kawasan Indo-Pasifik. Masalah pertama bersinggungan dengan hakikat industri maritim yang kompleks. Sebuah kapal

dibangun, didistribusikan, dan digunakan oleh beragam perusahaan dan negara. Insiden siber yang muncul selanjutnya melibatkan banyak yurisdiksi. Kedua, ragam teknologi yang digunakan oleh industri perkapalan pun dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi ancaman siber. Adalah hal yang sulit untuk dapat mengintegrasikan atau memperbarui teknologi kapal – bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun – lantaran biaya yang tidak sedikit.

Ketiga, tantangan yang muncul lantas datang dari pencegahan dan penanggulangan ancaman siber. Seluruh entitas (negara, aktor non-negara, perusahaan, hingga individu) dapat menyerang sistem jaringan maritim; mengakibatkan munculnya pertanyaan terkait siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan determinasi peradilannya. Apakah perusahaan yang membuat kapal? Ataukah negara tempat kapal tersebut didaftarkan? Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi pelaku ancaman siber. Di sisi lain, pelaporan kasus ancaman siber masih sangat kurang sebab ketakutan akan kehilangan kepercayaan konsumen. Tercatat bahwa pada tahun 2024, terdapat: (1) 23.400 deteksi *malware* – perangkat lunak berbahaya untuk pencurian data; (2) 178 serangan *ransomware* – perangkat penyandera data; (3) 50 miliar lebih serangan *firewall* – perangkat pelindung; hingga (4) 14,8 miliar peringatan keamanan di sektor siber maritim (Marpoint, 2024). Hal ini lantas menjadi masalah keempat. Selanjutnya, ekosistem regulasi IMO yang tidak memadai justru menimbulkan ambiguitas dalam penanganan situasi siber maritim. Kurangnya kode atau konvensi khusus IMO yang menanggulangi ancaman keamanan siber secara eksplisit perlu diperhatikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, skenario terburuk dari ancaman

keamanan siber dapat berujung pada kerugian sebesar U\$110 miliar bagi 15 pelabuhan di Asia (Karim, 2022).

Respons Indonesia: Diplomasi Maritim dan Keamanan Siber

Pentingnya Regulasi, Pelatihan, dan Kelembagaan yang Kuat atas Risiko Siber Maritim Indonesia

Menanggapi sejumlah tantangan tersebut, perusahaan maritim perlu menerapkan manajemen risiko siber maritim dengan praktik-praktik terbaik untuk mendukung pengiriman dan perdagangan yang aman dan terlindungi sekaligus tangguh secara operasional (Yildirim, no date). Dilansir dari *Guidelines on Cybersecurity Onboard Ships* oleh The Baltic and International Maritime Council (BIMCO), perusahaan maritim perlu: (1) menaksir paparan risiko dengan memperkirakan potensi atau dampak eksploitasi kerentanan oleh aktor eksternal maupun internal; (2) mengidentifikasi cakupan ancaman terhadap kapal; (3) mengembangkan inventaris lengkap sistem *onboard* dan memahami konsekuensi ancaman siber atas sistem ini; (4) menyusun rencana kontingensi untuk dapat mempersiapkan kemungkinan buruk; (5) mengoptimalkan langkah-langkah perlindungan dan deteksi; serta (6) menanggapi dan memulihkan kasus siber (Yildirim, no date). Lembaga-lembaga penting seperti Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BUMN, otoritas pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko siber maritim melalui regulasi, pelatihan, dan kelembagaan yang kuat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khususnya bergerak di bidang klasifikasi kapal, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), sempat menyelenggarakan pameran virtual terkait keamanan siber maritim bertajuk "Virtual Expo Maritime Indonesia" atau VEMI pada tahun 2021 dengan berkolaborasi bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai (IPERINDO). Acara yang mengusung tema "Digitalisasi, Teknologi, dan Inovasi di Sektor Maritim" ini diselenggarakan dalam rangka menguatkan gambaran pemerintah dan seluruh *stakeholder* perihal kebijakan dan upaya guna menumbuhkan peran digitalisasi dalam sektor ekonomi maritim dan industri maritim di masa depan (Logistik News, 2021). Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Rudiyanto, mengatakan bahwa keamanan siber maritim Indonesia dapat diraih dengan menerapkan prosedur deteksi dan penanggulangan terhadap risiko pada sistem siber, seperti: (1) identifikasi tugas dan tanggung jawab personel terhadap penanganan siber; (2) pengendalian risiko; (3) deteksi aktivitas siber; (4) langkah-langkah terhadap ancaman maya; serta (5) memulihkan ancaman kepada keadaan semula (Logistik News, 2021).

Sebagai satu-satunya BUMN yang bertanggung jawab di bidang klasifikasi kapal dengan memainkan peran vital atas keselamatan angkutan moda laut berbendera Indonesia. Melalui pernyataan dari Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto, terdapat banyak kerentanan yang bisa terjadi di atas kapal, seperti *Bridge systems, Cargo handling and management systems, Propulsion and machinery management and power control systems, Access control systems, Passenger*

servicing and management systems, Administrative and crew welfare systems, dan Communication systems. Dari banyaknya celah yang bisa diretas, serangan-serangan juga datang dalam bentuk pembajakan. Maka dari itu, melindungi kapal, pelabuhan, serta seluruh infrastruktur maritim dari ancaman siber memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup solusi teknologi, kerangka regulasi, dan tenaga kerja maritim yang berwawasan (Putri & Burhanuddin, 2024).

Selain itu, peningkatan kapabilitas dan kesiapsiagaan terhadap tantangan kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code) telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia melalui acara "Maritime Security Exercise and Workshop" pada Juni 2024 (Kemenhub RI, 2024). Sejak menerapkan ISPS Code pada tahun 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku *Design Authority* berupaya memastikan kepatuhan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap aturan keamanan internasional. ISPS Code diharapkan juga dapat melindungi keamanan siber maritim untuk fasilitas pelabuhan. Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 16 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengembangan Penilaian dan Prosedur Keamanan Siber (Cyber Security) Pada Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan Untuk Penanganan Resiko Pada Sistem Jaringan Maya (Cyber Risk Management) (Kemenhub RI, 2024).

Kerja sama Bilateral dan Multilateral (Diplomasi Maritim secara Regional hingga Internasional)

Indonesia berpotensi meningkatkan kontribusinya di keamanan siber maritim, khususnya dengan memanfaatkan kemitraan internasional, negosiasi dan diplomasi, hingga organisasi internasional. Budaya, sumber daya, infrastruktur dan konektivitas, diplomasi, dan pertahanan maritim merupakan lima pilar yang perlu diwujudkan (UI, no date). Haramain (2024) berpendapat bahwa Indonesia perlu menyelaraskan diplomasi dengan penguatan pertahanan militer maritimnya. Selain mengalokasikan anggaran program untuk alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan sebesar 43 triliun Rupiah pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan diplomasi maritim di ranah regional (ASEAN) hingga internasional (baik bilateral maupun multilateral, seperti G20, PBB, dst.). Diplomasi maritim berupa pelatihan gabungan hingga pertukaran informasi, teknologi, riset, dan pengembangan, sangat diperlukan demi masa depan keamanan siber maritim Indonesia (Haramain, 2024). Hal ini lantaran posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan global utama yang turut diiringi oleh sengketa wilayah, terorisme, dan penangkapan ikan secara ilegal (Azahra, 2025). Diplomasi maritim dan siber Indonesia dapat diperkuat pula melalui dialog dan diskusi bersama ASEAN.

Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 tahun 2019 di Bangkok; diharapkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran regional, khususnya di bidang maritim, dapat direalisasikan (Azahra, 2025). AOIP merupakan inisiatif Indonesia, dan penerapan dokumen tersebut dianggap sebagai pencapaian besar dalam

kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Upaya aktif Indonesia bermula dari kekhawatiran bahwa persaingan negara-negara besar berdampak besar pada Asia Tenggara, dan narasi yang saling bersaing tentang Indo-Pasifik dapat meningkatkan ketegangan di wilayah regional Asia Tenggara. Indonesia merasa tidak nyaman dengan pendekatan Amerika Serikat, strategi FOIP sebagai upaya untuk mengisolasi Tiongkok. Adanya the Quad juga dianggap melemahkan Sentralitas ASEAN. Meskipun para pemimpin Quad kemudian menekankan sentralitas ASEAN dalam visi mereka untuk Indo-Pasifik, namun hal ini masih harus dilihat apakah keberadaan the Quad akan melemahkan peran utama ASEAN dalam menetapkan arah di kawasan tersebut. Oleh karena itu, AOIP dirancang sebagai upaya ASEAN untuk memegang kendali kawasan dari narasi persaingan strategis yang berkembang. Dengan AOIP, ASEAN berupaya untuk menyelaraskan dan mensinergikan proyek-proyek infrastruktur besar untuk benar-benar menekankan kepentingan dan kebaikan bersama (Muhibat & Waffa, 2020)

Di sisi lain, Indonesia juga perlu meningkatkan posisi dan kontribusinya secara internasional. Kunjungan kehormatan sekaligus persahabatan dari Komandan Armada 2 Angkatan Laut Jerman, Laksamana Muda Axel Schulz, merupakan salah satu contoh diplomasi maritim di tingkat bilateral-global dengan adanya pertukaran informasi (Indonesia Defense, 2024). Indonesia pun mampu membuktikan kapabilitasnya sebagai mediator global dengan menyatukan kekuatan besar, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan 35 negara lainnya dalam latihan multilateral dan diplomasi maritim "5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025" (Aulia, 2025). Dalam

dinamikanya negara the Quad juga ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia. Sebagai contoh pada tanggal 10-13 Juni 2024, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) bermitra dengan Pemerintah Indonesia di bawah program Departemen Luar Negeri AS untuk Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum serta Badan Pengurangan Ancaman Departemen Pertahanan AS guna meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem transportasi laut internasional. Hal ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat kolaborasi keamanan siber dan melindungi infrastruktur penting maritim dari intrusi dan serangan siber berbahaya di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif kami yang telah ditingkatkan. Bekerja sama dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Pemerintah Indonesia, dan berbagai otoritas pelabuhan maritim Indonesia, DHS menyelenggarakan latihan dan lokakarya yang sukses yang berfokus pada peningkatan keamanan siber maritim dan kemampuan respons insiden di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik (Department of Homeland Security, 2024).

Rekomendasi Keamanan Maritim-Siber Indonesia

Negara-negara di wilayah Indo-Pasifik mengalami signifikansi resiko gangguan keamanan siber dan manipulasi di berbagai sektor dan infrastruktur. Organisasi keamanan beroperasi dalam keterbatasan sumber daya dan tidak mampu mengamankan seluruh infrastruktur sebuah negara. Apabila negara tidak siap mengatasi ancaman siber, maka negara tersebut akan tetap rentan terkena serangan siber. Investasi pertahanan dan resiliensi keamanan siber dalam aspek maritim akan berdampak pada kuatnya stabilitas ekonomi dan politik (Reiber, 2018). Ketiadaan koherensi legislasi, regulatori, dan

kerangka kebijakan tetap menjadi kelemahan tata kelola keamanan siber di Indonesia. Meskipun Indonesia banyak mendirikan badan yang menangani keamanan siber termasuk BSSN, Pusdatin, Satsiber Tugas TNI, dan Pusansiad. Lembaga-lembaga tersebut didirikan tanpa memiliki kebijakan strategis di tingkat nasional atau strategi keamanan siber yang komprehensif. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber dan Ketahanan yang di dalamnya terdapat pembahasan diplomasi siber, infrastruktur informasi kritis nasional, kodifikasi kekuatan BSSN, tata kelola siber dan siber intelijen masih belum disahkan (Nabbs-Keller et al., 2021).

Terdapat setidaknya lima langkah konkret bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan siber Pertama yaitu memperkuat pembangunan kapasitas, menambah SDM keamanan siber, melakukan sosialisasi keamanan siber kepada publik. Kedua dalam aspek legal, agar dapat segera mengesahkan UU Keamanan Siber. Ketiga, struktur organisasi aktor keamanan siber lebih diperjelas, siapa menjadi pusat koordinator agar segala aktifitas keamanan siber bisa dilakukan pengawasan dan evaluasi dan tidak menjadi tumpang tindih. Keempat memperkuat kerjasama baik antara aktor domestik dengan aktor internasional, baik melalui platform resmi dan tidak resmi seperti sosial media. Kelima, pembaharuan penguasaan teknologi keamanan siber yang paling mutakhir serta dalam aspek maritim pembaharuan sistem kapal yang lebih modern dan canggih diperlukan agar dapat resilien dalam menghadapi ancaman siber. Keamanan siber di Indo-Pasifik dan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan terus berkembang. Kerjasama internasional dan inisiatif pemerintah sangat penting untuk mengatasi ancaman ini. Dengan

meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan hukum, dan memperluas kerjasama internasional, kawasan ini dapat membangun pertahanan siber yang lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman digital di masa depan.

Simpulan

Indo-Pasifik merupakan wilayah vital bagi keamanan dan stabilitas global, terutama dalam aspek keamanan maritim karena merupakan rute utama perdagangan internasional. Keamanan maritim tradisional perlu diperluas untuk mencakup keamanan siber dan informasi, mengingat digitalisasi operasi perkapalan membawa ancaman baru berupa serangan siber. Industri maritim menghadapi risiko siber yang signifikan, termasuk pencurian data dan serangan terhadap sistem operasional kapal. Tantangan keamanan siber maritim meliputi kompleksitas industri, teknologi yang beragam, dan regulasi yang belum memadai. Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko siber maritim yang komprehensif, termasuk regulasi, pelatihan, dan kelembagaan yang kuat. Kerjasama bilateral dan multilateral sangat penting untuk meningkatkan keamanan siber maritim Indonesia. Inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan latihan bersama dengan negara-negara lain merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber-maritim. Indonesia perlu memperkuat kapasitas dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber-maritim, mengesahkan undang-undang keamanan siber yang komprehensif, memperjelas struktur organisasi aktor keamanan siber untuk menghindari tumpang tindih, meningkatkan kerjasama internasional, dan melakukan pembaruan teknologi keamanan siber. Keamanan siber-maritim adalah aspek krusial

yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Indo-Pasifik.

Daftar Pustaka

- Aulia, M.R. (2025) *Indonesia Satukan Kekuatan Besar dalam Diplomasi Maritim*, *MetroTV News*. Available at: <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCegd1-indonesia-satukan-kekuatan-besar-dalam-diplomasi-maritim> (Accessed: 8 April 2025).
- Azahra, B. (2025) *Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Marine and Coastal Policy Research*. Available at: <https://mcpr.komitmen.org/2025/01/06/strategi-diplomasi-maritim-indonesia-melalui-asean-outlook-on-the-indo-pacific/> (Accessed: 8 April 2025).
- Dachi, E. T., Moch Yurianto, & Purwanto. (2023). The Indo-Pacific Context: Maritime Security Challenges And Diplomacy Of Asean Countries. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6), 1872–1881. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.509>
- Department of Homeland Security. (2024). *DHS Bolsters Indo-Pacific Maritime Cybersecurity through Partnership with Indonesia*. <https://www.dhs.gov/archive/news/2024/06/18/dhs-bolsters-indo-pacific-maritime-cybersecurity-through-partnership-indonesia>
- Endyka Triono Dachi, Moch Yurianto and Purwanto (2023) ‘The Indo-Pacific Context: Maritime Security Challenges And Diplomacy Of Asean Countries’, *International Journal Of Humanities Education and*

- Social Sciences (IJHES)*, 2(6), pp. 1872–1881.
Available at: <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.509>.
- Gopal, P. (2017). Maritime Security in the Indo-Pacific: The Role of the US and its Allies. *Maritime Affairs*, 13(1), 27–40. <https://doi.org/10.1080/09733159.2017.1321208>
- Haramain, A.M. (2024) *Memperkuat Pertahanan Maritim dan Siber*, *Kompas*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/29/memperkuat-pertahanan-maritim-dan-siber> (Accessed: 8 April 2025).
- IMO (no date) *Maritime cyber risk*, *International Maritime Organization*.
- Indonesia Defense (2024) *Respons Tantangan Keamanan Maritim, Angkatan Laut Indonesia-Jerman Sepakat Bangun Kerja Sama*, *Indonesia Defense*. Available at: [https://indonesiadefense.com/respons-tantangan-keamanan-maritim-angkatan-laut-indonesia-jerman-sepakat-bangun-kerja-sama/#:~:text=Jakarta%2C%20IDM%20%20E%80%93%20TNI%20AL%20dan,Jumat%20\(27/9\).&text=%E2%80%9CKedatangan%20koman%20armada%20%20ini,hari%2C%20yaitu%206%2D29.&text=Schulz%20mengatakan%20kedatangan%20kedua%20kapal,solidaritas%20persahabatan%20an%20kedua%20angkatan%20laut](https://indonesiadefense.com/respons-tantangan-keamanan-maritim-angkatan-laut-indonesia-jerman-sepakat-bangun-kerja-sama/#:~:text=Jakarta%2C%20IDM%20%20E%80%93%20TNI%20AL%20dan,Jumat%20(27/9).&text=%E2%80%9CKedatangan%20koman%20armada%20%20ini,hari%2C%20yaitu%206%2D29.&text=Schulz%20mengatakan%20kedatangan%20kedua%20kapal,solidaritas%20persahabatan%20an%20kedua%20angkatan%20laut). (Accessed: 8 April 2025).
- Karim, M.S. (2022) ‘Maritime cybersecurity and the IMO legal instruments: Sluggish response to an escalating threat?’, *Marine Policy*, 143. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105138>.
- Kemenhub RI (2024) *Perkuat Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan, Kemenhub Bersama U.S. Embassy Gelar*

- Maritim Security Exercise & Workshop Serta Port Visit, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.* Available at: [https://hubla.dephub.go.id/ksopambon/page/news/read/21103/perkuat-keamanan-kapal-dan-fasilitas-pelabuhan-kemenhub-bersama-u-s-embassy-gelar-maritim-security-exercise-workshop-serta-port-visit#:~:text=Untuk%20meminimalisir%20resiko%20akan%20hal,\(AD/MM\).](https://hubla.dephub.go.id/ksopambon/page/news/read/21103/perkuat-keamanan-kapal-dan-fasilitas-pelabuhan-kemenhub-bersama-u-s-embassy-gelar-maritim-security-exercise-workshop-serta-port-visit#:~:text=Untuk%20meminimalisir%20resiko%20akan%20hal,(AD/MM).) (Accessed: 8 April 2025).
- Logistik News (2021) *Menjaga Keamanan Siber Maritim, Logistik News.* Available at: <https://www.logistiknews.id/2021/10/30/menjaga-keamanan-siber-maritim/> (Accessed: 8 April 2025).
- Maritime Institute of Technology and Graduate Students (2024) *Guide to Maritime Security, Maritime Institute of Technology and Graduate Students.* Available at: <https://www.mitags.org/security-guide/> (Accessed: 8 April 2025).
- Marpoint (2024) *2024: A Year of Rising Tides in Maritime Cybersecurity, Marpoint.* Available at: <https://marpoint.gr/blog/2024-a-year-of-rising-tides-in-maritime-cybersecurity/#:~:text=The%20Numbers%20Tell%20the%20Story,14.8%20billion%20security%20alerts> (Accessed: 8 April 2025).
- Medcalf, R. (2019) *Indo-Pacific Visions: Giving Solidarity a Chance keywords: indo-pacific; regional framework; international order.*
- Mission Secure (no date) *Panduan Lengkap Keamanan Siber Maritim, Mission Secure.* Available at: <https://www.missionsecure.com/maritime-security->

perspectives-for-a-comprehensive-approach (Accessed: 8 April 2025).

- Muhibat, S. F., & Waffa, K. M. (2020). *Responding to the Geopolitics of Connectivity: Asian and European Perspectives*.
- Nabbs-Keller, G., Ko, R., Mackay, T., Salmawan, N. A., Widodo, W. N., & Reksoprodjo, A. H. S. (2021). Cyber security governance in the Indo-Pacific: Policy futures in Australia, Indonesia and the Pacific. *The University of Queensland, May*. <https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:4364b42>
- Pratiwi, F.I. *et al.* (2021) ‘Global Maritime Fulcrum: Indonesia’s Middle Power Strategy Between Belt and Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP)’, *Central European Journal of International and Security Studies*, 15(3), pp. 30–54. Available at: <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302>.
- Putri, S. A., & Burhanuddin, A. (2024). Maritime Cybersecurity: Tantangan Dan Strategi Keamanan Maritim Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 2(1), 378–386. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.940>
- Reiber, J. (2018). The Fastest Way Across the Seas: Cyberspace Operations and Cybersecurity in the Indo-Pacific. In G. F. Gresh (Ed.), *Eurasia’s Maritime Rise and Global Security: From the Indian Ocean to Pacific Asia and the Arctic* (pp. 1–288). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-71806-4>
- Tertia, J., & Perwita, A. A. B. (2018). Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects. *Jurnal Ilmiah*

Hubungan Internasional, 14(1), 77.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95>

Sharma, L. (2024) 'Maritime cybersecurity in the Indo-Pacific: envisioning a role for the Quad', *Journal of the Indian Ocean Region* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1080/19480881.2024.2341467>.

UI (no date) *Lima Pilar Kebijakan Maritim untuk Menjadi Poros Maritim Dunia*, Universitas Indonesia. Available at: <https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/> (Accessed: 8 April 2025).

Vosse, W. (2022). A Conceptional Broadening of the Security Order in the Indo-Pacific: The Role of EU-Japan Cooperation in ICT and Cybersecurity. *Asian Affairs*, 53(3), 561–582. <https://doi.org/10.1080/03068374.2022.2090683>

Yildirim, O. (no date) *Maritime Cybersecurity - Navigating through Cyber Vulnerabilities*, *Advanced Polymer Coatings*. Available at: <https://www.adv-polymer.com/blog/maritime-cybersecurity#ch5> (Accessed: 8 April 2025).

Kejahatan Transnasional di Indo-Pasifik dan Keamanan Manusia Indonesia

Mohammad Ayub Mirdad

Pendahuluan

Di dunia yang mengglobal saat ini, kejahatan transnasional menimbulkan ancaman serius bagi keamanan manusia dan nasional. Kejahatan ini, yang mengabaikan batas geografis, mencakup kegiatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya (Shelley, 2014). Sementara proses globalisasi telah memberikan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk interaksi ekonomi, budaya, dan politik, hal itu juga telah menciptakan lahan baru untuk kegiatan ilegal transnasional (Castells, 2011). Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai kegiatan ilegal karena lokasi geografisnya yang strategis, perbatasan laut yang luas, serta keragaman budaya dan ekonomi. Sebagai kawasan yang memiliki ekonomi terpadat dan paling dinamis di dunia, kawasan ini memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan, sebagai akibatnya, lebih rentan terhadap ancaman keamanan transnasional. Jalur laut penting seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia, sebagai jalur vital untuk pergerakan barang, minyak, dan sumber daya strategis lainnya, sangat rentan terhadap kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pembajakan (Emmers, 2003).

Sebagai dampak dari globalisasi, jaringan perdagangan narkoba secara bertahap telah berkembang menjadi fenomena transnasional yang berpengaruh di tingkat internasional (Mirdad, 2020). Perdagangan narkoba dari Asia Tenggara, khususnya dari “Segitiga Emas” yang meliputi perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand, dianggap sebagai salah satu tantangan keamanan utama di kawasan tersebut. Narkoba ini diangkut ke seluruh dunia melalui jaringan transportasi laut dan darat yang kompleks, sehingga mengancam keamanan negara-negara di sepanjang rute tersebut (UNODC, 2021). Selain itu, perdagangan manusia di sepanjang rute migrasi tidak teratur, khususnya dari negara-negara yang terkena krisis ke tujuan-tujuan yang secara ekonomi maju di kawasan tersebut, telah meningkatkan masalah hak asasi manusia dan keamanan internal bagi negara-negara (Carling, dkk. 2015). Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya ketergantungan negara-negara pada infrastruktur digital telah menyediakan platform yang sesuai untuk penyebaran kejahatan dunia maya yang canggih. Kejahatan ini termasuk serangan dunia maya pada infrastruktur penting, pencurian informasi sensitif, dan kejahatan keuangan daring yang dapat secara serius mengancam keamanan nasional dan ekonomi suatu negara (Chang, 2012). Interaksi yang kompleks antara ancaman-ancaman ini telah menciptakan tantangan yang signifikan bagi para pembuat kebijakan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang membutuhkan kerja sama internasional yang luas dan strategi keamanan yang komprehensif.

Indonesia, sebagai salah satu negara kunci di kawasan ini, dampak kejahatan transnasional sangat terasa. Karena letak geografisnya, negara ini tidak hanya menjadi rute transit tetapi

juga tujuan dan pusat operasi bagi kelompok kriminal transnasional. Kejahatan transnasional dapat secara langsung dan tidak langsung mengancam keamanan manusia, termasuk melalui peningkatan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, penyebaran penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi (UNODC, 2019). Indonesia terkena dampak perdagangan narkoba karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan kedekatannya dengan Segitiga Emas. Jaringan perdagangan narkoba memasuki Indonesia dari Segitiga Emas, meningkatkan kegiatan ilegal dan ancaman keamanan (UNODC, 2021). Perdagangan narkoba, terutama heroin dan metamfetamin, memasuki Indonesia melalui laut dan udara, yang membuat negara ini menghadapi ancaman terkait kesehatan masyarakat dan keamanan dalam negeri. Kegiatan penyelundupan di wilayah ini juga dapat memperburuk kekerasan terkait narkoba dan ancaman terhadap lembaga pemerintah dan keamanan.

Kejahatan transnasional, seperti yang terlihat dalam kasus Indonesia, mengacu pada kegiatan kriminal yang terjadi di luar batas negara dan berdampak pada lebih dari satu negara. Jenis kejahatan ini biasanya melibatkan kegiatan yang dilakukan secara serentak di beberapa negara atau dipindahkan dari satu negara ke negara lain (Savona & Williams, 2012). Menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kejahatan transnasional mencakup “tindak pidana yang dilakukan di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara tetapi sebagian direncanakan, diarahkan, atau dikendalikan di negara lain; atau dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang beroperasi di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara tetapi berdampak signifikan di negara lain” (Majelis Umum PBB, 1995). Kejahatan transnasional dapat secara

langsung atau tidak langsung mengancam keamanan nasional dan global, sering kali menggunakan jaringan kriminal global yang kompleks yang sulit dilacak dan dipantau (UNODC, 2021). Kegiatan-kegiatan ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi Asia Tenggara, Indonesia, dan masyarakat internasional yang lebih luas (UNODC, 2019). Jenis-jenis kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

- **Perdagangan Narkoba:** merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan meluas yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan narkoba secara ilegal. Proses ini biasanya berlangsung dari negara-negara penghasil narkoba ke negara-negara konsumen dengan menggunakan jaringan kriminal internasional. Perdagangan narkoba tidak hanya merusak perekonomian berbagai negara tetapi juga berdampak sosial dan kesehatan.
- **Perdagangan Manusia:** mengacu pada pemindahan orang secara ilegal untuk tujuan kerja paksa, perbudakan seksual, atau bentuk eksploitasi lainnya. Fenomena ini paling umum terjadi di negara-negara berkembang. Perdagangan manusia dapat dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan sosial, ekonomi, dan politik individu.
- **Pencucian uang:** proses menyembunyikan hasil kegiatan ilegal dan mengubahnya menjadi aset yang sah. Proses ini biasanya dilakukan melalui bank, perusahaan cangkang, dan transaksi keuangan yang kompleks. Pencucian uang dapat menyebabkan menguatnya kejahatan terorganisasi, korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara.

- Kejahatan dunia maya: mencakup berbagai kegiatan kriminal yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini dapat mencakup peretasan, pencurian identitas, serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan pencurian data sensitif. Jenis kejahatan ini tidak hanya merusak infrastruktur teknologi tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ekonomi berbagai negara.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memfasilitasi kejahatan transnasional secara signifikan. Perluasan internet dan akses ke teknologi baru telah memungkinkan komunikasi yang cepat dan transfer informasi, modal, dan orang yang mudah dalam skala besar, yang telah memberi kelompok kriminal peluang emas untuk kegiatan ilegal mereka (Castells, 2011). Internet, sebagai platform global, tidak hanya memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dunia maya tetapi juga memungkinkan kelompok perdagangan manusia untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai jaringan mereka dan dengan mudah melakukan perencanaan ilegal dalam skala global. Selain itu, kemajuan dalam teknologi transportasi, termasuk biaya perjalanan internasional yang lebih murah, telah memungkinkan penjahat untuk memindahkan orang dari satu negara ke negara lain dengan cepat dan dengan biaya serendah mungkin, yang telah menyebabkan peningkatan perdagangan manusia dan kegiatan ilegal lainnya (Friedman, 2005). Menurut Mirdad (2020), salah satu kekurangan globalisasi adalah merebaknya terorisme dan kelompok kejahatan terorganisasi. Globalisasi telah memudahkan komunikasi dan kerja sama antara kelompok-kelompok ini serta

telah menyediakan dasar bagi kelanjutan dan perluasan kegiatan mereka. Secara keseluruhan, globalisasi dan teknologi baru telah memungkinkan kejahatan ini dengan mudah melintasi batas negara dan menjadi ancaman serius bagi keamanan global.

Kejahatan Transnasional di Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik, dengan cakupan geografisnya yang luas serta keragaman budaya, ekonomi, dan politik, telah menjadi salah satu kawasan yang paling sensitif terhadap kejahatan transnasional. Kawasan ini mencakup negara-negara dengan berbagai tingkat pembangunan, yang sebagian di antaranya menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya supremasi hukum. Kombinasi faktor-faktor ini dengan lokasi strategis kawasan ini telah menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perluasan kejahatan terorganisasi transnasional (Berdal, 2002).

Salah satu faktor utama yang memicu peningkatan kejahatan transnasional di kawasan ini adalah lokasi geografisnya yang unik. Kawasan Indo-Pasifik terletak di jalur perdagangan global yang penting dan menyediakan akses yang luas ke perairan terbuka. Karakteristik ini menjadikan kawasan ini sebagai titik transit penting untuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, dan aktivitas ilegal lainnya. Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), rute perdagangan narkoba di kawasan Asia-Pasifik rumit dan beragam, sehingga sulit dikendalikan dan dilacak (UNODC, 2021). Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan transnasional adalah perbatasan kawasan yang luas dan, dalam banyak kasus, tidak terkendali. Negara-negara di kawasan ini berbagi

perbatasan darat dan laut yang panjang yang menantang untuk dipantau dan dikendalikan. Perbatasan yang keropos ini telah menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan, imigrasi ilegal, dan perdagangan satwa liar. Menurut Pusat Studi Strategis di Asia-Pasifik (CSCAP), kurangnya koordinasi antarnegara dalam pengelolaan perbatasan menciptakan peluang bagi jaringan kriminal (CSCAP, 2021).

Keragaman ekonomi di kawasan ini juga berperan penting dalam meningkatnya kejahatan transnasional. Sementara beberapa negara, seperti Jepang dan Australia, memiliki perekonomian yang kuat, banyak negara lain yang berjuang melawan masalah ekonomi yang serius. Ketimpangan ini menciptakan insentif yang kuat untuk migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa tekanan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja membuat orang berisiko dieksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia (Bauloz dkk, 2022). Lemahnya supremasi hukum dan lembaga peradilan yang tidak efektif di beberapa negara di kawasan ini semakin memudahkan terjadinya kegiatan kriminal. Korupsi di lembaga pemerintah dan ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara efektif memberikan ruang yang aman bagi kelompok kriminal untuk beroperasi. Menurut Transparency International, negara-negara yang mendapat skor lebih rendah pada Indeks Persepsi Korupsi lebih rentan terhadap kejahatan transnasional (Transparency International, 2020).

Perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu tantangan keamanan utama di kawasan Indo-Pasifik. Lemahnya kontrol perbatasan, korupsi administratif, dan kurangnya kerja sama regional yang efektif memfasilitasi perdagangan manusia

(Lee, 2013). Fenomena ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Perdagangan narkoba merupakan masalah serius lainnya di kawasan ini. Kelompok kejahatan terorganisasi mengeksploitasi infrastruktur yang lemah dan hukum yang tidak efektif untuk menyelundupkan narkoba ke pasar global, meningkatkan kekerasan dan ketidakstabilan di berbagai masyarakat (Windle, 2017). Selain ancaman-ancaman ini, kejahatan dunia maya telah tumbuh secara signifikan di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir. Penyebaran teknologi informasi tanpa infrastruktur keamanan yang memadai telah membuat negara-negara rentan terhadap serangan dunia maya, pencurian data, dan kejahatan keuangan (Lin & Nomikos, 2018). Ancaman yang berkembang ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah keamanan dunia maya yang kuat dan kerja sama regional untuk memerangi kejahatan digital secara efektif.

Seperti banyak negara lain di Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi ancaman keamanan serupa, khususnya dalam ranah kejahatan dunia maya. Misalnya, salah satu serangan paling signifikan adalah pelanggaran pusat data nasional Indonesia pada tahun 2024, yang menyebabkan terganggunya sistem imigrasi bandara (The Record, 2024). Peretas menggunakan malware Lockbit 3.0 untuk mengendalikan beberapa layanan pemerintah dan meminta tebusan sebesar \$8 juta (AP News, 2024). Serangan tersebut menyebabkan antrean panjang di konter imigrasi dan mengganggu layanan bandara (Reuters, 2024). Insiden ini menyoroti kerentanan infrastruktur digital Indonesia dan menggarisbawahi perlunya memperkuat keamanan dunia maya.

Dampak Kejahatan Transnasional Terhadap Keamanan Manusia di Indonesia

Sebagai salah satu negara terbesar di kawasan ini, Indonesia memegang peranan penting dalam isu keamanan regional karena letak geografisnya yang strategis dan jumlah penduduknya yang besar. Negara ini menghadapi berbagai tantangan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Indonesia khususnya dikenal sebagai negara asal, tujuan, dan transit bagi para korban perdagangan manusia. Menurut laporan, banyak perempuan dan anak Indonesia yang dikirim ke negara lain melalui jaringan perdagangan manusia atau terjebak di dalam negeri sebagai korban perdagangan manusia. Para korban ini terutama dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam jalur perdagangan manusia di Asia Tenggara, yang membutuhkan kerja sama yang lebih besar dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi masalah ini (US Department of State, 2020).

Kejahatan transnasional berdampak luas terhadap keamanan manusia di Indonesia, yang dapat dikaji dalam berbagai dimensi. Dampak negatifnya tidak hanya pada struktur sosial dan ekonomi tetapi juga pada lingkungan. Kajian tentang kejahatan ini dan konsekuensinya di Indonesia menunjukkan tantangan serius dalam memastikan keamanan manusia.

- A. Keamanan ekonomi: Perdagangan narkoba dan pencucian uang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian nasional. Selain biaya kesehatan dan

medis, perdagangan narkoba mengurangi produktivitas tenaga kerja dan menyebarkan korupsi di lembaga pemerintah. Pencucian uang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan melalui masuknya modal ilegal ke dalam sistem keuangan. Menurut UNODC, hasil perdagangan narkoba di Indonesia dapat sangat memengaruhi investasi yang sah dan kepercayaan pasar serta juga merugikan pemerintah dalam proyek pembangunan dan sosial (UNODC, 2019).

- B. Jaminan sosial: Kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, berdampak besar pada masyarakat setempat. Pelaku perdagangan manusia sering mengeksploitasi orang-orang yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara lain sebagai budak seks atau kerja paksa sering kali menghadapi masalah psikologis dan sosial yang sulit dipulihkan setelah dibebaskan. Menurut (US Department of State, 2020), Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara sumber dan tujuan perdagangan manusia, tetapi juga menjadi jalur transit bagi korban dari negara-negara Asia Tenggara lainnya ke berbagai tujuan. Setelah dilepaskan dari para pedagang, para korban menghadapi masalah seperti kemiskinan, trauma psikologis, dan ketidakmampuan untuk membangun kembali kehidupan sosial mereka.
- C. Keamanan lingkungan: Indonesia merupakan salah satu pusat utama perdagangan satwa liar di dunia (UNDP, n.d.). Perdagangan spesies langka, seperti orangutan dan

burung tropis, merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati negara ini. Perdagangan satwa liar tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara langsung merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam ini. Selain itu, perdagangan kayu dan penebangan liar telah menyebabkan deforestasi yang meluas di negara ini. Perdagangan ini menyebabkan hilangnya sumber daya alam dan mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan asli, serta akan berdampak negatif jangka panjang pada keamanan lingkungan Indonesia.

Memerangi Kejahatan Transnasional di Kawasan Indo-Pasifik

Organisasi regional seperti ASEAN dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya internasional untuk memerangi kejahatan transnasional (ASEAN, 2017; APG, n.d.). Organisasi-organisasi ini meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal dengan membangun kerangka kerja untuk kerja sama intelijen, berbagi data sensitif, dan melakukan operasi gabungan (ASEAN, 2017; APG, n.d.).

ASEAN telah berhasil memperkuat kerja sama keamanan dan kepolisian di antara negara-negara anggota melalui inisiatif seperti Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional yang merupakan strategi regional untuk memerangi kejahatan transnasional di negara-negara anggota ASEAN (ASEAN, 2017). Kerja sama ini mencakup program pelatihan, koordinasi investigasi

internasional, dan pengembangan kapasitas teknis dan hukum untuk memerangi kejahatan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan dunia maya. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) bertanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Aksi ASEAN.

ASEANAPOL (Kepala Kepolisian ASEAN) merupakan platform penting untuk kerja sama keamanan antarnegara anggota. Organisasi ini menyelenggarakan pertemuan tahunan di mana perwakilan polisi dari negara-negara anggota berkumpul untuk bertukar informasi, mengoordinasikan operasi gabungan, dan meningkatkan strategi untuk memerangi kejahatan transnasional (ASEANAPOL, 2024). Misalnya, Indonesia telah bekerja sama erat dengan Malaysia dan Singapura dalam operasi gabungan untuk memerangi perdagangan manusia dan narkoba di Selat Malaka. Kerja sama ini telah menghasilkan identifikasi dan penangkapan beberapa jaringan perdagangan manusia di sepanjang perbatasan laut Indonesia (ASEANAPOL, 2025).

Meskipun ada kerja sama antarnegara, beberapa tantangan menghambat upaya regional untuk memerangi kejahatan transnasional secara efektif. Misalnya, perbedaan dalam hukum dan kebijakan domestik di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk variasi dalam kerangka hukum, sistem peradilan, dan prioritas keamanan, menyulitkan koordinasi dan penerapan strategi bersama. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas juga menimbulkan tantangan yang signifikan, karena beberapa negara, termasuk Indonesia, menghadapi kekurangan sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan program

bersama secara efektif. Tantangan kritis lainnya adalah kurangnya kepercayaan penuh antarnegara. Kekhawatiran keamanan dan politik dapat menyebabkan pembatasan pertukaran informasi sensitif antarpemerintah, yang menghambat kerja sama yang efektif dalam operasi bersama. Selain itu, koordinasi operasional tetap menjadi kesulitan utama. Kompleksitas koordinasi antara pasukan polisi, badan keamanan, dan organisasi internasional selama operasi lintas batas dapat mengakibatkan keterlambatan dalam respons dan berkurangnya efektivitas tindakan.

Dalam kasus Indonesia sebagai negara kunci di kawasan ini, telah melakukan reformasi dalam kebijakan domestiknya untuk meningkatkan kemampuannya dalam memerangi kejahatan transnasional. Dengan mengubah undang-undang yang terkait dengan kejahatan terorganisasi, pencucian uang, dan perdagangan manusia, negara ini telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk memerangi kejahatan ini. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Indonesia dalam arah ini adalah pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Indonesia telah melaksanakan reformasi terhadap hukum pidana dan undang-undang yang terkait dengan kejahatan terorganisasi untuk memerangi kejahatan transnasional. Reformasi ini meliputi penerapan undang-undang baru tentang pencucian uang, pendanaan teroris, dan perdagangan manusia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka hukum untuk memerangi kejahatan terkait narkoba (UU No. 35 Tahun 2009). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga telah meningkatkan pengawasan kegiatan keuangan (UU No. 8 Tahun 2010).

Meskipun pemerintah Indonesia berupaya keras untuk memerangi kejahatan transnasional, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam kebijakan dalam negeri Indonesia. Salah satu tantangan yang signifikan adalah korupsi di dalam lembaga pemerintah dan peradilan tertentu, yang menghambat upaya untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan secara efektif. Tantangan koordinasi antarlembaga dalam negeri juga menghambat kemajuan, dengan kolaborasi yang tidak memadai antara berbagai badan keamanan, peradilan, dan pemerintah di tingkat nasional yang menghambat implementasi kebijakan yang efektif untuk memerangi kejahatan transnasional. Selain itu, perbatasan Indonesia yang luas menimbulkan tantangan keamanan yang serius, karena negara ini berjuang untuk mengendalikan perbatasan laut dan daratnya yang luas karena geografinya yang unik dengan ribuan pulau, yang memberikan peluang bagi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pergerakan barang-barang ilegal. Lebih jauh lagi, maraknya kejahatan dunia maya dan pembiayaan ilegal melalui teknologi baru telah menciptakan ancaman tambahan bagi sistem keamanan Indonesia, dengan undang-undang dan kemampuan teknis yang ada seringkali tidak memadai untuk mengatasi risiko yang terus berkembang ini. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan yang signifikan, Indonesia masih memerlukan reformasi lebih lanjut dan kerja sama domestik dan internasional yang lebih kuat untuk memerangi kejahatan transnasional secara efektif.

Simpulan

Kejahatan transnasional merupakan tantangan yang kompleks dan terus berkembang yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik. Dengan memengaruhi berbagai dimensi keamanan, termasuk keamanan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, kejahatan ini membahayakan stabilitas nasional dan memengaruhi kerja sama regional serta tatanan internasional. Perluasan jaringan perdagangan manusia, perdagangan narkoba ilegal, kejahatan dunia maya, dan pencucian uang merupakan contoh ancaman yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis untuk memeranginya.

Untuk mengurangi ancaman tersebut, perlu dilakukan strategi yang mencakup kerja sama regional, reformasi hukum, dan teknologi baru. Dalam hal ini, penguatan kerja sama internasional melalui lembaga-lembaga seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL) dapat memainkan peran kunci dalam pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, reformasi hukum domestik dan perbaikan sistem peradilan Indonesia, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum dan kesadaran publik, merupakan beberapa langkah yang dapat membantu mengurangi jumlah kejahatan ini.

Pada akhirnya, penanganan kejahatan transnasional tidak hanya memerlukan tindakan yang mendesak dan terkoordinasi di tingkat nasional dan regional, tetapi juga analisis mendalam tentang faktor struktural, ekonomi, dan sosial yang memicu penyebaran kejahatan ini. Tanpa pandangan yang komprehensif

dan pendekatan yang berkelanjutan, keamanan manusia di kawasan ini akan terus terancam.

Daftar Pustaka

- AP News. (2024). Indonesia won't pay an \$8 million ransom after a cyberattack compromised its national data center. Retrieved Januari 11, 2025, from https://apnews.com/article/indonesia-ransomware-attack-national-data-center-213c14c6cc69d7b66815e58478f64cee?utm_source=chatgpt.com
- ASEAN. (2017). *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2025)*. Adopted at the 11th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, 20 September 2017, Manila, Philippines. Retrieved Januari 11, 2025, from https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17-1.pdf
- ASEANAPOL. (2024, August 21). ASEANAPOL Secretariat Sharing Session on Cooperation Mechanisms in Combatting Transnational Crime at the Royal Malaysia Police College Kuala Lumpur. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.aseanapol.org/display/2024/08/21/aseanapol-secretariat-sharing-session-on-cooperation-mechanisms-in-combatting-transnational-crime-at-the-royal-malaysia-police-college-kuala-lumpur>
- ASEANAPOL. (2025, February 1). Strengthening Regional Cooperation Against Transnational Crime: ASEANAPOL's Participation in the Debriefing Meeting

- for Operation Seagull. Retrieved Januari 14, 2025, from <https://www.aseanapol.org/display/2025/02/01/strengthening-regional-cooperation-against-transnational-crime-aseanapol%27s-participation-in-the-debriefing-meeting-for-operation-seagull>
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. (n.d.). About APG. Retrieved Januari 16, 2025, from <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/global-network/asia-pacific-group-on-money-laundering--apg-.html#:~:text=The%20purpose%20of%20the%20Asia,in%20the%20FATF%20Forty%20Recommendations%20>0.
- Bauloz, C., McAdam, M., & Teye, J. (2022). 10 Human trafficking in migration pathways: trends, challenges and new forms of cooperation. *World Migration Report, 2022*(1), e00031.
- Berdal, M. R. (Ed.). (2002). *Transnational organized crime and international security: business as usual?*. Lynne Rienner Publishers.
- Carling, J., Gallagher, A. T., & Horwood, C. M. (2015). Beyond definitions: Global migration and the smuggling-trafficking nexus. *Regional Mixed Migration Secretariat (2015)*.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. John Wiley & sons.
- Chang, L. Y. C. (2012). Cybercrime in the Greater China Region: Regulatory responses and crime prevention across the Taiwan Strait. In *Cybercrime in the Greater China Region*. Edward Elgar Publishing.

- Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP). (2021). *Regional Security Outlook*. CSCAP Publications. https://www.cscap.org/uploads/CSCAP%202021%20RSO%20Final.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Emmers, R. (2003). ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 16(3), 419-438.
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. Macmillan.
- International, Tarenparancy. (2020). Corruption Perceptions Index 2020. Transparency International: the global coalition against corruption. Retrieved Januari 19, 2025, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/>
- Law No. 35 of 2009 About Narcotics. (2009). Retrieved Januari 20, 2025, from <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>
- Law No. 8 of 2010 Countermeasure and Eradication of Money Laundering. (2010). *Law No. 8 of 2010 on the Countermeasure and Eradication of Money Laundering*. Retrieved Januari 20, 2025, from [http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%208%20of%202010%20on%20Prevention%20and%20Eradication%20of%20Money%20Laundering%20\(MoF\).pdf](http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%208%20of%202010%20on%20Prevention%20and%20Eradication%20of%20Money%20Laundering%20(MoF).pdf)
- Lee, M. (2013). Human trafficking and border control in the Global South. *The borders of punishment: Migration, citizenship, and social exclusion*, 128-149.
- Lin, L. S., & Nomikos, J. (2018). Cybercrime in East and Southeast Asia: the case of Taiwan. *Asia-Pacific security*

challenges: managing black swans and persistent threats, 65-84.

- Mirdad, M. A. (2020). Taliban insurgency and transnational organized crime nexus Pemberontakan Taliban dan perhubungan kejahatan transnasional terorganisir. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(3), 266-277.
- Reuters. (2024). *Cyber attack compromised Indonesia data centre, ransom sought*. Retrieved Januari 20, 2025, from <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/cyber-attack-compromised-indonesia-data-centre-ransom-sought-reports-antara-2024-06-24/>
- Savona, E., & Williams, P. (2012). *The United Nations and transnational organized crime*. Routledge.
- Shelley, L. I. (2014). *Dirty entanglements: Corruption, crime, and terrorism*. Cambridge University Press.
- The Record. (2024). *Indonesia's national data center encrypted with LockBit ransomware*. Retrieved Januari 20, 2025, from <https://therecord.media/indonesia-national-data-centre-hacked>
- UNDP. (n.d.). *GEF Combating Illegal Wildlife Trade (CIWT)*. United Nations Development Programme. Retrieved Januari 20, 2025, from <https://www.undp.org/indonesia/projects/gef-combatting-illegal-wildlife-trade-ciwt>
- United Nations General Assembly. (1995). Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *World Drug Report 2021*. Vienna: United Nations. Retrieved Januari 20, 2025, from

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>

United States Department of State (2020). Trafficking in Persons Report. Retrieved Januari 20, 2025, from <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/>

UNODC. (2019). Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved Januari 21, 2025, from https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf

Windle, J. (2017). A slow march from social evil to harm reduction: Drugs and drug policy in Vietnam. *Journal of Drug Policy Analysis*, 10(2), 20150011.

TENTANG PENULIS

Agastya Wardhana adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub. Int.) dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP Universitas Airlangga. Minat penelitiannya adalah Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Analisis Kebijakan Luar Negeri, Tatanan Internasional dan *Grand Strategy*.

A. Safril Mubah adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP Universitas Airlangga; *philosophiae doctor* (PhD.) dari National Chengchi University, Taiwan. Minat penelitiannya adalah Hubungan Trilateral AS – China – Taiwan, dan Tata Kelola Regional Indo-Pasifik

Arvian Ijlal Adhipratama adalah mahasiswa program Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Baiq L.S.W Wardhani adalah guru besar di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Doktoranda (Dra.) dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga; Master of Arts (M.A) dan *philosophiae doctor* (PhD.) dari Monash University, Australia. Ia adalah pemimpin redaksi Jurnal Global Strategis. Minat penelitiannya adalah kajian Pasifik Selatan, dan isu-isu pembangunan internasional, seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru, bantuan luar negeri, dan kerja sama Selatan-Selatan.

Bilqis Ratu Widyoningrat adalah mahasiswa program Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.

Citra Hennida adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dari FISIP Universitas Airlangga; Master of Arts (M.A) dari Flinders University, Australia. Saat ini sedang menempuh program Doktorat di Universitas Airlangga. Minat penelitiannya adalah institusi internasional dan tata kelola global.

Fadhila Inas Pratiwi adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int) dari FISIP Universitas Airlangga; Master of Arts (M.A) dari University of Birmingham, United Kingdom. Saat ini sedang menempuh program Doktorat di University of New South Wales, Australia. Minat penelitiannya adalah politik keamanan internasional, studi keamanan kontemporer, keamanan siber, geopolitik kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dan kebijakan luar negeri.

Ghulam Phasa Pambayung adalah alumni program Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.

Hannah Fadhila Anindya Wibowo adalah mahasiswa program Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.

Himmalia D. A. Rahmah adalah asisten dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, asisten editor Jurnal Hubungan Internasional, dan asisten peneliti di Cakra Studi Global Strategis (CSGS). Ia merupakan alumni program Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga

Joko Susanto adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dari FISIP Universitas Airlangga; Master of Science (M.Sc.) dari London School of Economics and Political Science (LSE), University of London. Saat ini sedang menempuh program Doktorat di University of Cambridge. Minat penelitiannya adalah tentang genealogi gagasan kemajuan, aspirasi pengejaran status, dan politik emansipasi Indonesia sebagai kekuatan udaya (*emerging power*). Mencakup di dalamnya adalah kajian umum tentang “proyek-proyek nasionalisme pengejaran ketertinggalan bangsa-bangsa di kancah dunia (*catch-up nationalism*), dinamika emerging geopolitics di Indo-Pasifik, serta dinamika politik emansipatif era modernitas akhir maupun globalisasi kontemporer. Sebelumnya, ia menginisiasi pengembangan “Emerging Indonesia Project” (EIP), sebuah prakarsa *non-governmental* untuk meningkatkan kesadaran luas publik dan pengambil kebijakan terkait peluang dan tantangan transformasi Indonesia dari negara berkembang ke negara udaya.

Massari Inong Tanaurant adalah alumni program Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.

Mira Nanda Kurnianta adalah alumni program studi Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) FISIP Universitas Airlangga.

M. Muttaqien adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada; Master of Arts (M.A), dan philosophiae doctor (PhD.) dari Flinders University, Australia. Minat penelitiannya adalah politik luar negeri Indonesia, studi keamanan, Hubungan Internasional di Timur Tengah, dan konflik global.

Moch. Yunus adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dari FISIP Universitas Airlangga; Master of Arts (M.A) dari Universitas Gadjah Mada. Minat penelitiannya adalah strategi dan tata kelola strategi, finansial internasional, dan investasi international.

Mohammad Ayub Mirdad adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dari Kateb University, Kabul, Afghanistan; Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP, Universitas Airlangga, dan Doktor dalam Ilmu Sosial dengan spesialisasi Hubungan Internasional dari FISIP, Universitas Airlangga. Minat penelitiannya adalah studi keamanan non-tradisional, studi konflik, masyarakat sipil global & NGOs, dan studi regional. Ia juga editor Jurnal Global Strategis (JGS) dan peneliti di Center for Strategic and Global Studies (CSGS).

Probo Darono Yakti adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP Universitas Airlangga. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Sosial dari FISIP Universitas Airlangga. Minat penelitiannya mencakupi strategi kemaritiman, kajian Tiongkok, geopolitik dan geostrategi, kajian pertahanan kontemporer, studi politik dan keamanan, serta pemajuan kebudayaan. Peneliti di Center for Strategic and Global Studies (CSGS), Sekretaris Pusat Studi Afrika FISIP UNAIR, Deputy Direktur Program Emerging Indonesia Project (EIP), dan perintis Center for National Defense and Security Studies (CNDSS).

Radityo Dharmaputra adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP Universitas Airlangga, serta memfokuskan pendidikannya dengan mengambil magister kajian Rusia dan kawasan Eurasia di University of Glasgow, Skotlandia dan University of Tartu, Estonia. Ia saat ini sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya di Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu, Estonia. Minat penelitiannya adalah mengenai politik luar negeri Rusia di Asia-Pasifik serta bagaimana Rusia menggunakan perang informasi di kawasan.

Sarah Anabarja adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dan Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari FISIP Universitas Airlangga; *philosophiae doctor* (PhD.) dari National Chengchi University, Taiwan. Minat penelitiannya adalah Kajian wilayah Asia-Timur, Aktivisme Masyarakat Transnasional, serta Organisasi & Bisnis Internasional. Ia juga menjadi editor pelaksana Jurnal Hubungan Internasional, dan peneliti di Center for Strategic and Global Studies (CSGS).

Siti R. Susanto adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas (FISIP) Airlangga. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada; Master of Arts (M.A) dari Monash University, Australia; dan Doktor Philosophy (Dr.Phil) dari Westfaelische Wilhelms Universitaet, Muenster, Jerman dari minat penelitiannya adalah isu kerjasama pembangunan internasional, politik lingkungan, Politik Eropa, dan politik luar negeri.

Velicia Giovani Hartanto adalah mahasiswa program Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Vinsensio Dugis adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Ia memperoleh gelar Doktorandus (Drs.) dari FISIP Universitas Airlangga; Master of Arts (M.A), dan *philosophiae doctor* (PhD.) dari Flinders University, Australia. Minat penelitiannya adalah analisis politik luar negeri, kajian Australia, dan perbatasan internasional. Ia juga menjadi Direktur Pusat studi ASEAN Universitas Airlangga.

Buku ini mengupas secara mendalam perubahan geopolitik dan geostrategis di kawasan Indo-Pasifik yang semakin menjadi pusat perhatian dunia. Kawasan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga menjadi titik krusial bagi stabilitas ekonomi, politik, dan militer global. Penulis memaparkan bagaimana dinamika regional—seperti persaingan maritim di Laut Cina Selatan, inisiatif Belt and Road, serta kerja sama keamanan ASEAN dan mitra eksternal—mempengaruhi tatanan keamanan di Indonesia, baik dari aspek tradisional maupun non-tradisional.

Lebih dari sekadar membahas isu keamanan negara, buku ini menyoroti pentingnya pendekatan human security atau keamanan manusia dalam merespons tantangan kontemporer. Melalui lensa keamanan manusia, isu seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, kerentanan ekonomi, dan disinformasi dikaji sebagai bagian dari dampak luas dinamika Indo-Pasifik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner dan studi kasus aktual, buku ini menjadi bacaan penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami keterkaitan antara geopolitik regional dan kesejahteraan manusia di tanah air.



Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com

